

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Gambaran umum objek penelitian menjelaskan secara spesifik terkait objek penelitian (permasalahan, problem, isu atau sifat keadaan: benda, orang, lembaga/organisasi dan sebagainya) yang diteliti dan dideskripsikan secara lebih terperinci, sehingga hasil pengamatan/observasi dan studi dokumentasi terhadap obyek yang diteliti dapat tergambar dengan jelas. Gambaran umum penelitian pada penelitian ini akan menjelaskan komponen-komponen inti dalam arsitektur keamanan maritim di Laut Cina Selatan.

4.1.1 Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan adalah laut besar setengah tertutup yang berbatasan dengan Hongkong, Taiwan, Brunei, Republik Rakyat RRC, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Kamboja, dan Vietnam. Wilayah ini memiliki banyak potensi konflik apalagi setelah RRC mendeklarasikan klaim *nine dash line* yang terdiri dari sembilan garis putus-putus yang memotong wilayah kedaulatan berbagai negara. Menurut data McGill University (2007), beberapa potensi konflik yang bisa ditimbulkan diantaranya adalah:

- a. Indonesia dan RRC atas perairan Natuna;
- b. Filipina dan RRC atas ladang gas Malampaya dan Camago serta Scarborough Shoal;
- c. Vietnam dan RRC atas perairan barat Kepulauan Spratly. Beberapa atau semua pulau itu sendiri juga diperebutkan antara Vietnam, RRC, Brunei, Malaysia, dan Filipina;
- d. Kepulauan Paracel disengketakan antara RRC dan Vietnam;
- e. Malaysia, Kamboja, Thailand dan Vietnam atas wilayah di Teluk Thailand; dan

- f. Singapura dan Malaysia di sepanjang Selat Johor dan Selat Singapura.

Secara geografis, Laut Cina Selatan terdiri dari >200 pulau dan terumbu karang yang teridentifikasi, atoll, dan pulau-pulau kecil. Sebagian besar terumbu itu berada di Kepulauan Spratly, dan RRC memegang kendali yang besar di sekitar Kepulauan Paracel dan Spratly. Perhatikan peta berikut ini.



Gambar 4.2 Peta Laut Cina Selatan
Sumber: James Bellacqua (2012)

Klaim RRC di Laut Cina Selatan sama sekali tidak memenuhi hak yang sudah dijelaskan dalam hukum laut internasional UNCLOS 1982. Seperti yang sudah dijelaskan oleh United States Department of State (2022), RRC sedang berusaha untuk menegaskan klaimnya ada empat kategori klaim maritim seperti:

- a. **klaim kedaulatan atas fitur maritim**, ada lebih dari 100 fitur maritim yang akan tenggelam ketika air pasang dan hanya muncul ketika air surut. Fitur ini sebenarnya tidak memiliki kedaulatan yang sah jika ditinjau berdasarkan hukum UNCLOS;
- b. **garis dasar lurus**, tak satu pun dari empat “kelompok pulau” yang diklaim oleh RRC di Laut Cina Selatan (“Dongsha Qundao,” “Xisha Qundao,” “Zhongsha Qundao,” dan “Nansha Qundao”) yang memenuhi kriteria geografis untuk menggunakan garis pangkal lurus sesuai ketentuan konvensi;
- c. **zona maritim**, RRC menegaskan klaim atas perairan pedalaman, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen atas keempat pulau dengan bentuk klaim secara keseluruhan; dan
- d. **hak bersejarah**, klaim ini tidak memiliki dasar hukum dan ditegaskan oleh RRC tanpa spesifisitas mengenai sifat atau cakupan geografis dari "hak historis" yang diklaim.

Sengketa LCS didukung oleh program modernisasi militer yang dilakukan RRC untuk mengubah lingkungan keamanan di Asia-Pasifik (Easton, 2013). Strategi militer dan keamanan RRC akan direpresentasikan dari strategi Partai Komunis RRC, selaku otoritas eksekutif yang berwenang untuk menjalankan pemerintahan di negara tersebut. Dalam hal ini, PLA (tantara nasional RRC) adalah sayap bersenjata dari CCP. Hal inilah yang menarik perhatian dair berbagai aktor di dunia, termasuk Amerika dan sekutunya. Eskalasi konflik yang terjadi tentu tidak sesuai dengan arsitektur keamanan maritim yang ideal.

4.1.2 LCS dan Peningkatan Kekuatan Maritim RRC

Perubahan identitas RRC dari negara kontinental ke negara dengan kekuatan maritim yang besar telah mencuri perhatian dunia sejak beberapa dekade terakhir. Perubahan ini telah meningkatkan kepercayaan diri RRC untuk meningkatkan atau menurunkan eskalasi di perairan LCS sesuai dengan kebutuhan geopolitik mereka. Para akademisi berusaha untuk menebak alasan di balik perombakan besar-besaran tersebut. Beberapa dari mereka merasa jika kebangkitan *maritime power* RRC disokong oleh dorongan realisme dan interpretasi materialis lainnya. Dalam pandangan ini, RRC yang mengalami pertumbuhan ekonomi sejak masa Deng Xiaoping merasa perlu merawat dan melindungi laut yang berfungsi sebagai jalur utama lalu lintas perdagangan mereka.

Pernyataan tersebut kemudian ditolak oleh Nohara (2017: 211) dalam penelitiannya mengenai “*Sea Power as a Dominant Paradigm: The Rise of RRC’s New Strategic Identity*”. Nohara menjelaskan jika dorongan realisme harus didasarkan pada keselarasan persepsi mengenai ancaman dan kekuatan, dan kondisi RRC yang relatif aman ketika itu tidak bisa diklasifikasikan ke dalam motif ini. Menurutnya akan lebih masuk akal jika RRC mencurahkan keuangannya pada penanaman investasi sipil dan penguatan pertahanan kontinental. *Free-riding* terhadap kekuatan angkatan laut Amerika tentu akan lebih murah dibanding mendirikan dan memperkuat angkatan laut sendiri (Ross, 2009). Hal yang bertentangan dengan kondisi faktual RRC yang terlahir sebagai negara kontinental.

Sarjana realis lain juga menganggap jika kebangkitan angkatan laut RRC merupakan respon aktif mereka terhadap isu pembebasan Taiwan. Namun pada kenyataannya PLAN tidak menaruh perhatian yang besar pada kemampuan amfibi untuk menginvasi Taiwan (Y. H. Lim, 2014). Di sisi lain, konstruksi identitas negara yang sedang dibangun oleh RRC akan mempengaruhi pola perilaku mereka dalam menjalin hubungan internasional dengan negara manapun di dunia. Nohara (2017: 202)

menambahkan, jika pada prosesnya metamorfosa kekuatan kontinental menjadi *maritime power* ini akan mengubah persepsi RRC mengenai kekuasaan dan kepentingan mereka terhadap laut.

Maritime power yang telah dicapai akan ditetapkan sebagai identitas dan budaya strategis pemerintahan RRC di masa yang akan datang. Menurut Holmes & Yoshihara (2005: 24), pengembangan strategi maritim RRC sangat erat kaitannya dengan perkembangan teori *sea power* dari AT. Mahan. Teori yang telah menginspirasi ekspansi Amerika ke Asia pada tahun 1890-an itu bisa berbalik jika digunakan oleh Beijing untuk merebut hegemoni dari Amerika. Mengingat momen unipolar mereka yang tidak memberi celah kepada RRC untuk mengambil alih dukungan dari bangsa-bangsa di Asia Timur (Krauthammer, 2014).

Penerapan konsep Mahan juga sejalan dengan pengembangan perdagangan di laut yang sudah dicanangkan Beijing sejak simposium *sea lane security* pada 2004 silam. Pada praktiknya, perdagangan global akan menjamin kesejahteraan ekonomi suatu negara, dan pangkalan di luar negeri sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas tersebut. Dalam hal ini, RRC telah melakukan pergerakan dengan mendirikan pangkalan militer luar negeri pertamanya di Djibouti (Afrika). Dalam hal ekonomi, kekuatan ofensif yang dilakukan oleh RRC disokong dengan program *Belt and Road Initiative* (BRI).

Perdagangan akan menyokong peningkatan kualitas angkatan laut yang mereka miliki, di sisi lain angkatan laut akan menjamin keselamatan perdagangan di laut. Kekuatan laut yang *powerfull* bisa digunakan untuk menghancurkan angkatan laut lawan yang berusaha menghalangi mereka untuk menguasai jalur-jalur strategis yang ada di dunia. RRC memang perlu melindungi diri terhadap serangan dari laut. Ada lebih banyak kerentanan yang dimiliki oleh RRC ketika tidak melakukan klaim 'galak' di LCS. Sebagian besar perdagangan mereka dilakukan melalui pelayaran, dan negara ini sangat tergantung pada kegiatan impor bahan baku melalui laut (terutama energi, minyak, hingga gas alam cair dari Timur Tengah).

4.1.3 ASEAN dalam Manajemen Konflik

Sejak didirikan pada tahun 1967, ASEAN telah menjadi landasan kebijakan luar negeri dari negara-negara di Asia Tenggara. Organisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan selama Perang Dingin. Sebelum ASEAN terbentuk, konflik antar negara di kawasan Asia Tenggara jauh lebih banyak dan dinamis. Menciptakan kawasan yang rapuh dan tidak aman (Asia & The Pasific Policy Society, 2021). Jika mekanisme manajemen konflik terdiri dari tiga elemen, yakni *prevention*, *containment* dan *termination*; maka ASEAN telah berhasil untuk melakukan upaya pencegahan dengan efektif (Soomro, 2017).

Promosi ASEAN terhadap perdamaian dan stabilitas keamanan telah didukung oleh para pemimpinnya melalui Deklarasi Pemimpin ASEAN pada 8 Agustus 2017. Deklarasi ini menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk program pemeliharaan dan promosi perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional; termasuk penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional. Selain dokumen pendirian Asosiasi, Deklarasi Bangkok pada tahun 1976, serta dua dokumen lainnya (*ASEAN Concord* dan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*) juga telah ditandatangani.

Dalam penyelesaian konflik, ASEAN selalu berupaya untuk mencegah intervensi dalam urusan internal para anggotanya serta menekan tindakan-tindakan provokatif yang bisa menaikkan eskalasi di kawasan tersebut. ASEAN juga memiliki kemampuan negosiasi yang unggul melalui mekanisme ASEAN Way. Proses penolakan secara terang-terangan biasanya dihindari. Jika terjadi ketidaksepahaman, masing-masing pemimpin akan melakukan pendekatan bilateral untuk melanjutkan proses konsultasi dan konsensus.

Dalam perjalanannya, negara-negara di Asia Tenggara memang tidak selalu satu arah. Konflik internal pada kenyataannya selalu ada, terutama dalam isu sengketa batas wilayah. Tahun 2002, Indonesia dan

Malaysia pernah berseteru di Mahkamah Internasional mengenai kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Konflik Thailand-Kamboja pada tahun 2011 bahkan sempat melibatkan peristiwa baku tembak antar negara. Baru-baru ini, eskalasi juga terjadi antara pemerintah Malaysia dan milisi Sulu yang berasal dari Filipina mengenai perairan Sabah.

Dalam hal ini, konflik internal di tubuh ASEAN sudah seharusnya bisa dibendung untuk menghindari segala ancaman yang berasal dari luar. ASEAN yang bersatu tentu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada ASEAN yang terbelah. Sebagai organisasi regional di Asia Tenggara, ASEAN juga diharapkan mampu menjadi salah satu aktor kunci untuk menyelesaikan masalah keamanan maritim di kawasan Laut Cina Selatan. Hal ini didukung dengan fakta bahwa sebagian besar *claimant states* yang sedang berkontra dengan RRC adalah masyarakat ASEAN (seperti Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam).

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data primer melalui proses interview dan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada instansi, akademisi, dan pengamat yang secara structural memfokuskan dirinya kepada isu arsitektur keamanan maritim di LCS. Wawancara dilakukan secara mandalam, dan informan memiliki keleluasaan untuk menjawab atau tidak menjawab semua pertanyaan yang sudah peneliti ajukan. Hal ini disebabkan karena tidak semua informan memiliki informasi yang cukup untuk menjawab beberapa pertanyaan yang bukan bidangnya.

Hasil pengumpulan data akan diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah ditetapkan. Pada tesis ini, data sekunder akan digunakan oleh peneliti untuk mempertajam pernyataan informan di tahap analisis dan pembahasan.

4.2.1 Arsitektur Keamanan Maritim untuk Mengurangi Potensi Konflik di Laut Cina Selatan

Menurut Tow & Taylor (2010: 95), arsitektur keamanan adalah struktur keamanan yang menyeluruh, koheren, dan komprehensif untuk area geografis tertentu. Arsitektur bisa menjadi instrumen yang layak untuk membantu negara dalam mengelola keamanan regional berdasarkan karakteristik wilayahnya. Dalam penyusunan tesis ini, pertanyaan pertama mengenai proses pembentukan arsitektur akan diuraikan berdasarkan ketiga variabel kunci yaitu *knowing the sea*, *governing the sea*, dan *policing the sea*.

a. Knowing the Sea

Variabel *knowing the sea* selalu dibentuk berdasarkan pengakuan terhadap potensi wilayah, pengetahuan mengenai ancaman, isu dan tren konflik, serta pengetahuan para aktor mengenai arsitektur keamanan ideal yang ingin dicapai. Berkaitan dengan potensi wilayah, Ade Padmo Sarwono (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh NKRI untuk ASEAN) mengatakan:

“LCS sangat berperan penting dalam SLOC dan SLOT, serta menjadi salah satu penyokong perdagangan global. Ketidakstabilan disini akan mendorong ketidakstabilan perekonomian dunia.”

Hal itu didukung oleh pernyataan Putti Ananda Hiswi, *Researcher and Coordinating Officer* Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) dengan mengatakan bahwa:

“LCS tidak hanya menyimpan sumber daya alam yang luar biasa, namun juga bisa menjadi sarana RRC untuk memperkuat pengaruh dan kekuatan mereka di Asia Pasifik. Padahal di sisi lain, *claimant states* hanya berupaya untuk melindungi *border* mereka di wilayah itu.”

Berdasarkan motifnya, Surya Wiranto (dosen Prodi Keamanan Maritim UNHAN RI) mengatakan jika:

“RRC berusaha untuk merebut potensi sumber daya alam di wilayah tersebut. Dia mengokohkan posisinya dengan program BRI dan mendirikan beberapa pangkalan militer di Kepulauan Sparty. RRC ingin menguasai wilayah kutub selatan, dia hendak memperluas pengaruhnya di kawasan. Mereka mengikat negara-negara seperti Srilangka dan Djibouti secara ekonomi (strategi *RRC Debt-Trap*) untuk mendorong kepentingan militernya di berbagai belahan dunia.”

Selain informasi mengenai potensi wilayah, arsitektur juga seyogyanya dibangun berdasarkan pengetahuan para aktor terhadap ancaman yang mengintai. Berkaitan dengan hal ini, Pengamat Intelijen dan Militer Agus Setiadji berpendapat bahwa:

“Ancaman yang mengintai LCS terdiri dari ancaman militer (fisik maupun non fisik), konflik transnasional, konflik bersenjata dan perang terbuka.”

Menurut Tenaga Ahli Fraksi Komisi I DPR RI, Galby Samhudi, peningkatan eskalasi sebenarnya akan berdampak positif pada peningkatan MSA di kawasan. Jika tensi konflik meningkat, maka kepentingan akan krisis itu juga akan meningkat dan semua negara akan menaruh perhatian mereka untuk mencari solusi yang terbaik. Staf Ahli Bidang hukum Laut KEMENKOMARVES RI, Okto Irianto mengatakan jika:

“Ancaman di perairan LCS muncul ketika RRC bukan hanya mengklaim wilayah historis, tapi juga memfaktualkan klaim tersebut dengan membangun berbagai infrastruktur militer yang mereka butuhkan disana.”

Isu dan tren konflik menjadi lebih dinamis ketika beberapa pihak eksternal muncul dan berperan aktif meramalkan konflik. Keberadaan

Amerika sebagai *balancing of power*, dan para sekutunya di NATO, QUAD, dan AUKUS telah menarik perhatian RRC. Amerika selalu berusaha untuk tampil dan menjadi *superhero* bagi negara-negara kecil yang ada di kawasan. Menawarkan bantuan kepada para *claimant states*, menunjukkan hegemoni dan kekuasaan (yang menurut mereka) tidak sebanding dengan yang dimiliki oleh RRC. Dalam hal ini, Galby mengatakan jika potensi Amerika untuk mendekati negara-negara yang di kawasan ini lebih kecil dibandingkan potensi RRC. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan kultur dan pengaruh RRC yang lebih kompetitif di kawasan ini.

Okto Irianto menambahkan jika isu konflik di LCS juga akan dipengaruhi oleh keadaan dalam negeri RRC dan Amerika. Jika RRC tidak sejahtera dan memiliki masalah internal, mereka tentu tidak akan berani untuk melakukan klaim dan sengketa dengan negara lain, begitu pun dengan Amerika. Namun melihat perkembangannya, RRC dan Amerika sebenarnya tengah melindungi dua kepentingan nasional yang berbeda, masing-masing memiliki alasan tersendiri. Dalam hal ini, Abdul Rivai Ras (dosen SKSG UI) mengatakan jika:

“Kepentingan yang sedang dilindung oleh RRC dan Amerika tidak bisa dibandingkan secara *apple to apple*. Amerika sepertinya tengah berusaha untuk merebut pengaruh mereka di kawasan ini, serta melindungi SLOC/SLOT yang mereka punya. Sedangkan RRC hanya sedang berusaha untuk melindungi wilayah yang sudah mereka klaim, tentu beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya.”

Keterlibatan Amerika yang dominan tentu akan menguntungkan RRC yang selama ini selalu bermain peran sebagai korban (*playing victim*). Di sisi lain, mereka akan lebih terdorong untuk melakukan pembangunan instalasi militer pada fitur-fitur lain di LCS. Dari perspektif ASEAN, Ade Padmo Sarwono menuturkan jika:

“Keberadaan aktor lain seperti QUAD dan AUKUS tentu meningkatkan eskalasi, namun ASEAN tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pernyataan kolektif. Meskipun begitu, kita senantiasa mengingatkan para anggota bahwa netralitas itu penting. ASEAN juga berusaha untuk mengingatkan negara-negara yang terkait seperti Australia dan Amerika untuk menurunkan tindakan provokatif.”

Penambahan aktor dalam sengketa hanya akan menurunkan tingkat kepercayaan dan memperlambat kerjasama serta penyelesaian konflik. Eskalasi bisa naik secara tiba-tiba, maka dari itu beberapa informan mengusulkan jika status quo harus dihentikan dan resolusi yang final harus diupayakan dengan maksimal. Hal ini semata-mata dilakukan untuk mendukung pembentukan arsitektur keamanan maritim yang ideal.

Menurut keterangan dari Fungsional Diplomat Muda Direktorat Kerjasama ASEAN KEMLU RI, Fefen Zamzani:

“Pada tahap ideal, selama negosiasi masih dilakukan setiap aktor yang terlibat sudah seharusnya berusaha untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Mereka harus menjaga *status quo* dan mentaati aturan yang disepakati.”

Menurut Surya Wiranto, RRC sebenarnya memiliki *knowing the sea* yang bagus namun tidak menerapkannya di dalam kasus ini. Padahal dalam situasi ideal, *knowing the sea* sudah seharusnya disokong dengan kegiatan implementasi yang bagus untuk membentuk arsitektur keamanan maritim yang ajeg.

Pada variabel *knowing the sea*, peneliti juga akan memfokuskan dirinya pada pengembangan MDA Regional yang bisa diupayakan oleh negara-negara di Asia Tenggara untuk memahami konflik LCS. Dalam wawancaranya, Agus Setiadji berpendapat bahwa:

“Tidak semua negara ASEAN memiliki MSA yang baik, cenderung sporadis dan tidak kerkoordinasi dengan baik. Tidak semua negara di ASEAN memiliki kontribusi untuk pengembangan MDA Regional. Meskipun begitu, Singapura, Malaysia, Indonesia dan Thailand memiliki pusat informasi yang mumpuni untuk menangkal segala macam gangguan dan ancaman maritim.”

Dalam penuturannya, Putti (ERIA) mengatakan jika semua yang terjadi di ASEAN berlangsung secara kausalitas, RRC selalu merespons setiap tindakan yang dirasa akan mengancam klaim dan pengaruh mereka. Padahal di sisi lain, kegiatan latihan gabungan, belanja militer, atau kerjasama yang dilakukan oleh negara ASEAN dengan negara lain (yang memiliki tendensi kontra dengan RRC) adalah sesuatu yang wajar. Setiap negara berhak untuk mengedepankan kepentingan nasional mereka dan ASEAN tidak berhak untuk melakukan justifikasi terhadap sikap tersebut. Di sisi lain, Surya Wiranto mengatakan bahwa:

“Upaya *information sharing* sebenarnya sudah dilakukan oleh ASEAN dalam berbagai isu, namun tidak semuanya. Pusat informasi milik Malaysia dan Singapura menjadi salah satu contoh referensi yang baik. Hasil data akan didistribusikan untuk kegiatan multilateralisme yang lain.”

Wildan menambahkan bahwa meskipun tidak semua negara ASEAN memiliki MDA yang baik, namun secara umum sebagian besar anggota ASEAN telah menaruh perhatian mereka dalam penyelesaian isu.

b. Governing the Sea

Dalam penyusunan tesis ini, variabel *governing the sea* akan difokuskan pada perspektif ASEAN dan kepemimpinannya untuk mendukung pembentukan arsitektur keamanan maritim di kawasan. Menurut Surya Wiranto, ASEAN berperan untuk menyamakan pola pikir

dan pola tindak dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan. *Researcher* ERIA berpendapat bahwa negara-negara ASEAN sudah sejak lama mengakui bahwa untuk menyelesaikan isu lintas negara, kerjasama juga harus dilakukan secara multilateral.

Wildan Faisol mengkritisi dengan mengajukan pertanyaan bahwa 'multilateralisme memang penting, namun meja multilateralisme mana yang akan digunakan?' Jawabannya bisa jadi ASEAN, PBB, Mahkamah Internasional, dsb. Agus Setiadji dalam hal ini menjelaskan jika:

"Arsitektur keamanan maritim di LCS harus menempatkan ASEAN sebagai arsitek. Dalam kondisi ideal, seluruh negara anggota ASEAN sudah seharusnya kooperatif dalam isu maritim, saling bahu-membahu untuk menjaga perdamaian di kawasan, dan secara bersama-sama berusaha untuk menyamakan persepsi ketika menghadapi suatu isu."

Menurut pejabat KEMLU, ASEAN bertugas untuk menciptakan wadah dan rajin mengadakan dialog dengan negara-negara di luar ASEAN untuk meyakinkan mereka bahwa ASEAN akan mengelola konflik dengan damai dan kondusif. Secara fisik, negara-negara di ASEAN tidak memiliki kemampuan untuk melawan negara besar seperti RRC. Namun ASEAN berusaha untuk membawa kasus ini di ranah diplomasi (*soft power*).

Solidaritas dan kebersamaan dari para pemimpin ASEAN akan sangat dibutuhkan untuk mengimbangi kekuatan RRC sebagai salah satu negara yang memiliki power yang dominan. Namun kebersamaan ini bukan tanpa hambatan, Abdul Rivai Ras mengatakan jika:

"Meskipun ASEAN sangat berperan untuk menjembatani penyelesaian konflik di LCS, namun negara-negara anggotanya tentu akan sulit untuk bersikap netral. Mereka akan terikat dengan kepentingan nasional masing-masing. Meskipun begitu, dalam kerangka ASEAN mereka masih

berkomitmen dan akan berusaha untuk mereduksi konflik dan ketegangan regional.”

Peneliti ERIA menegaskan jika tidak ada kawan dan lawan dalam kancah geopolitik global. Masing-masing negara bisa memiliki *hate-love relationship* tergantung situasi dan kondisi ketika itu. Dalam hal ini, Putti Ananda Hiswi mengatakan jika Singapura dan Filipina mungkin akan lebih mendukung US dibandingkan RRC. Vietnam lebih keras menyuarakan kepentingan nasionalnya, sedangkan Filipina sekarang justru lebih kooperatif karena presiden Duterte memiliki kepentingan dengan RRC.

Menurut Abdul Rivai Ras, sebagai *peace fasilitator*, ASEAN selalu berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep kerjasama (baik yang bersifat militer maupun yang bersifat non-militer). Keberpihakan bisa menjadi benalu untuk mencapai komitmen politik kolektif. ASEAN tidak boleh terbelah, persepsi mengenai ancaman harus disamakan. Peneliti ERIA mengatakan bahwa:

“ASEAN sedang melakukan *outward-looking to Indo Pasific*. Negara-negara di ASEAN akan menjadi pusat perhatian dan memiliki potensi yang besar untuk didekati oleh mereka yang tidak senang dengan keberadaan AUKUS, hegemoni RRC, keterlibatan NATO, dll.”

Anggota ASEAN sudah seharusnya mengedepankan stabilitas keamanan dibandingkan kepentingan materil sesaat, namun perilaku negara sudah tidak bisa dikomando seperti itu. Agus Setiadji dalam hal ini menganggap bahwa dari 10 negara yang ada di ASEAN, yang cenderung berpihak kepada USA adalah Singapura dan Filipina, sedangkan yang memiliki tendensi positif terhadap China antara lain Laos, Kamboja, dan Myanmar. Negara yang netral diantaranya adalah Vietnam, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Brunei.

Meskipun begitu, keberpihakan tetap akan bergerak dinamis sesuai dengan kepentingan nasional dari negara masing-masing. Wildan Faisol menambahkan jika:

“Filipina memiliki kedekatan dengan US, sedangkan Kamboja memiliki hubungan yang erat dengan RRC. Komitmen politik masih berpegang teguh pada kesamaan persepsi untuk menjaga perdamaian dan dtabilitas regional. Kecondongan negara itu sudah pasti ada, bahkan Indonesia sendiri akan senantiasa dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya.”

Menurut Staf Ahli Bidang hukum Laut KEMENKOMARVES, ASEAN biasanya memiliki sikap secara kolegial, namun perbedaan kepentingan membuat ASEAN kesulitan untuk menyamakan semua persepsi.

Ketika berbicara mengenai kasus ini, kita tidak serta merta memandang UNCLOS sebagai penyelesaian yang utama. Untungnya ASEAN memiliki mekanisme ASEAN Way, jadi setiap konsensus yang tidak bisa dicapai, masih bisa diupayakan melalui proses konsolidasi bilateral sebelum dikembalikan kepada ketua forum. Fefen Zamzani menegaskan bahwa:

“ASEAN memiliki AMF untuk para anggotanya, serta AMF+ untuk negara-negara yang ada di luar ASEAN. ASEAN juga memiliki mekanisme ASEAN+RRC yang banyak membahas mengenai *review situation* di Laut Cina Selatan. Dalam hal ini, semua anggota ASEAN bisa menyampaikan unek-unek mereka di forum tersebut, dan ASEAN juga tidak memaksa jika ada negara yang tidak mau memanfaatkannya.”

Selain itu, Agus Setiadji menambahkan jika:

“Forum maritim yang diciptakan oleh ASEAN bertujuan untuk memperkecil kesenjangan yang mencolok diantara para aktor.

Negara yang kuat sebagai aggressor utama akan diimbangi oleh kekuatan kolektif dari semua anggota ASEAN.”

Putti Ananda Hiswi, peneliti dari ERIA menambahkan bahwa ASEAN memiliki banyak mekanisme untuk membahas isu LCS. Dalam forum umum, ada *ASEAN Summit*, *ASEAN Ministerial Meeting (AMM)*, *Senior Officials Meeting (SOM)*. Untuk forum khusus yang membahas isu keamanan *ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM)*.

Ketika suatu isu sudah dianggap *urgent*, maka ASEAN akan mengadakan platform baru seperti *ASEAN Declaration on the South China Sea* dan lain sebagainya. Platform inilah yang nantinya akan membuat *norm and treaties* yang akan dipatuhi oleh semua pihak. Sebenarnya jika produk regional ini berhasil terbentuk, semua persoalan sudah seharusnya bisa terselesaikan. Setiap *meeting*, ASEAN selalu mencatat produk apa saja yang sudah dihasilkan dari pertemuan itu lalu mengevaluasinya pada pertemuan selanjutnya.

Wildan Faisol menganggap bahwa forum tersebut berguna untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan diantara para anggota ASEAN. Pada tingkat MENLU, tahun 2016 negara-negara di ASEAN sepakat bahwa dalam kondisi *emergency*, *contact point* bisa digunakan untuk mencari informasi, bertukar informasi, menyampaikan koordinasi, melakukan klarifikasi, atau mencari bantuan.

c. Policing the Sea

Gerakan solidaritas masyarakat ASEAN harus berangkat pada persamaan persepsi mengenai urgensi perdamaian dan keamanan. Menurut Agus Setiadji, proses penegakkan hukum harus dilandasi oleh kepatuhan terhadap aturan dan hukum internasional, bila ada negara yang tidak mengakui aturan internasional, maka proses penegakkan hukum juga akan sulit untuk dijalankan di LCS. Hal ini senada dengan

pembahasan Okto Irianto, staf ahli hukum laut dari KEMENKOMARVES RI yang mengatakan bahwa:

“Jika perencanaan hukum yang baru akan sulit dilakukan, daripada membuat hukum tandingan untuk UNCLOS, lebih baik membuat sesuatu yang memang sudah dilahirkan dari aturan UNCLOS sendiri. UNCLOS memiliki rambu-rambu yang jelas mengenai perbatasan maritim. RRC bahkan sudah meratifikasinya.”

Upaya penegakan hukum harus dirancang berdasarkan kepentingan kolektif. Sejauh ini, upaya penegakan hukum yang diupayakan oleh ASEAN adalah dengan pembentukan DOC dan produk turunannya (COC). Menurut Ade Padmo Sarwono, ASEAN sudah berusaha untuk mengajak RRC untuk duduk bersama dengan menyusun DOC di daerah konflik. Perlu waktu 10 tahun untuk RRC menyetujui gagasan tersebut, hingga tahun 2002 DOC terbentuk. Di sisi lain, Fefen Zamzari mengamini dengan mengatakan bahwa:

“DOC sudah ditanda tangani sejak 4 November 2002, tapi sebenarnya negosiasi DOC baru terlaksana sekitar tahun 2017. Tahun 2013, ASEAN dan RRC baru sepakat untuk mengadakan agenda konsultasi (bukan negosiasi). Dalam kegiatan itu, mereka berusaha untuk membuat *framework*-nya. Kerangka tersebut selesai tahun 2017, dan baru diisi sejak tahun 2018. Setelah itu baru dinegosiasikan. Pada tahun 2019, mereka baru dilaksanakan first reading. Negosiasi lalu terhambat karena pandemi terjadi.”

Menurut Fefen Zamzani, setelah tribunal (tepatnya setahun setelah PCA), RRC buru-buru mendorong adanya COC. RRC jugalah yang berinisiatif untuk menyelesaikan COC di tahun 2021. Pergeseran sikap ini menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap intervensi dari negara-

negara di luar kawasan (seperti USA). Susaningtyas Nefo Kertopati, pengamat militer dan intelijen dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“COC akan mendorong masing-masing Angkatan Laut untuk menerapkan mekanisme pencegahan konflik. Mekanisme COC ini sangat penting untuk meredam eskalasi konflik untuk tidak meningkat menjadi perang.”

Mengenai daya ikat, Putti (ERIA) mengatakan jika ASEAN tidak bertugas untuk menghukum orang atau negara, sehingga proses penegakan hukum akan sangat sulit tercapai jika negara-negara yang ada di sekitarnya tidak memiliki pandangan yang sama mengenai LCS. RRC bahkan tidak mematuhi UNCLOS dan PCA. Surya Wiranto mengamini dengan mengatakan bahwa:

“COC akan sulit terwujud, apalagi jika memiliki daya ikat hukum. RRC pasti akan merasa khawatir, apalagi dasar klaim mereka memang lemah hukum.”

Agus Setiadji di lain kesempatan mengkritiki hal yang sama dengan mengatakan bahwa:

“COC bisa lebih mengikat ASEAN dan RRC secara hukum namun perlu perbaikan pada beberapa pasal tertentu.”

Menurut Okto, permasalahan memang biasanya muncul ketika UNCLOS ditafsirkan secara berbeda oleh negara-negara di dunia. Hal inilah yang kemudian menimbulkan sengketa di domain maritim. Duta besar LBBP mengatakan bahwa:

“Untuk membuat COC yang efektif tentu tidak gampang, jadi butuh proses perundingan yang terkesan berlarut-larut. ASEAN tidak mematok kapan COC harus selesai, semua sudah berjalan sesuai prosedur dan situasi saat ini.”

Sedangkan di sisi lain, Fefen Zamzani menjelaskan bahwa:

“Selain COC, DOC juga membahas mengenai kerjasama research, kerjasama di LCS, dan aspek-aspek lainnya. COC memang aturan hukum, namun keberadaannya tidak boleh lebih dominan dari UNCLOS.”

Menurut direktur Kebijakan dan Strategi BAKAMLA, resolusi konflik lainnya yang bisa dilakukan di LCS adalah dengan mengupayakan *Confidence and Trust Building* diantara semua aktor yang terlibat. Pada akhirnya, arbitrase juga tidak memiliki power lebih karena tidak bersifat untuk memutuskan dan menghukum. Selain itu, kita bisa mengupayakan resolusi melalui diplomasi, *conflict management*, dsb.

4.2.2 Peran Indonesia sebagai *Regional Leader* untuk Mendukung Pembentukan Arsitektur Keamanan Maritim di LCS

Selama ini, Indonesia selalu mengandalkan diplomasi maritim untuk meredakan ketegangan dan eskalasi konflik di kawasan. Hal tersebut dijabarkan oleh Direktorat Strategi dan Kebijakan BAKAMLA Republik Indonesia yang mengatakan bahwa:

“Indonesia masih memegang teguh politik bebas aktif, dengan tetap mengupayakan proses resolusi konflik seperti penyusunan DOC dan COC. Indonesia tidak boleh memandang LCS sebagai salah satu mandala baru, jika justru harus menghindari situasi itu.”

Dalam kerangka ASEAN, Indonesia berusaha untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dengan komitmen politik yang netral. Tujuan utamanya adalah untuk memelihara perdamaian di kawasan. Menurut Surya Wiranto, dosen Prodi Keamanan Maritim UNHAN RI:

“Komitmen Indonesia dalam kerjasama keamanan maritim di kawasan sudah sangat baik, Indonesia bahkan sudah melakukan kerjasama *bilateral marsec* dengan separuh

negara ASEAN. Berbeda dengan Filipina yang setelah putusan PCA malah berbelok dan bergerak di sekitar RRC, Indonesia masih teguh menjaga netralitasnya.”

Jika dipetakan, klaim Indonesia di LCS sebenarnya masih belum selesai. Selain RRC, Indonesia masih harus berunding dengan Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Selain urusan ZEEI, kita masih memiliki beberapa sengketa dalam klaim landas kontinen. Secara natural, untuk mendukung pembentukan arsitektur keamanan maritim di LCS, Indonesia sudah memiliki potensi dan kapasitas untuk menjadi *regional leader* di kawasan. Indonesia secara aktif selalu menginisiasi dan mengikuti berbagai diplomasi mengenai LCS.

Menurut Tenaga Ahli Fraksi Komisi I DPR RI, Galby Samhudi, salah satu kekuatan Indonesia terletak di *shuttle diplomacy*. Ia menjelaskan jika:

“Pada tahun 2016, Kamboja menolak pembahasan tentang LCS hingga ASEAN mengalami *deadlock*, ketika itu Indonesia langsung bertindak cepat dan mengadakan *shuttle diplomacy* sehingga *joint statement* bisa dikeluarkan lebih cepat.”

Meskipun RRC memiliki peluang yang lebih besar untuk mempengaruhi banyak negara di ASEAN, namun Indonesia berhasil meyakinkan negara lain untuk melanjutkan dialog mengenai LCS. Hal ini merupakan salah satu bukti mengenai kesiapan Indonesia sebagai *regional leader* di kawasan ini.

Menurut Fefen Zamzari (diplomat KEMLU RI), Indonesia selalu berusaha untuk mencari cara untuk menegakkan hukum Internasional di LCS. Di sisi lain, Galby menuturkan jika:

“Selain mencari resolusi konflik yang sesuai, Indonesia bisa mengusung *conflict management* berdasarkan tingkat

eskalasi. Hal ini disebabkan oleh kondisi LCS yang dinamis, sehingga sulit untuk menemukan titik terang.”

Sejauh ini, belum ada skenario jangka panjang yang disetor presiden ke lembaga legislatif. Belum ada *worst scenario* yang diajukan ke DPR, sehingga menurut Galby dalam situasi kritis pemerintah mungkin akan menurunkan KOMCAD (Komponen Cadangan) di garda terdepan.

Wildan Faisol mengatakan bahwa Indonesia memiliki kapabilitas yang besar untuk menjadi *regional leader* di ASEAN. Dosen Universitas Al-Azhar itu mengatakan bahwa:

“Indonesia bahkan menjadi negara ASEAN satu-satunya yang masuk G20. Kita pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Secara historis, rekam jejak Indonesia dalam kasus LCS juga bagus. Indonesia telah menginisiasi dan menyukseskan penyusunan dokumen DOC, COC, AOIP, dll.”

Pengamat militer dan intelijen, Agus Setiadji berpendapat bahwa Indonesia melalui Menlu dan beberapa Menteri terkait telah mencoba untuk melakukan komunikasi dan koordinasi melalui berbagai forum serta melayangkan protes diplomasi yang berkaitan dengan pelanggaran di kawasan LCS. Meskipun begitu, menurutnya:

“Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kekuatan pertahanan terutama aspek maritim sebagai *balancing power*. Indonesia perlu meningkatkan operasi dan kerjasama bilateral dengan negara-negara sahabat. Sesuai dengan ketentuan UNCLOS, Laut Natuna Utara (yang ikut diklaim RRC) harus dieksplorasi dengan melibatkan nelayan dan perusahaan perikanan lainnya.”

Untuk menjadi *regional leader* dan mendukung proses pembentukan arsitektur keamanan maritim di LCS, Indonesia tentu harus dibekali dengan MDA dan tata kelola maritim yang baik. Namun dalam

praktiknya, ada beberapa kekuatan yang memiliki dua mata pisau. Bisa menghambat atau memperlancar pergerakan Indonesia (tergantung pada pengelolaannya di lapangan).

1) MDA Indonesia

Menurut Surya Wiranto, Indonesia belum sepenuhnya memiliki MDA yang baik. Kita belum memiliki pusat informasi maritim yang bisa diandalkan oleh negara-negara yang ada di kawasan. Singapura dianggap lebih baik dalam hal ini. Tenaga Ahli Fraksi Komisi I DPR RI, Galby Samhudi mengatakan bahwa:

“Pemerintah Indonesia harus memiliki rencana terburuk dan skenario terbaik di berbagai institusi. Memiliki *mapping* yang jelas, dan bukan hanya *based on daily crisis* yang terjadi seperti saat ini.”

Indonesia masih sangat fokus ke masalah kontinental. BAKAMLA adalah garda terdepan yang paling cocok untuk menangani isu LCS secara non-militeristik. Namun orang Indonesia biasanya episodik, kesadaran selalu muncul ketika masalah yang lebih besar muncul dan menjadi tragedi. Contohnya kasus tenggelamnya kapal selam di perairan Bali pada tahun 2020 lalu. Jangan sampai, kasus Natuna juga akan naik ke permukaan setelah munculnya efek destruktif yang lebih parah muncul.

2) Politik Luar Negeri

Politik luar negeri Indonesia sudah berjalan dengan optimal karena Indonesia selalu berusaha untuk menjadi anggota yang vocal untuk menyuarakan keamanan dan perdamaian. Indonesia telah dianggap sebagai salah satu *big brother* yang paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara.

3) Sinergi Lembaga

Menurut BAKAMLA, urusan keamanan maritim sudah seharusnya komprehensif, tidak boleh ada tumpang tindih tupoksi antar instansi. Semua instansi sudah setuju bahkan BAKAMLA adalah lembaga yang paling berhak untuk menjaga keamanan laut di Indonesia. Namun saat semuanya dicurahkan dalam peraturan formal, beberapa lembaga merasa ketakutan jika otoritas mereka akan diambil oleh BAKAMLA.

Ketika otoritas diambil, maka pembiayaan tentu akan berkurang. Sebenarnya sebanyak apapun lembaga yang kita punya, tidak akan menjadi masalah jika kita bisa mengaturnya dengan baik. Legal basic jelas, aparat mengerti, dan ada intervensi dari pemimpin tertinggi negara untuk merapikannya.

4) Strategi Keamanan Maritim

Dalam segi pertahanan, Indonesia masih mengandalkan perang total. Padahal untuk negara kepulauan seperti Indonesia, kita sudah seharusnya meningkatkan kemampuan kekuatan udara dan kekuatan laut kita terlebih dahulu sehingga efek destruktif tidak terlalu besar. Alutsista udara dan laut sudah seharusnya menerima alokasi dana yang lebih besar daripada alutsista darat. Untuk kekuatan personel, sayang disayangkan karena KOMCAD yang pertama kali dibentuk malah dialokasikan untuk matra darat padahal 2/3 wilayah kita adalah laut. Kepentingan nasional kita sudah seharusnya dialihkan ke laut.

Agus Setiadji mengatakan jika strategi nasional Indonesia masih belum pakem dan sering berubah-ubah. Tujuannya (ends) adalah keamanan maritim diseluruh wilayah NKRI, dengan (ways) berupa langkah memperkuat TNI terutama organisasi TNI AL serta memperkuat alutsista maritim, means atau sarananya adalah dengan memperkuat PMD yang tidak hanya sebatas retorika,

dukungan anggaran pertahanan dan memperbaiki doktrin militer sesuai dengan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Strategi SPLN masih belum maksimal, perlu lebih ditingkatkan lagi.

Berbeda pendapat, Surya Wiranto justru mengatakan jika Indonesia sudah memiliki policy yang jelas (UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang BAKAMLA, diturunkan kembali dalam bentuk rencana aksi yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga). Strategi maritim juga biasanya akan dijalankan semua K/L sesuai dengan policy yang sudah disusun.

Tidak seperti di luar negeri, Galby Samhudi dari DPR menyarankan bahwa untuk saat ini, Indonesia belum mampu memiliki dan mengelola DKN. WANTANNAS yang sudah lama berdiri saja tidak memberikan efek yang berarti untuk pemerintah. WANTANNAS bahkan menjadi salah satu lembaga dengan APBN paling kecil di pemerintahan, padahal dipimpin oleh presiden dan beranggotakan para menteri.

5) Kekuatan Hukum

Menyangkut prospek ke depan aturan hukum dan UU mengenai pertahanan dan keamanan maritim, Okto Irianto (staf ahli hukum laut dari KEMENKOMARVES) mengatakan bahwa:

“Jika kita berencana membuat UU, semua permasalahan harus terjawab dengan keberadaan UU tersebut. Jangan sampai UU itu justru meriliskan berbagai pertanyaan baru yang lebih kompleks.”

Menurutnya tidak ada masalah dalam legislasi keamanan dan pertahanan maritim saat ini. Proses pembuatan UU baru akan memakan waktu dan biaya, padahal sebenarnya pasal-pasal tersebut mungkin sudah dibahas di dalam UU lain. Untuk apa membuat instrumen hukum yang baru jika masih bisa menggunakan hukum-hukum yang sudah ada.

Di sisi lain, mayoritas informan justru mendesak pemerintah untuk memiliki UU yang secara khusus membahas KAMLA. Menurut Galby Samhudi, tenaga ahli di DPR:

“Di Indonesia, fungsi TNI, POLRI, dan BAKAMLA harus diperjelas sehingga RUU KAMNAS tentu bisa terbentuk. Penyelesaian RUU KAMNAS akan selesai di tangan pemimpin yang tidak oportunistik dan memiliki political will yang lebih idealis.”

Selain political will, kita tentu harus memiliki practice will yang cukup untuk mendorong efektivitas instrumen hukum yang jelas dan juga tegas.

Menurut Agus Setiadji, aturan hukum dan pertahanan keamanan juga harus mengacu kepada kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan, kurangi bias atau tumpang tindih aturan yang berkaitan dengan keamanan laut. Prospek ke depan masih sangat memungkinkan untuk meningkatkan peran dan kontribusi bidang maritim selama pemimpin nasional dan para stake holder mampu mengembangkan nilai tambah di bidang maritim.

6) Keberlangsungan PMD

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Pemerintah RI untuk ASEAN mengungkapkan bahwa:

“Untuk menghadapi worst scenario kapabilitas keamanan dan pertahanan laut tentu harus ditingkatkan, bersamaan dengan Poros Maritim Dunia yang sudah seharusnya dipedomani dalam jangka panjang.”

Menurut BAKAMLA, PMD adalah angin segar agar Indonesia tidak lagi fokus ke urusan kontinental. PMD sudah berhasil mendorong Indonesia untuk menyelesaikan perundingan batas maritim dengan beberapa negara tetangga, pembangunan tol laut, TSS, dll. Meskipun lambat dan tidak terlalu terlihat lagi

perkembangannya, kita berharap PMD bisa membuat laut memberikan *multiplier effect* terhadap kemajuan NKRI.

7) BAKAMLA sebagai Indonesian Coast Guard

Surya Wiranto mengatakan bahwa Indonesia sudah memiliki pengetahuan yang bagus mengenai instrumen hukum internasional yang berlaku. BAKAMLA sudah berdiri berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pembuatan UU tersebut cukup tergesa-gesa. Awalnya BAKAMLA berdiri berdasarkan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Setelah UU No. 32 muncul, lalu diselipkan kesana. Hanya UU No. 32 tidak menjelaskan peran BAKAMLA sebagai penyidik (seperti memberhentikan dan memeriksa kapal).

UU KAMLA yang akan dibentuk harus menyempurnakan UU 32 dan menjelaskan dengan lebih detail mengenai fungsi penyidikan di BAKAMLA. Menurut Galby Samhudi, BAKAMLA juga masih memiliki kesulitan dalam hal pendanaan dan alat. Matra laut sudah seharusnya lebih diperhatikan demi keberlangsungan dan kesejahteraan anak cucu kita di masa depan. Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menyebut:

“Secara internal TNI AL memang perlu mendorong Bakamla untuk lebih berperan di zone delimitasi. Sesuai hukum laut internasional, kapal-kapal Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard lebih berwenang beroperasi di zone delimitasi sementara kapal-kapal perang TNI AL beroperasi di wilayah perbatasan laut yang sudah disepakati kedua negara.”

Interoperabilitas TNI AL dan Bakamla merupakan kunci sukses diplomasi maritim Indonesia sesuai kebijakan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

4.3 Hasil Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak NVivo. NVivo digunakan dalam proses pengolahan data, termasuk triangulasi data dan triangulasi sumber. Data penelitian yang diperoleh diolah dalam NVivo dengan dibentuk kategori pengklasifikasian data untuk membantu dalam penyusunan tema dan mengeksplorasi bagaimana hubungan antar atribut atau hal-hal yang tematik dari temuan di lapangan. Koding yang dibuat berdasar pada turunan dari pertanyaan penelitian, temuan di lapangan terhadap subjek penelitian, serta data sekunder. Klasifikasi tema yang dibuat dalam proses koding NVivo mengacu pada pertanyaan penelitian serta teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, adapun klasifikasi nodes dalam NVivo mengacu pada pedoman wawancara penelitian.

Selanjutnya dilakukan pengkodean dengan menyisir seluruh transkrip hasil wawancara. Hasilnya dapat dilihat dalam kolom *sources* dan *references* seberapa sering nodes disinggung oleh informan. Setelah data diproses dengan menggunakan NVivo, terlihat bahwa tidak semua informan memiliki fokus terhadap setiap kategori yang diajukan saat proses wawancara dilakukan. Hal ini ditunjukkan dari hasil koding yang dibentuk menjadi bagan pohon yang menunjukkan informan mana saja yang menitikberatkan pandangan terhadap kategori apa dan sekaligus melakukan triangulasi data. Hasil pengolahan data dengan menggunakan NVivo menunjukkan hubungan antar pertanyaan penelitian, keterkaitan antar informan penelitian dan juga topik yang menjadi fokus penelitian.

Berdasarkan pengolahan data pada transkrip wawancara, maka *code* dan *refence* yang didapat dari hasil pengolahan Nvivo akan disajikan di dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Nodes Berdasarkan Informan

No	Nama Informan	Kode	Referensi
1.	Agus Setiadji	13	40
2.	ASEAN	9	12

No	Nama Informan	Kode	Referensi
3.	BAKAMLA RI	9	16
4.	DPR RI Komisi I	8	10
5.	ERIA	15	20
6.	KEMENKOMARVES	8	10
7.	KEMLU RI	12	20
8.	Abdul Rivai Ras	6	7
9.	Surya Wiranto	13	16
10.	Susaningtyas Kertopati	5	5
11.	Wildan Faisol	11	16

Sumber: diolah oleh peneliti

Sedangkan pengolahan data berdasarkan pertanyaan penelitian akan dilakukan menggunakan fitur Codes dan Nodes, sehingga peneliti bisa melihat seberapa sering pertanyaan itu dibahas oleh narasumber. Perhatikan tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Nodes Berdasarkan Pertanyaan

Pertanyaan Penelitian	File	Referensi
Arsitektur Keamanan Maritim – Variabel <i>Knowing the Sea</i>		
• Potensi wilayah	4	4
• Pengetahuan mengenai ancaman	8	8
• Isu dan tren konflik	9	16
• Arsitektur ideal	2	2
• MDA Regional	6	15
Arsitektur Keamanan Maritim – Variabel <i>Governing the Sea</i>		
• Pengakuan multilateralisme	5	8
• Dialog politik	7	9
• Komitmen politik	9	13
• Forum keamanan maritim	7	7
• Kandidat <i>regional leader</i>	6	7

Pertanyaan Penelitian	File	Referensi
Arsitektur Keamanan Maritim – Variabel <i>Policing the Sea</i>		
<ul style="list-style-type: none"> Operasi penegakan hukum dan resolusi konflik 	16	26
Peran Indonesia sebagai <i>regional</i> untuk mendukung pembentukan arsitektur keamanan maritim di LCS	30	58

Sumber: diolah oleh peneliti

Berikut hasil pengolahan data NVivo, terdiri dari pengolahan triangulasi data dari pertanyaan penelitian 1 dan pertanyaan penelitian 2, pengklasifikasian data dan nodes, hasil pengolahan pertanyaan penelitian 1 variabel *knowing the sea*, pertanyaan penelitian 1 variabel *governing the sea*, pertanyaan penelitian 1 variabel *policing the sea*, dan pertanyaan penelitian 2. Gambar tersebut akan ditampilkan pada halaman selanjutnya.

Arsitektur Keamanan Maritim di Wilayah LCS Guna Mengurangi Potensi Konflik.nvp - NVivo 12 Pro

File Home Import Create Explore Share
Project Map Tools
?

Zoom

Layout

Align

Add Project Items

Show Associated Items

Cases Coding

Children

Memo Links

Classification

Connector Labels

Files Coded

Relationship

See Also Links

Attribute Values

Set or Search Folder

Framework Items

Attributes

Edit

Quick Access

- Files
- Memos
- Nodes
- File Classificati
- Externals
- Codes
- Relationships
- Relationship T
- Cases
- Case Classifica
- Notes
- Memos
- Framework M
- Annotations
- See Also Links
- Search
- Maps

Search Project

Name	Codes	Referen
Agus Se	13	40
ASEAN	9	12
BAKAM	9	16
DPR RI	8	13
ERIA	15	20
KEMEN	8	10
KEMLU	12	20
Rivai Ra	6	7
Surya	13	16
Susanin	5	5
Wildan	11	16

TESIS fiks

Add Associated Items

LRS 11 Items Editable
59%

Gambar 4.3 Proses Pengisian Coding dan Reference pada NVIVO Berdasarkan Informan

Aritektur Keamanan Maritim di Wilayah LCS Guna Mengurangi Potensi Konflik.nvp - NVivo 12 Pro

Project Map Tools

File Home Import Create Explore Share

Project Map

Zoom Zoom

Layout

Align Arrange

Add Project Items

Show Associated Items

Items

Cases Coding
 Files Coded
 Children
 Relationship
 Set or Search Folder
 Memo Links
 See Also Links
 Framework Items
 Classification
 Attribute Values
 Attributes
 Connector Labels

Edit

Quick Access

- Files
- Memos
- Nodes

File Classificati

- Externals

Codes

- Nodes
- Relationships
- Relationship T

Cases

- Cases
- Case Classifica

Notes

- Memos
- Framework M
- Annotations
- See Also Links

Search

Maps

- Maps

Output

Nodes

Search Project

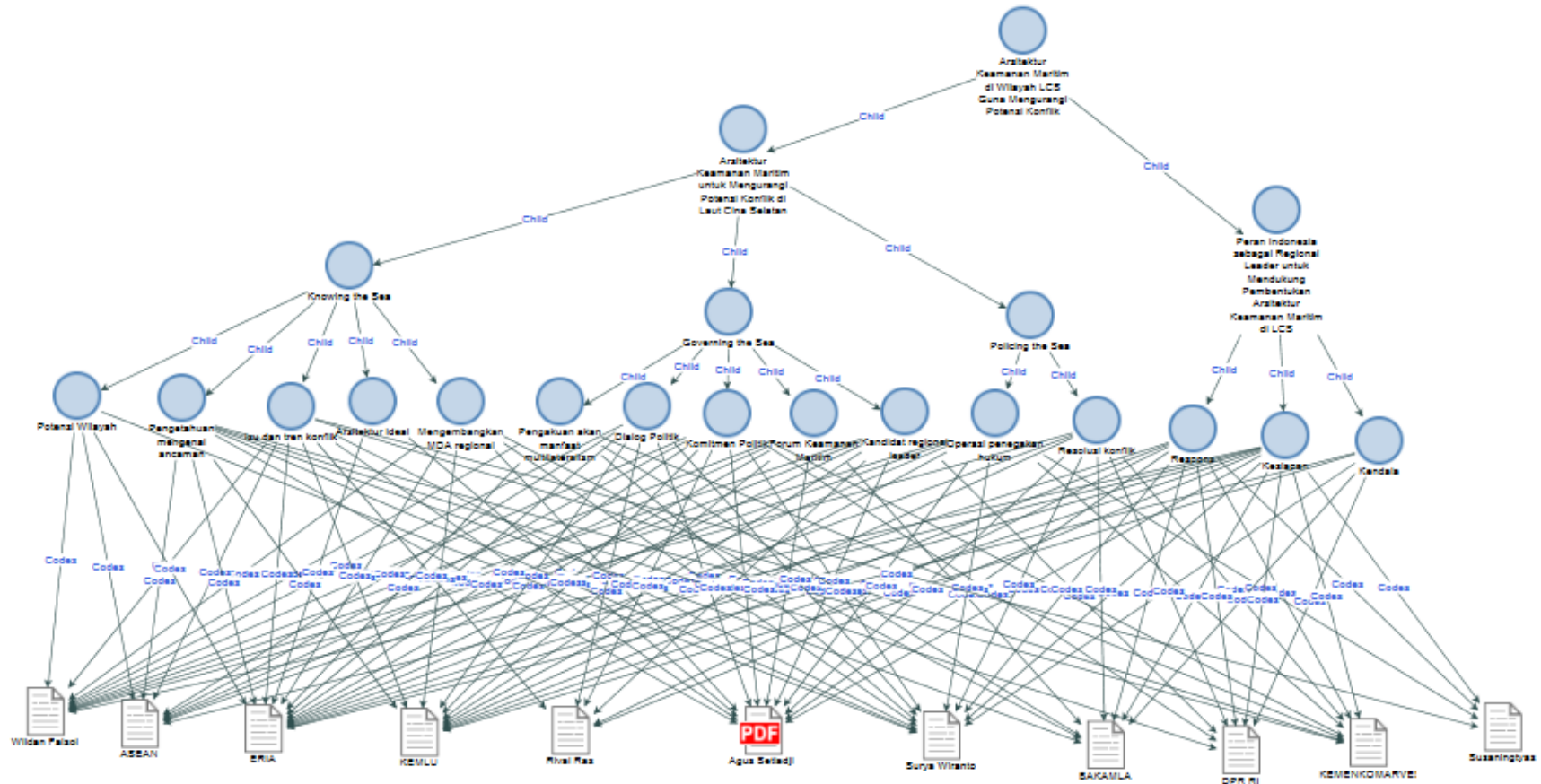
Name	Files	Referen
Aritektur Keamanan Maritim di	0	0
Peran Indonesia sebagai Reg	0	0
Kendala	5	6
Respons	9	13
Kesiapan	11	31
Aritektur Keamanan Mariti	0	0
Knowing the Sea	0	0
Aritektur ideal	2	4
Potensi Wilayah	4	4
Mengembangkan M	6	15
Pengetahuan menge	8	8
Isu dan tren konflik	9	16
Governing the Sea	0	0
Pengakuan akan man	5	8
Forum Keamanan Ma	6	7
Dialog Politik	7	9
Kandidat regional lea	7	7
Komitmen Politik	9	13
Policing the Sea	0	0
Operasi peneqakan h	8	18

TESIS fiks

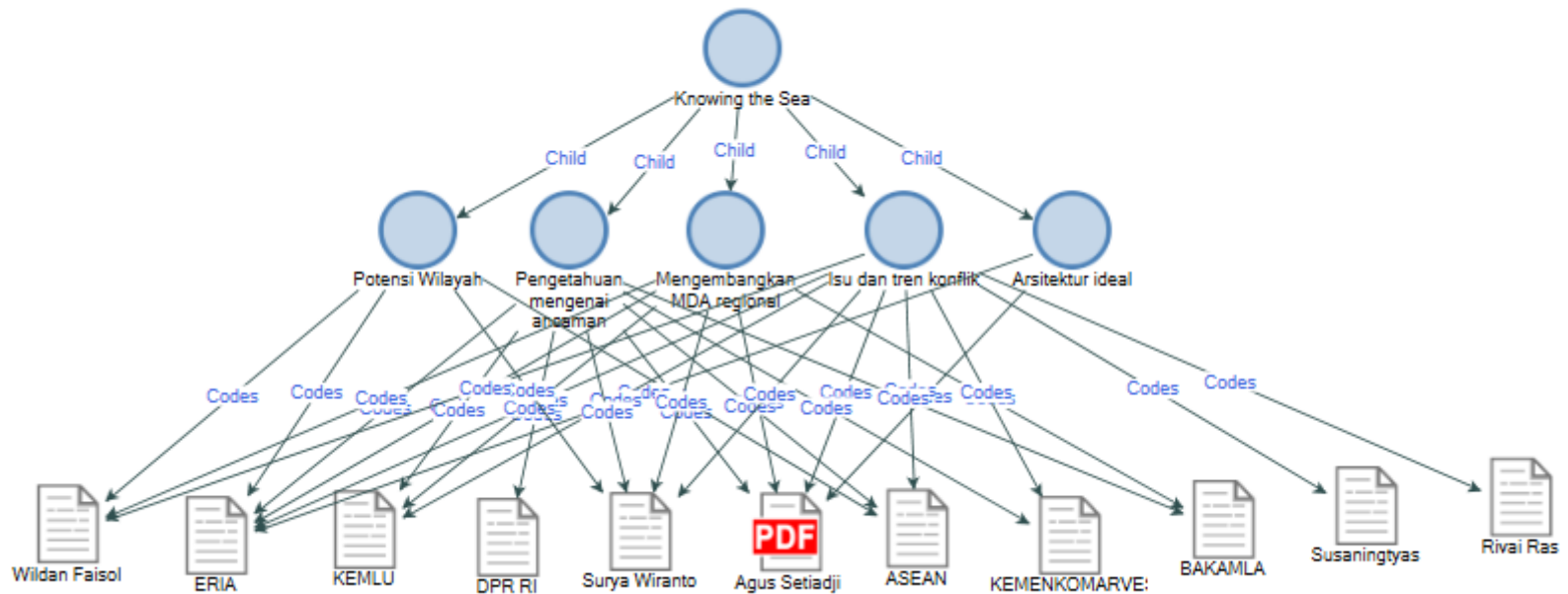
Add Associated Items

LRS 22 Items Editable 49%

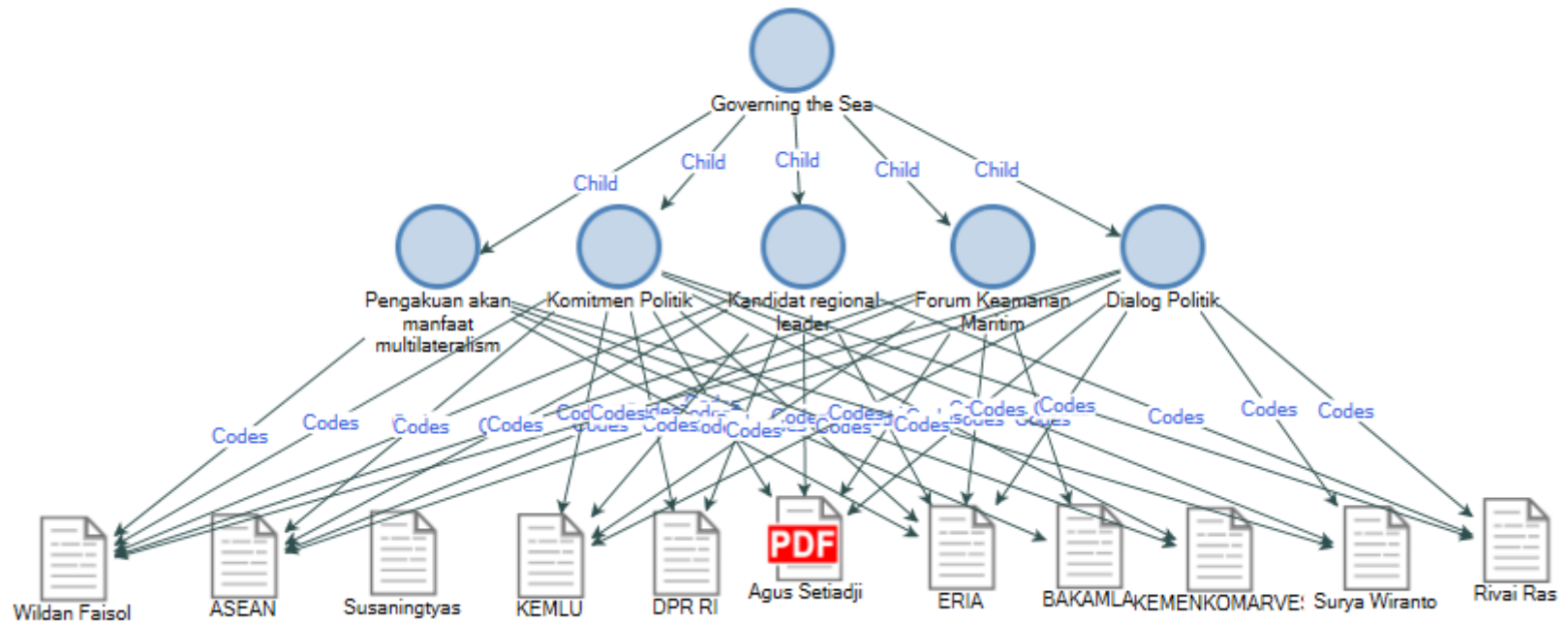
Gambar 4.4 Proses Pengisian Coding dan Reference pada NVIVO Berdasarkan Pertanyaan



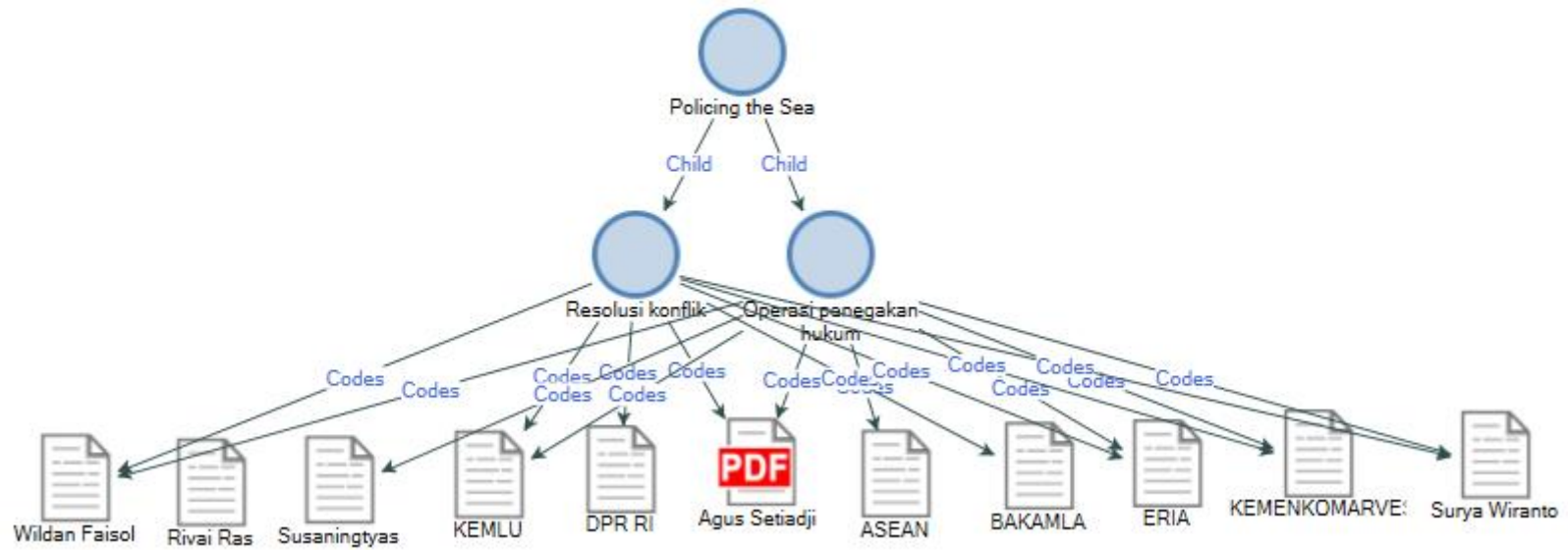
Gambar 4.5 Hasil Pengolahan NVIVO pada Pertanyaan 1 dan 2



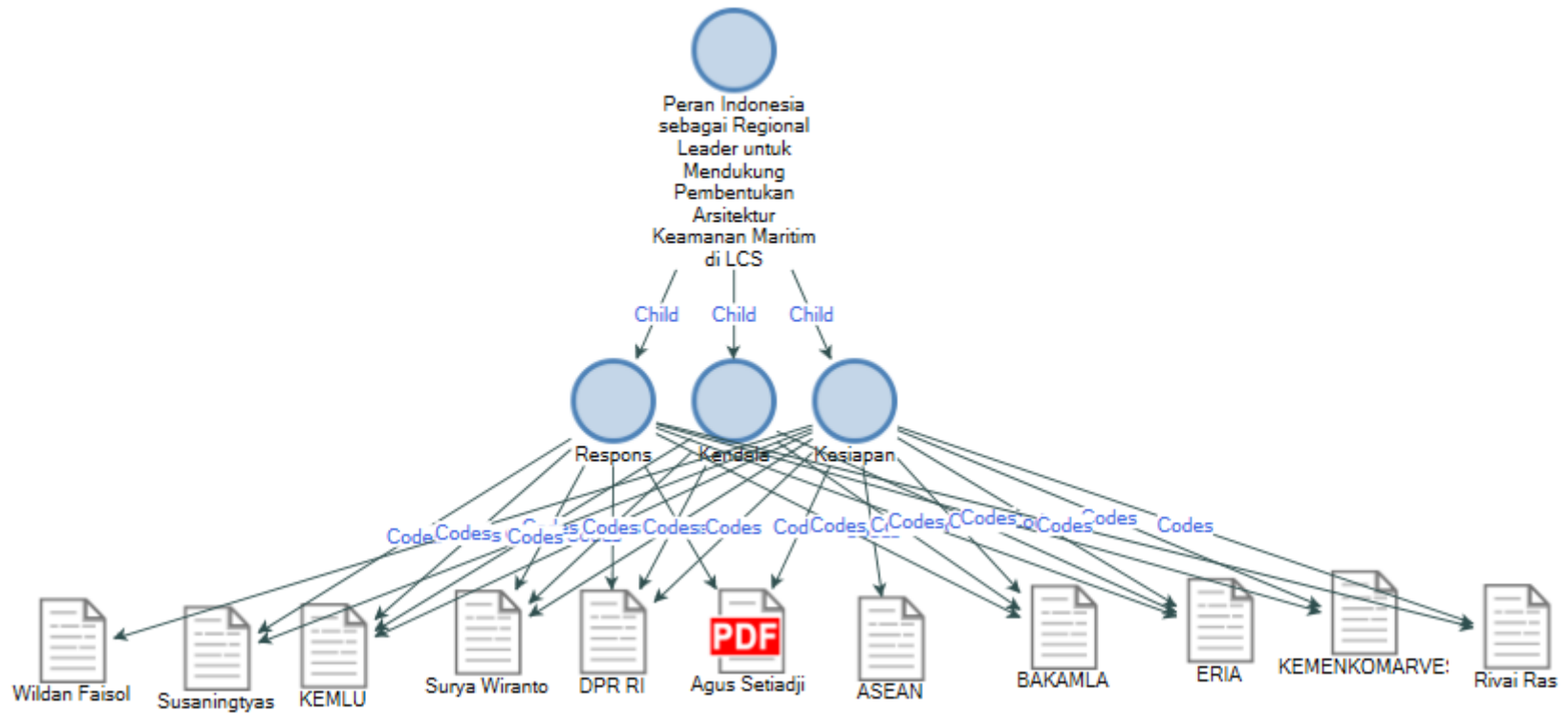
Gambar 4.6 Hasil Pengolahan NVIVO pada Pertanyaan 1 Variabel *Knowing the Sea*



Gambar 4.7 Hasil Pengolahan NVIVO pada Pertanyaan 1 Variabel *Governing the Sea*



Gambar 4.8 Hasil Pengolahan NVIVO pada Pertanyaan 1 Variabel *Policing the Sea*



Gambar 4.9 Hasil Pengolahan NVIVO pada Pertanyaan 2

Data lainnya yang harus diolah adalah mengenai penilaian *good maritime governance* di negara Indonesia. Pengujian tahap I dan II dilakukan dengan melihat referensi dari Shemella (2016: 89). Tata kelola maritim di Indonesia bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Maritime Governance Assessment: Level One

Area Fokus Maritim	Skor
<i>Maritime Domain Awareness</i>	
• Patroli	3
• Monitoring	3
• Pengumpulan dan fusi intelijen maritim	7
• Pembagian informasi lintas sector	7
Skor rata-rata: <i>Modest</i>	5
<i>Maritime Safety</i>	
• Inspeksi	7
• Hukum keselamatan maritim	7
• Peraturan keselamatan berperahu	7
• Pendidikan keselamatan maritim	7
Skor rata-rata: <i>Moderat</i>	7
<i>Traditional Maritime Security</i>	
• Persiapan dan pelatihan militer	8
• Nomor/tipe/kondisi asset taktis	8
• Interoperabilitas dengan lembaga mitra maritim	5
• Koordinasi dengan negara tetangga/forum maritim global.	9
Skor rata-rata: <i>Moderat</i>	7,5
<i>Enforcement of Custom and Maritime Law</i>	
• Hukum dan peraturan maritim nasional	9
• Asset dan peralatan taktis	8
• Latihan penegakan hukum	7
• Kemampuan larangan	8
• Tingkat penyitaan	7
Skor rata-rata: <i>Moderat</i>	7,6
<i>Protection of Natural Resources (ZEE Enforcement)</i>	
• Pelatihan terkait perikanan	7
• Penyusunan dan penegakan hukum perlindungan sumber daya	8
• Aset dan petugas penegakan hukum perikanan	8

Area Fokus Maritim	Skor
<ul style="list-style-type: none"> • Perjanjian internasional 	8
<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam perjanjian dan forum internasional 	9
Skor rata-rata: <i>Moderat</i>	8
<i>Maritime Search and Rescue</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan pencarian dan penyelamatan 	8
<ul style="list-style-type: none"> • Aset, pelatihan, dan komunikasi SAR 	8
<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam perjanjian dan forum internasional 	8
Skor rata-rata: <i>Moderat</i>	8
<i>Disaster Response</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan bencana lingkungan 	7
<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan latihan tanggap 	8
<ul style="list-style-type: none"> • Pra-pementasan peralatan tanggap 	6
<ul style="list-style-type: none"> • Mitigasi 	8
<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi antarlembaga internasional 	7
Skor rata-rata: <i>Moderat</i>	7,2
<i>Port Operations and Security</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas lembaga otoritas pelabuhan 	8
<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan/kondisi fasilitas 	8
<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi dalam perjanjian/perjanjian internasional dan forum 	8
Skor rata-rata: <i>Moderat</i>	8

Tabel 4.3 Maritime Governance Assessment: Level Two

Fungsi dan Sub-fungsi	Skor
<i>Maritime Governance</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Misi maritim 	7
<ul style="list-style-type: none"> ○ Organisasi Badan Maritim 	7
<ul style="list-style-type: none"> ○ Hukum dan kebijakan maritim 	8
<ul style="list-style-type: none"> ○ Dukungan diplomatik dan luar negeri 	9
<ul style="list-style-type: none"> ○ Program maritim 	7
<ul style="list-style-type: none"> ○ Profesional maritim 	7
<ul style="list-style-type: none"> ○ Penjangkauan badan maritim dan koordinasi pemangku kepentingan 	7
<ul style="list-style-type: none"> ○ Akuntabilitas dan pengawasan 	8

Fungsi dan Sub-fungsi	Skor
Skor rata-rata: <i>Moderat</i>	7,5
<i>Maritime Civil and Criminal Authority</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Penegakan hukum perdata dan pidana ○ Pengelolaan perbatasan terpadu ○ Dukungan sektor peradilan ○ Keamanan pelabuhan ○ Keamanan kapal ○ Keamanan rantai pasokan ○ Penegakan lingkungan maritim 	<p>7</p> <p>8</p> <p>3</p> <p>9</p> <p>9</p> <p>8</p> <p>8</p>
Skor rata-rata: <i>Moderat</i>	7,42
<i>Maritime Defence</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Administrasi pertahanan laut ○ Pasukan pertahanan maritim ○ Kesadaran situasi maritim dan kesadaran dan pengawasan domain maritim 	<p>8</p> <p>9</p> <p>7</p>
Skor rata-rata: <i>Moderat</i>	8
<i>Maritime Safety</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Administrasi keselamatan laut ○ Kontrol status bendera ○ Penangkapan ikan dan keselamatan kapal kecil dan manajemen operasi ○ Manajemen keselamatan laut ○ Administrasi perizinan pelaut ○ Bantuan untuk infrastruktur navigasi, peralatan, dan pemeliharaan 	<p>8</p> <p>9</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>7</p>
Skor rata-rata: <i>Moderat</i>	7,6
<i>Maritime Response and Recovery</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Administrasi tanggap darurat ○ Manajemen insiden ○ SAR Api dan Lingkungan ○ Bantuan pertahanan maritim untuk otoritas sipil ○ Investigasi dan analisis setelah tindakan 	<p>7</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>8</p> <p>7</p>

Fungsi dan Sub-fungsi	Skor
Skor rata-rata: <i>Moderat</i>	7,6
<i>Maritime Economy</i>	
○ Pengaturan dan pengelolaan kegiatan ekonomi	8
○ Pelabuhan komersial	8
○ Transportasi	8
○ Kondisi pasar	8
Skor rata-rata: <i>Moderat</i>	8

4.4 Hasil Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga aktivitas menurut Miles, Huberman, & Saldana (2014). Aktivitasnya meliputi tahap kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Tahap kondensasi penulis uraikan dalam sub bab Hasil Pengumpulan data, tahap penyajian data dibantu oleh software NVIVO dalam sub bab Hasil Pengolahan Data. Sedangkan tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan akan dijabarkan oleh peneliti dalam sub bab Interpretasi, Pembahasan, penarikan Kesimpulan di bab 5.

Semua data yang sudah dikumpulkan oleh penulis, lebih lanjut akan dipilah oleh peneliti berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Untuk beberapa pertanyaan umum, peneliti menemukan terdapat banyak kesamaan persepsi yang diutarakan oleh narasumber. Secara umum, data yang sudah dianalisis akan dipresentasikan dalam bentuk tabel guna mempermudah proses pembacaan informasi.

4.4.1 Arsitektur Keamanan Maritim untuk Mengurangi Potensi Konflik di Laut Cina Selatan

Pengetahuan mengenai kondisi empiris arsitektur keamanan maritim di LCS sangat dibutuhkan untuk melihat *gap* dan memproyeksikan arsitektur ideal yang bisa diimplementasikan di wilayah ini. Dalam pertanyaan ini, arsitektur ditinjau dari tiga variabel kunci yakni *knowing the*

sea sea, governing the sea, dan policing the sea. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, beberapa isu yang sering dibahas bisa dianalisis melalui tabel berikut ini.

Tabel 4.6 Hasil Analisis pada Komponen *Knowing the Sea*

Aspek	Tanggapan Informan
Potensi Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran penting dalam SLOC dan SLOT global. 2. LCS memiliki fungsi vital dalam perekonomian dan jalur perdagangan dunia. 3. LCS memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik dari segi SDA hayati, maupun sumber daya alam lain yang tidak dapat diperbaharui. 4. LCS merupakan wilayah yang strategis bagi para <i>super power state</i> di dunia.
Pengetahuan Mengenai Ancaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis ancaman yang ada di LYS diantaranya adalah ancaman militer, IUU fishing, perang terbuka, konflik transnasional. 2. Dinamika konflik dan ancaman berjalan sangat dinamis, masing-masing aktor harus menyiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk.
Isu dan Tren Konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masing-masing aktor bergerak <i>based on national interest</i>, eskalasi konflik cukup dinamis. 2. Kemunculan QUAD dan kerjasama AUKUS bisa menimbulkan perbedaan sikap dan agresivitas beberapa pihak. 3. Munculnya aktor baru, status quo, dan polemic lainnya. Ketidakjelasan status mengenai fitur-fitur di LCS ketika isu ini selesai. 4. RRC <i>playing victim</i>, isu dipengaruhi keadaan dalam negeri RRC dan USA.
Arsitektur Ideal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bebas intervensi asing 2. Tidak ada gangguan keamanan maritim, kawasan stabil.
Mengembangkan MDA Regional	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASEAN membahas LCS secara bilateral dan pada forum.

Aspek	Tanggapan Informan
	2. Negara memiliki fokus masing-masing. Tidak semua negara ASEAN memiliki MDA baik.

Sumber: diolah oleh Peneliti

Pada variabel *governing the sea*, isu yang paling banyak dibahas informan bisa dilihat berdasarkan tabel berikut ini.

Tabel 4.7 Hasil Analisis pada Variabel *Governing the Sea*

Aspek	Tanggapan Informan
Pengakuan akan Multilateralism	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dialog dan kerjasama multilateral muncul karena kesadaran alami. 2. RRC banyak menggunakan praktik realpolitik serta <i>debt-trap diplomacy</i>. 3. Semua aktor membutuhkan keamanan dan perdamaian kolektif.
Dialog Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran strategis ASEAN sebagai <i>peace facilitator</i> dan stabilisator di kawasan. 2. Proses dialog dan pembahasan COC berjalan dengan lambat
Komitmen Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak negara yang lebih memilih untuk membela kepentingan nasionalnya. 2. Menahan diri untuk tidak melakukan Tindakan provokatif. 3. Perbedaan sikap dalam menghadapi dinamika ancaman. 4. Komitmen untuk mencapai stabilitas keamanan maritim di kawasan.
Forum Keamanan Maritim	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASEAN Regional Forum 2. ASEAN Maritime Forum, AMF+ 3. ASEAN Summit 4. ASEAN Ministerial Meeting (AMM) 5. Senior Officials Meeting (SOM) 6. ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) 7. ASEAN Declarations on the South China Sea 8. ASEAN-China Dialogue

Aspek	Tanggapan Informan
Kandidat <i>Regional Leader</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada sosok regional leader: Indonesia, RRC, Malaysia, Vietnam, dll. 2. Tidak ada sosok <i>leader</i> karena skema ASEAN yang egaliter, dan pemimpin resmi berganti secara periodik.

Sumber: diolah oleh Peneliti

Proses analisis data pada variabel *policing the sea* bisa diperhatikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8 Hasil Analisis pada Komponen *Policing the Sea*

Aspek	Tanggapan Informan
Operasi Penegakan Hukum dan Resolusi Konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. COC untuk mencegah efek destruktif. 2. Diperlukan pandangan yang sama mengenai LCS dan kepatuhan terhadap hukum internasional (UNCLOS). 3. Resolusi lain melalui hukum, <i>diplomacy</i>, militer, <i>conflict management</i>, <i>confidence and trust building</i>.

Sumber: diolah oleh Peneliti

4.4.2 Peran Indonesia sebagai *Regional Leader* untuk Mendukung Pembentukan Arsitektur Keamanan Maritim di LCS

Dalam sub bab ini, peneliti menemukan beberapa factor yang harus diperhatikan oleh Indonesia untuk menjadi *regional leader* di kawasan, apalagi dalam tahap penyelesaian konflik di LCS. Data yang sudah dianalisis akan dituangkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.9 Hasil Analisis pada RQ-2

Aspek	Tanggapan Informan
Respons	1. Diplomasi maritim (AOIP), politik bebas aktif, serta penyusunan DOC dan COC

Aspek	Tanggapan Informan
	2. Tidak mengakui klaim RRC dan peningkatan penjagaan
Kesiapan	1. Indonesia kapabel menjadi <i>regional leader</i> 2. Indonesia memiliki ciri khas <i>shuttle diplomacy</i> 3. <i>Mapping</i> masih blur
Potensi dan Kendala	1. BAKAMLA dan MDA Indonesia. Politik LN bebas aktif yang efisien. 2. Aturan, peralatan, personel, anggaran 3. Belum memiliki UU Kamla, perlu kerjasama AL 4. Strategi keamanan maritim

Sumber: diolah oleh Peneliti

Untuk penilaian *good maritime governance*, analisis bisa dilakukan secara kualitatif dengan melihat kecenderungan aspek yang sedang dibahas selama penelitian berlangsung. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut.

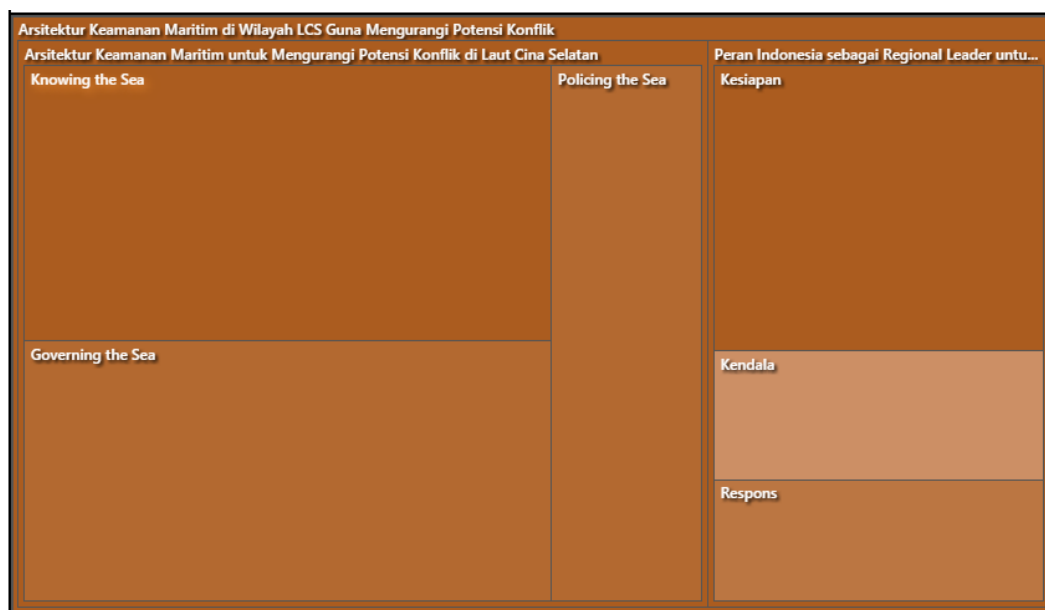
Rentang indikator kualitatif	Rentang indikator kuantitatif	Definisi indikator pendekatan	Definisi indikator penyampaian	Komentar dan Catatan
Normal	0-2	Beberapa aktivitas mungkin ada untuk membuktikan kemampuan yang diukur, tetapi aktivitas tersebut bukan bagian dari rencana, kebijakan, proses, atau program formal.	Kemampuan jarang digunakan (0–30% dari waktu) dan kontribusinya terhadap hasil positif minimal.	Mengakui adanya beberapa upaya atau kegiatan, meskipun mungkin tidak berasal dari rencana, kebijakan, atau program yang diformalkan. Juga mengakui upaya yang tersebar atau terputus (seringkali di tingkat individu atau lokal).
Sederhana	3-5	Terorganisir, jika mendasar, pendekatan terhadap kemampuan ada, dan ada upaya untuk mengatasi kelemahan.	Kemampuan tidak digunakan secara konsisten (30–60% dari waktu) dan hasilnya tidak menentu atau tidak dapat diprediksi.	Mengakui bahwa mungkin tidak ada konsistensi upaya tetapi ada berbagai tingkat organisasi.
Moderat	6-8	Penyelenggaraan kegiatan yang mendukung kemampuan tersebut bersifat profesional, terformalisasi, dan didukung oleh tingkat anggaran yang memadai.	Kemampuan sebagian besar digunakan (60-90% dari waktu) dan menghasilkan hasil yang memadai.	Menunjukkan kecanggihan dan organisasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Bahkan jika kemampuan tidak digunakan secara konsisten atau tidak ada di seluruh domain maritim, hasilnya memadai.
Signifikan	9-10	Kegiatan diformalkan, direncanakan, didanai, dinilai, dan disesuaikan secara terus-menerus, yang menunjukkan tingkat kemampuan yang signifikan di bidang ini.	Kemampuan digunakan secara konsisten (90% dari waktu atau lebih tinggi) dan menghasilkan hasil yang efektif dan efisien. Kajian kapabilitas memastikan kapabilitas ditingkatkan jika/ketika keadaan mengharuskan.	Kapasitas yang lebih kuat ada dan sedang dipertahankan. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas di seluruh domain maritim.

Gambar 4.10 Analisis Penilaian *Good Maritime Governance*

4.5 Interpretasi Data

Interpretasi data dapat dikatakan sebagai proses kombinasi antara analisis data dengan berbagai komponen kategori ataupun kriteria yang memiliki indikator tertentu dengan tujuan memperoleh makna dari kegiatan pengumpulan data penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk menjawab problematika dan pertanyaan rumusan masalah penelitian (Universitas Pertahanan RI, 2021).

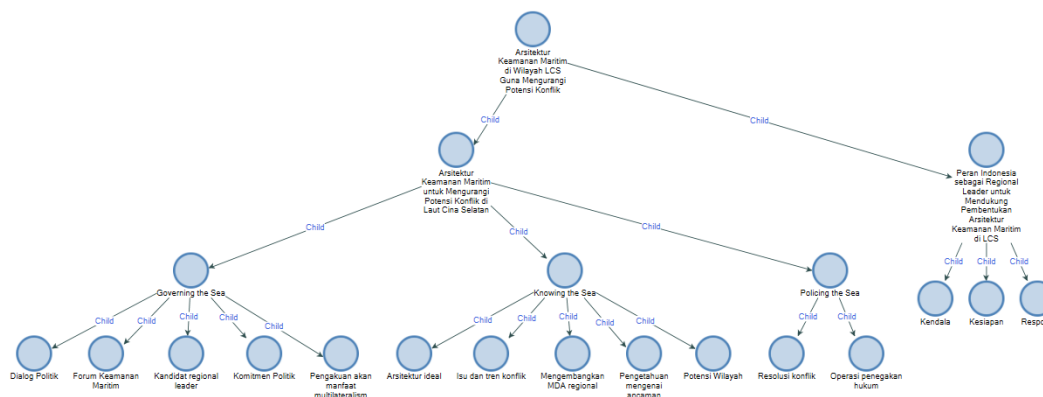
Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis data yang sudah dikumpulkan dari BAKAMLA, KEMENKOMARVES, KEMLU RI, ASEAN, DPR RI, *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* (ERIA), dan para pengamat atau akademisi. Berdasarkan data yang sudah diolah, secara umum frekuensi pembahasan isu akan digambarkan oleh skema sebagai berikut.



Gambar 4.11 Frekuensi Pembahasan

Berdasarkan gradasi warna yang ditampilkan, semakin sering isu itu dibicarakan oleh informan, maka semakin gelap warna coklat yang akan ditampilkan oleh system NVIVO. Sebaliknya, semakin pudar warna coklat yang mereka tampilkan, maka semakin jarang itu tersebut

dibicarakan oleh para narasumber selama wawancara berlangsung. Perhatikan gambaran umum pertanyaan penelitian berikut ini.



Gambar 4.12 Gambaran Umum Pertanyaan Penelitian

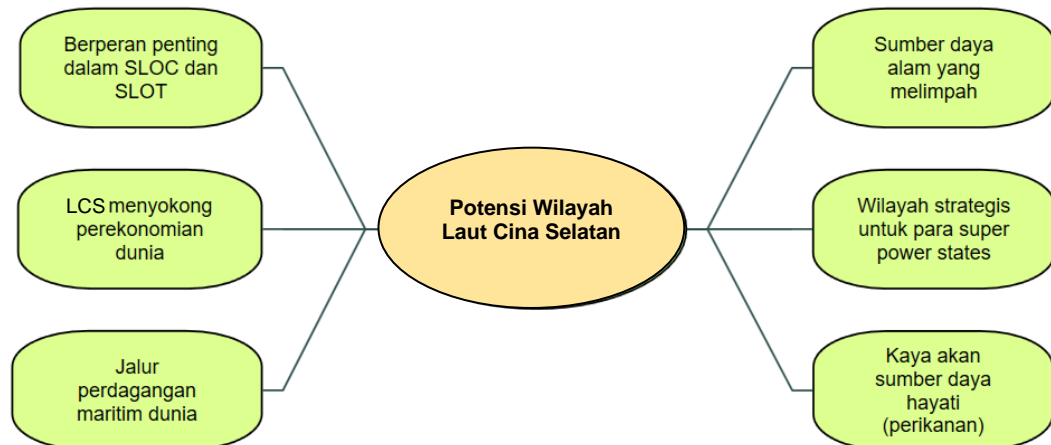
Pada tahap ini, peneliti memutuskan untuk membuat skema untuk menggambarkan poin-poin yang sudah dibahas oleh para narasumber. Tahap ini bertujuan untuk membuat proses interpretasi data menjadi lebih mudah dan efisien. Setelah itu, peneliti akan menarik kesimpulan dari setiap sub bab yang sedang dibahas di dalam tesis ini.

4.5.1 Arsitektur Keamanan Maritim untuk Mengurangi Potensi Konflik di Laut Cina Selatan

Seperti yang sudah diuraikan dalam tinjauan pustaka di BAB 2, arsitektur keamanan maritim bisa dibangun melalui tiga variabel kunci yaitu *knowing the sea*, *governing the sea*, dan *policing the sea*.

a. *Knowing the Sea*

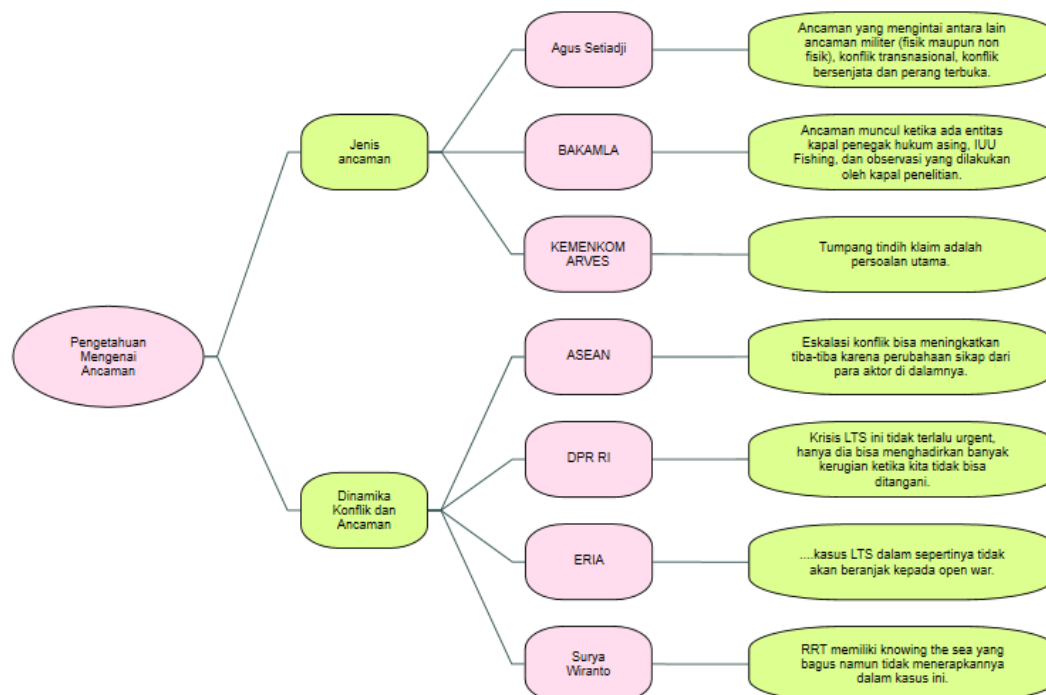
Knowing the sea dibangun di atas pengetahuan mengenai potensi wilayah yang sedang disengketakan, potensi ancaman yang akan mengintar, isu dan tren konflik, pemahaman yang baik mengenai arsitektur keamanan maritim yang ideal, serta pembentukan MDA Regional. Pada skema di bawah ini, peneliti sudah merangkum berbagai potensi LCS yang telah mengundang perhatian dari berbagai pihak. Perhatikan gambar berikut ini dengan seksama.



Gambar 4.13 Potensi Wilayah LCS

Berdasarkan gambar tersebut, LCS memiliki banyak potensi yang strategis bagi semua negara yang memilikinya. LCS memiliki peran yang penting dalam SLOC dan SLOT di wilayah tersebut. Menyimpan sumber daya alam yang melimpah, baik SDA hayati maupun sumber daya yang tidak bisa diperbaharui (seperti minyak bumi dan gas). LCS juga menyokong perekonomian dunia karena merupakan jalur perdagangan maritim dunia. Wilayah sangat strategis jika bisa dikuasai oleh salah satu *super power states*, seperti RRC dan Amerika. Dalam kancah geopolitik, mereka akan lebih mudah untuk menyebarkan pengaruh dan hegemoni di kawasan Indo-Pasifik secara umum.

Selain potensi wilayah, potensi mengenai ancaman juga harus dikuasai oleh ASEAN sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam pusaran konflik LCS. Pada proses pengkodean transkrip wawancara, peneliti kemudian mendapatkan gambaran umum seperti skema berikut.

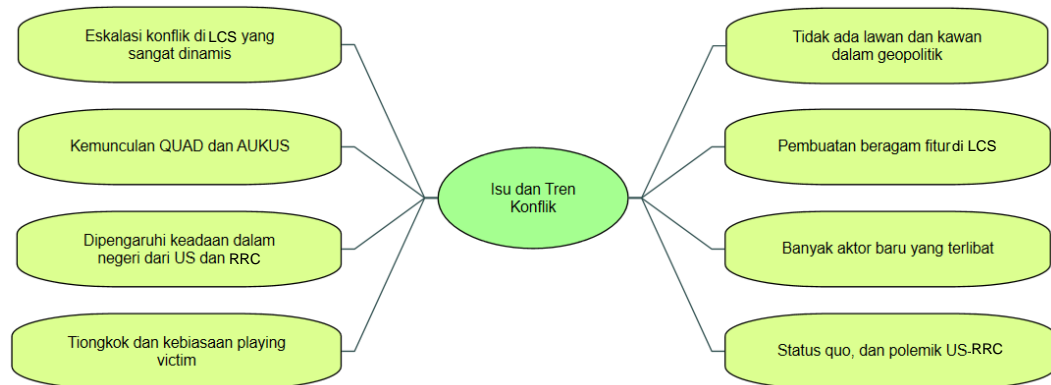


Gambar 4.14 Aspek Pengetahuan Mengenai Ancaman

Berdasarkan koding data yang sudah dikumpulkan, peneliti bisa menyimpulkan bahwa jenis-jenis ancaman yang mengintai di wilayah LCS diantaranya adalah ancaman militer (fisik dan non-fisik), konflik transnasional, perang terbuka dan konflik bersenjata, munculnya entitas kapal penegak hukum asing, IUU fishing, dan lalu lalangnya kapal penelitian yang dimiliki oleh negara lain. KEMENKOMARVES juga menambahkan jika tumpang tindih klaim adalah persoalan utama yang bisa mengancam semua pihak.

Dalam dinamikanya, menurut ASEAN dan ERIA eskalasi bisa muncul tiba-tiba karena perubahan sikap dari para anggota, namun tidak akan beranjak ke perang terbuka. Galby Samhudi malah menganggap jika krisis LCS sebenarnya tidak terlalu *urgent*, hanya jika *conflict management* kita buruk, maka efeknya juga akan terasa lebih buruk. Dalam hal ini Surya Wiranto percaya jika RRC sebenarnya telah memiliki *knowing the sea* yang bagus, namun mencoba untuk menutup mata dan tidak mengimplementasikannya di dalam kehidupan geopolitik mereka.

Pada proses selanjutnya, peneliti melakukan koding dan analisis terhadap isu dan tren konflik yang terjadi di LCS. Mayoritas informan membahas hal yang sama, sehingga skema yang dibuat hanya terbatas pada factor-faktor yang mempengaruhi isu dan tren konflik secara umum. Perhatikan skema berikut.



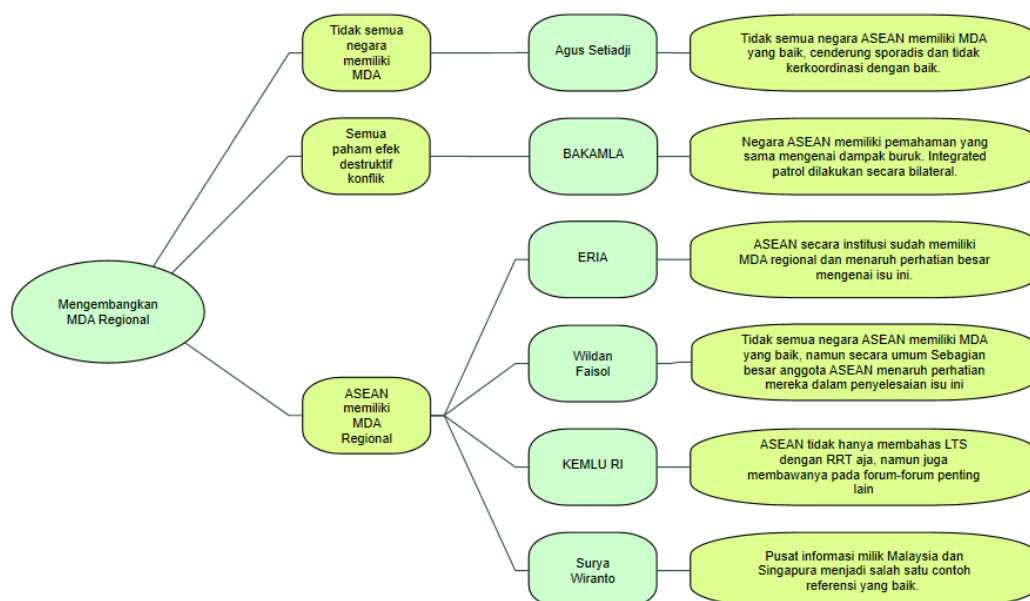
Gambar 4.15 Aspek Isu dan Tren Konflik

Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat disimpulkan jika isu dan tren konflik di LCS mengalami perkembangan yang dinamis. Tidak ada lawan dan kawan dalam kancah geopolitik, hal ini memungkinkan perubahan sikap yang sangat cepat dari para aktor di kawasan. Dinamika ini juga dipengaruhi oleh *national interest* mereka masing-masing. Kemunculan QUAD dan AUKUS juga menarik perhatian dunia, namun ASEAN tidak memiliki sikap kolektif mengenai hal ini. Setiap negara anggota berhak untuk mengeluarkan pernyataan tanpa intervensi apapun dari ASEAN.

Pembuatan beragam fitur di LCS yang dilakukan oleh RRC turut menjadi pembahasan kami selama wawancara. Beberapa informan menganggap jika fitur tersebut merupakan langkah Beijing untuk menandai LCS, jadi kalau pun isu ini selesai, masih belum dapat dipastikan fitur-fitur yang sudah dibangun akan dihancurkan atau dibiarkan. Keadaan di LCS juga akan sangat dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri RRC dan USA. Jika keduanya tidak memiliki masalah domestik, maka pergerakan mereka LCS akan semakin aktif.

Semenjak Amerika bergabung dalam pusaran konflik LCS, banyak negara lain yang ikut serta dan menjadi aktor-aktor tambahan konflik. Dalam hal ini, RRC selalu bermain sebagai korban, sehingga setiap tindakan agresif yang mereka lakukan hanya dianggap sebagai tindakan melindungi diri. Dalam sub ini, informan juga meragukan keberadaan status quo, baik dari segi kebermanfaatan dan kemampuannya untuk meredam konflik berkepanjangan.

Kumpulan informasi di atas kemudian akan diimplementasikan dalam wujud pengembangan MDA regional. Untuk menganalisis prosesnya, perhatikan skema koding berikut ini.



Gambar 4.16 Aspek MDA Regional

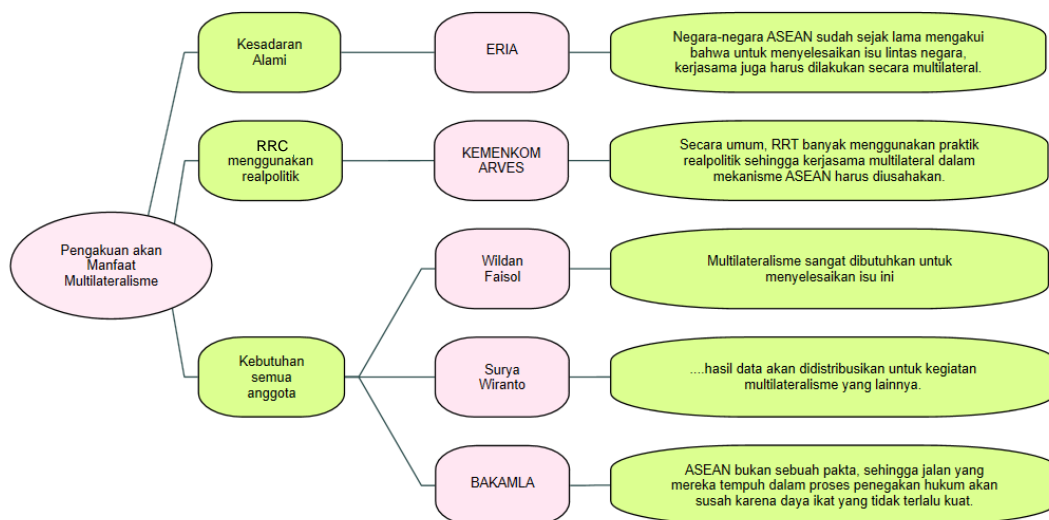
Berdasarkan koding di atas, peneliti menemukan informasi bahwa ternyata tidak semua negara di ASEAN memiliki MDA untuk mendukung pembentukan MDA di tingkat regional. Pada kasus Laos misalnya, hal ini disebabkan oleh ketidakhadiran laut sebagai salah satu fitur utama di negara tersebut. Fakta umum lainnya menyebut jika semua negara di kawasan ini sebenarnya paham akan efek destruktif yang akan dihasilkan dari konflik terbuka di LCS, pra praktiknya hal ini seharusnya bisa menyokong akselerasi MDA tersebut.

Dalam isu ini, ERIA, Wildan Faisol, KEMLU RI, dan Surya Wiranto menyampaikan jika sebenarnya ASEAN sudah memiliki MDA regional. Meskipun tidak semua negara memilikinya, namun MDA kolektif sudah tercermin dari berbagai kerjasama yang sudah diambil oleh ASEAN. Hal itu juga ditandai dengan berbagai dialog mengenai LCS, membawanya ke forum-forum global, penggalakkan fungsi pusat-pusat informasi maritim, *information sharing*, dan berbagai kerjasama lainnya.

b. *Governing the Sea*

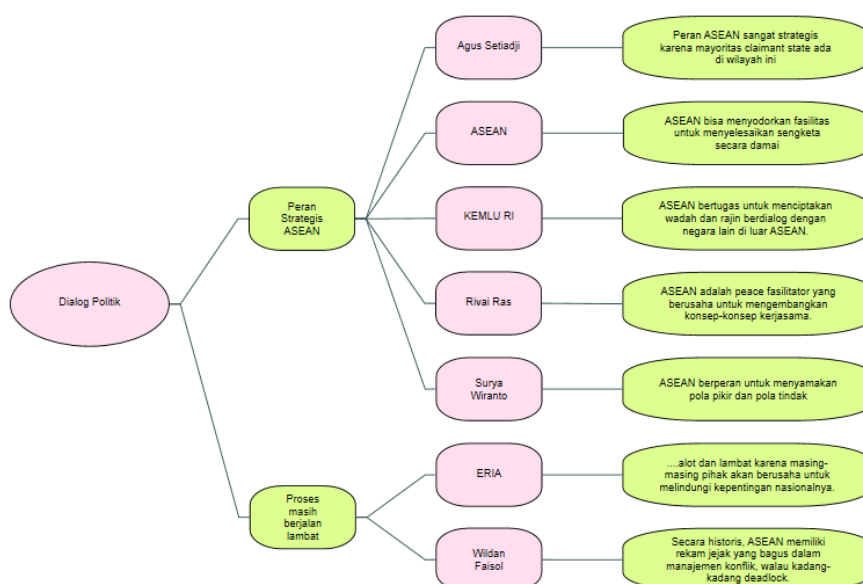
Ketika membahas isu Laut Cina Selatan, salah satu hal yang paling disoroti adalah mengenai kepemimpinan ASEAN untuk menjembatani dan mendorong kerjasama keamanan maritim di kawasan. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji kepemimpinan ASEAN dalam beberapa komponen seperti pengakuan akan multilateralisme, dialog politik, komitmen politik, forum keamanan maritim, dan pembahasan mengenai kandidat dari *regional leader*.

ASEAN telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung stabilitas keamanan maritim di kawasan. Secara historis, setiap anggota membutuhkan hal itu untuk melindungi stabilitas dan keamanan di negaranya. Sebagian besar anggota ASEAN mempercayai bahwa multilateralisme adalah salah satu kunci yang mempengaruhi hal tersebut. Perhatikan gambar berikut.



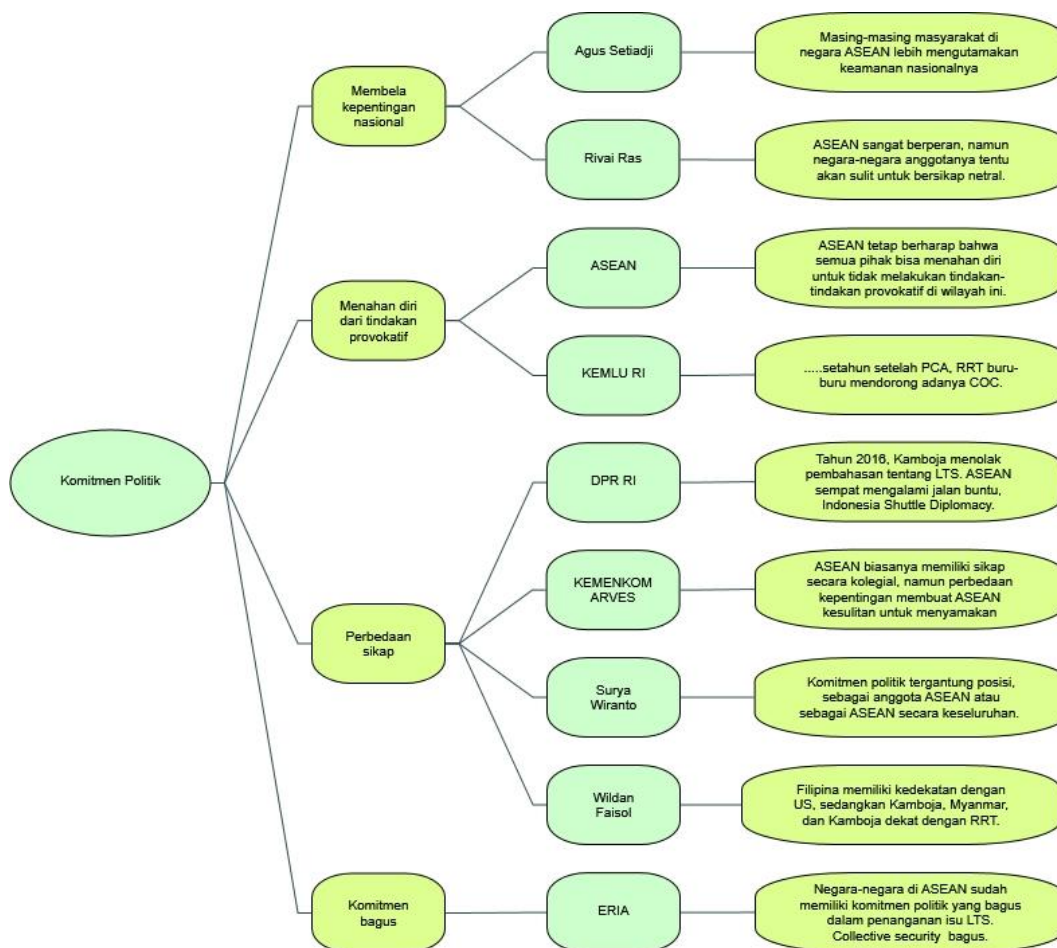
Gambar 4.17 Aspek Pengakuan akan Manfaat Multilateralism

Setelah tahap koding, peneliti menemukan fakta bahwa beberapa narasumber menganggap bahwa pengakuan akan manfaat multilateralisme biasanya muncul karena adanya kesadaran alami untuk bergerak bersama, politik realpolitik yang dilakukan oleh RRC sehingga membuat negara-negara ASEAN akan sangat kewalahan jika melawan RRC secara perorangan, serta multilateralism biasanya muncul karena kebutuhan diantara semua negara di ASEAN. Aspek dialog politik bisa diperhatikan pada diagram berikut.



Gambar 4.18 Aspek Dialog Politik

Berdasarkan analisis terhadap transkrip dan koding, dialog politik ASEAN lebih banyak membahas mengenai peran strategis ASEAN sebagai *peace facilitator*, wadah dialog, dan organisasi yang berguna untuk menyamakan pola pikir dan pola tindak para anggota. Meskipun begitu, kadang-kadang ASEAN masih mengalami *deadlock* dan pembahasan menjadi sangat lambat karena semua pihak ingin kepentingan nasionalnya terpenuhi secara adil. Untuk mendukung perdamaian di kawasan (terutama berkaitan yang berkaitan dengan isu LCS), ASEAN tentu membutuhkan komitmen politik dari para anggotanya. Perhatikan koding berikut ini.



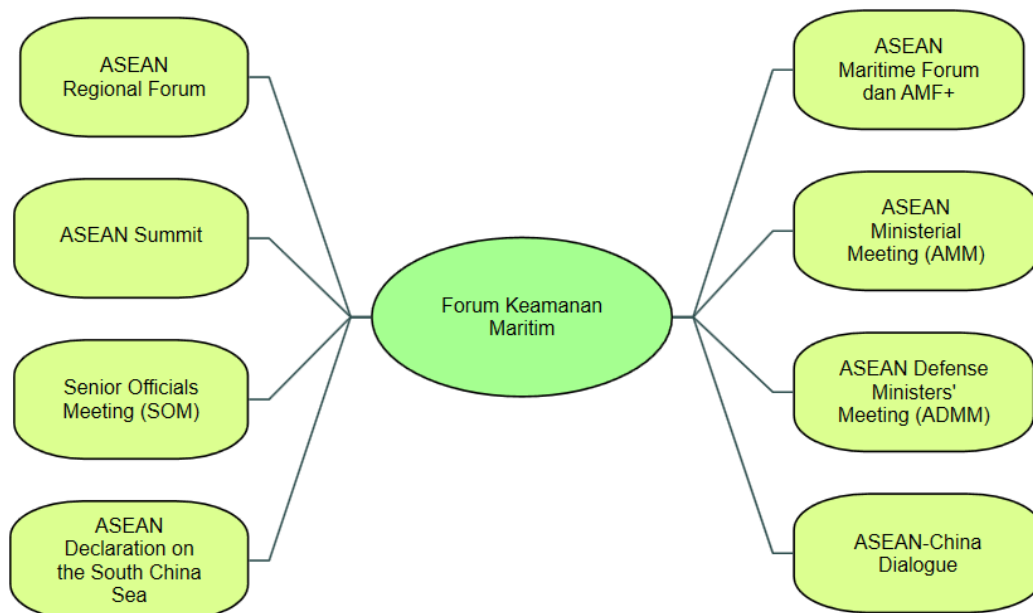
Gambar 4.19 Aspek Komitmen Politik

Berdasarkan informasi di atas, komitmen politik ternyata akan sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional dan perbedaan sikap para

anggota terhadap suatu kasus. Dalam hal ini, tahun 2016 lalu Kamboja pernah menolak pembahasan mengenai LCS sampai membuat Indonesia harus melakukan *shuttle diplomacy*. Menurut Surya Wiranto, komitmen politik juga akan disesuaikan dengan posisi yang sedang mereka perankan ketika perbincangan berlangsung. Sebagai sebuah negara di ASEAN, atau sebagai perwakilan ASEAN secara keseluruhan.

Dinamika sikap para anggota juga terpantau pada kedekatan Filipina, Myanmar, Kamboja, dan Vietnam dengan salah satu kubu. Meskipun begitu, ERIA menganggap bahwa secara umum komitmen ASEAN sudah bagus. Mereka diikat oleh kebutuhan akan situasi kawasan yang aman dan damai. Maka dari itu, anggota ASEAN atau RRC sudah sepatutnya menahan diri dari tindakan-tindakan provokatif yang akan meningkatkan eskalasi konflik.

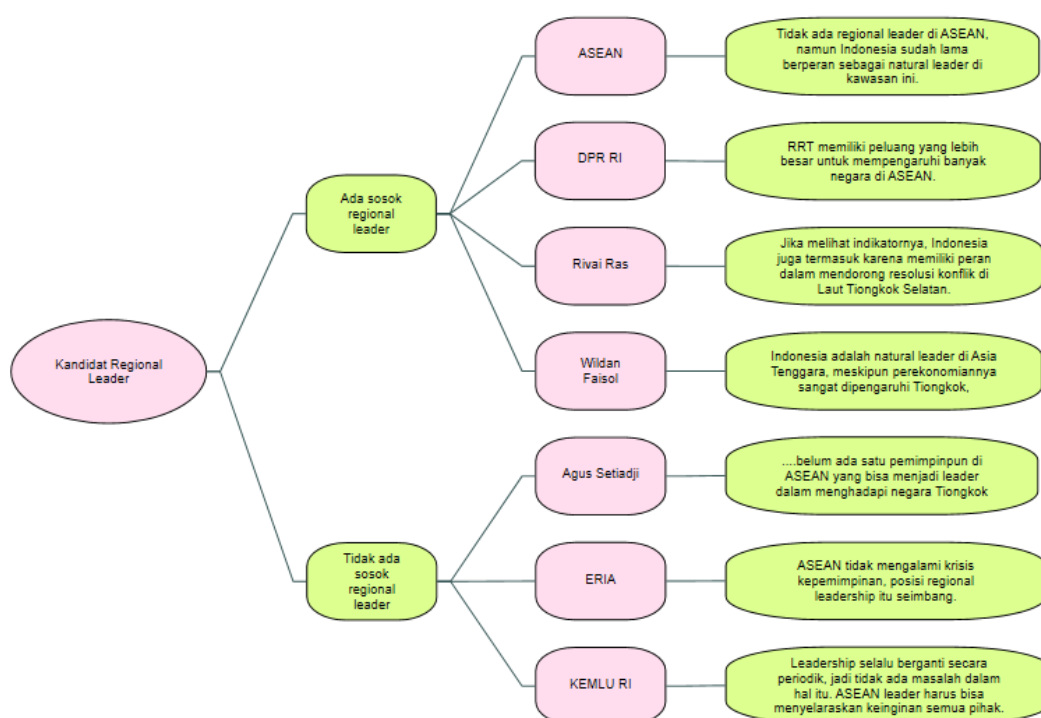
Pada pembahasan selanjutnya, peneliti menemukan beberapa nama forum keamanan maritim yang sudah disebutkan oleh semua narasumber dalam kegiatan wawancara.



Gambar 4.20 Aspek Forum Keamanan Maritim

Berdasarkan skema tersebut, informan mengusulkan beberapa *platform* yang biasa digunakan oleh ASEAN untuk membahas isu-isu

strategis mengenai keamanan maritim. Forum itu diantaranya adalah ASEAN Regional Forum, ASEAN Maritime Forum, AMF+, ASEAN Summit, ASEAN Ministerial Meeting (AMM), Senior Officials Meeting (som), ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM), ASEAN Declarations on the South China Sea, dan ASEAN-China Dialogue. Sebenarnya masih banyak forum yang bisa dimanfaatkan oleh ASEAN untuk menyokong proses penyelesaian konflik di LCS. Untuk pembahasan *regional leader*, perhatikan gambar berikut.



Gambar 4.21 Aspek Kandidat *Regional Leader*

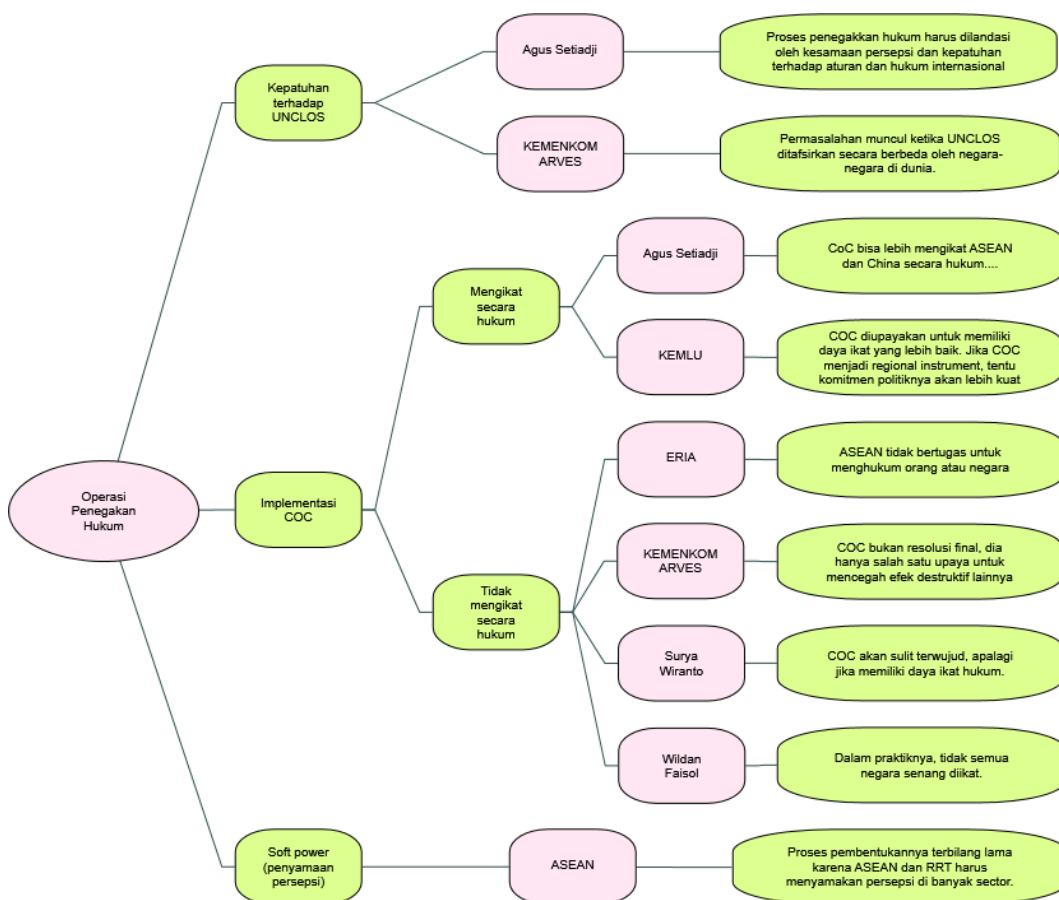
Berdasarkan skema tersebut, ada dua pendapat utama yang menjeaskan mengenai kandidat *regional leader* di kawasan. Beberapa narasumber seperti Ade Padmo, Rivai Ras, dan Wildan Faisal mengatakan jika sosok *regional leader* bisa dilihat pada Indonesia selaku *natural leader* yang sudah eksis sejak puluhan tahun silam. Meskipun begitu, Galby Samhudi memiliki pandangan yang berbeda. Menurutny RRC sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk menjadi *regional*

leader di kawasan, apalagi jika didukung dengan kemauan tinggi untuk menyelesaikan sengketa.

Di sisi lain, Agus Setiadji, Putti Ananda (ERIA), dan Fefen Zamzari (KEMLU), menganggap jika ASEAN tidak memiliki sosok *regional leader* secara utuh. Kepemimpinan formal selalu berganti secara periodik, sehingga krisis kepemimpinan juga tidak terjadi kepada ASEAN. Di konteks ini, siapapun pemimpinnya, anggota lain akan mendukung sesuai dengan kepentingan politik mereka.

c. *Policing the Sea*

Variabel *policing the sea* akan difokuskan pada upaya ASEAN dalam operasi penegakan hukum dan resolusi konflik untuk mendukung upaya penyelesaian sengketa di LCS. Perhatikan skema berikut.

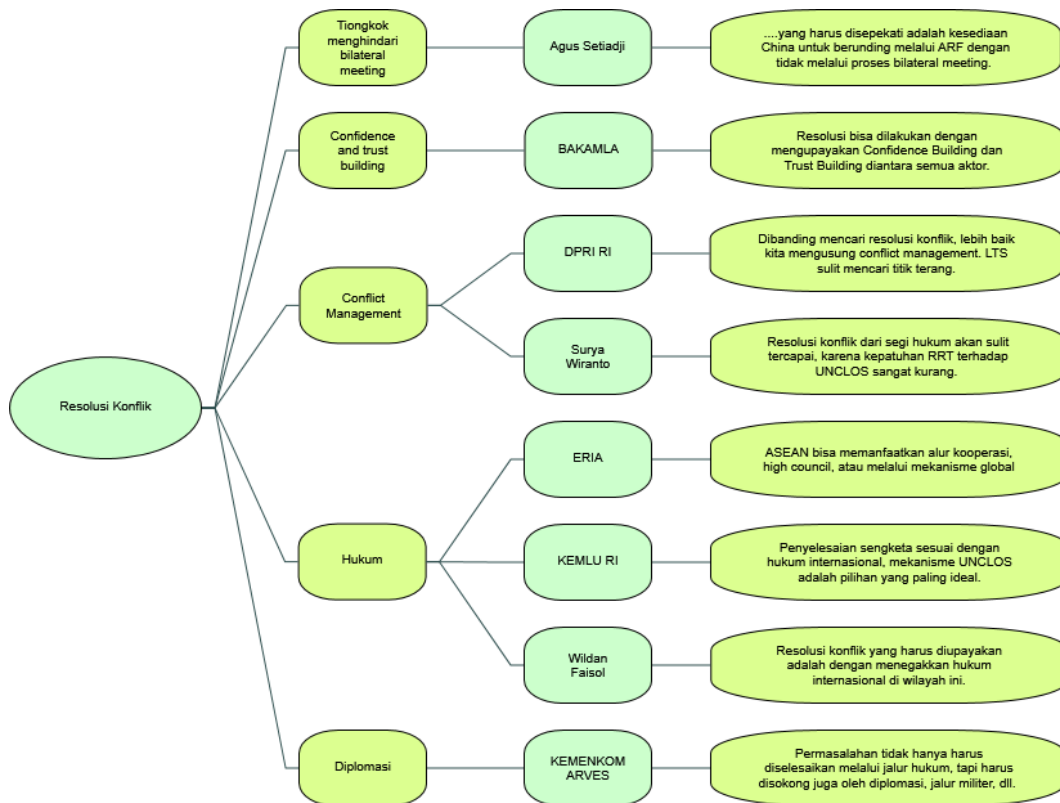


Gambar 4.22 Aspek Operasi Penegakan Hukum

Berdasarkan informasi di atas, operasi penegakan hukum di LCS sudah seyogyanya dilakukan untuk mengurangi eskalasi dan menyelesaikan sengketa secepatnya. Dalam hal ini, Agus Setiadi dan KEMENKOMARVES menyarankan Kembali kepatuhan negara terhadap UNCLOS dan peraturan hukum internasional yang lainnya. Di sisi lain, Agus Setiadi dan KEMLU juga mendukung proses penyelesaian dan implementasi COC yang memiliki daya ikat hukum. Sebaliknya, ERIA, KEMENKOMARVES, Surya Wiranto, dan Wildan Faisal menganggap jika tidak semua negara ASEAN menginginkan COC yang memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum.

Secara empiris, keengganan tersebut bisa terlihat dari proses penyelesaian COC yang berlarut-larut. Baik RRC atau beberapa oknum lain di ASEAN, pada hakikatnya tidak suka diikat, apalagi ASEAN tidak memiliki wewenang untuk menghukum negara. Ade Padmo Sarwono dalam hal ini mengajukan upaya lain melalui proses diplomasi dan penguatan bentuk-bentuk *soft power* lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti juga memberikan pertanyaan opsional mengenai resolusi lain yang seharusnya diupayakan oleh RRC dan para *claimant state*. Proses coding mengenai resolusi konflik bisa diperhatikan pada skema berikut ini.



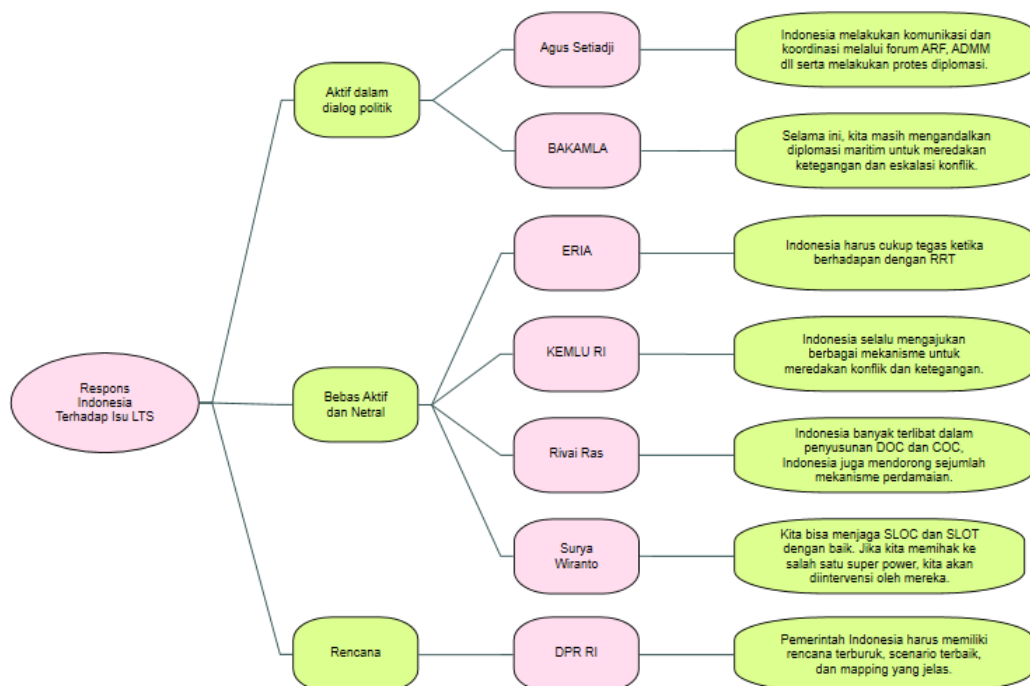
Gambar 4.23 Aspek Resolusi Konflik

Dalam penelitian ini, Agus Setiadji menyarankan agar RRC tidak selalu menggunakan *bilateral meeting* untuk menyelesaikan setiap eskalasi konflik di LCS. Multilateralisme seharusnya bisa dibangun, dan BAKAMLA mengusulkan *confidence* dan *trust building* diantara para aktor. Di sisi lain, Galby dari DPR dan Surya Wiranto menyebutkan jika proses resolusi konflik melalui skema hukum akan sangat sulit dicapai. Maka dari itu, negara yang terlibat harus mengakselerasi *conflict management skill* mereka untuk membantu perdamaian dan stabilitas keamanan.

Di sisi lain, ERIA, KEMLU, dan Wildan Faisol menyarankan agar resolusi konflik harus tetap diupayakan melalui proses penegakan hukum internasional. Meski dalam praktiknya, KEMENKOMARVES juga menambahkan diplomasi dan jalur maritim sebagai upaya resolusi tambahan. Kita tentu berharap, bahwa setiap aktor memiliki keinginan untuk menyelesaikan konflik, dengan atau melalui media apapun.

4.5.2 Peran Indonesia sebagai *Regional Leader* untuk Mendukung Pembentukan Arsitektur Keamanan Maritim di LCS

Penelitian kedua meliputi pembahasan mengenai respons Indonesia terhadap konflik, kesiapan sebagai *regional leader*, potensi dan kendala yang mungkin dihadapi, serta eksistensi BAKAMLA sebagai *Indonesian Coast Guard*. Data yang sudah kami kumpulkan pada transkrip, bisa digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.

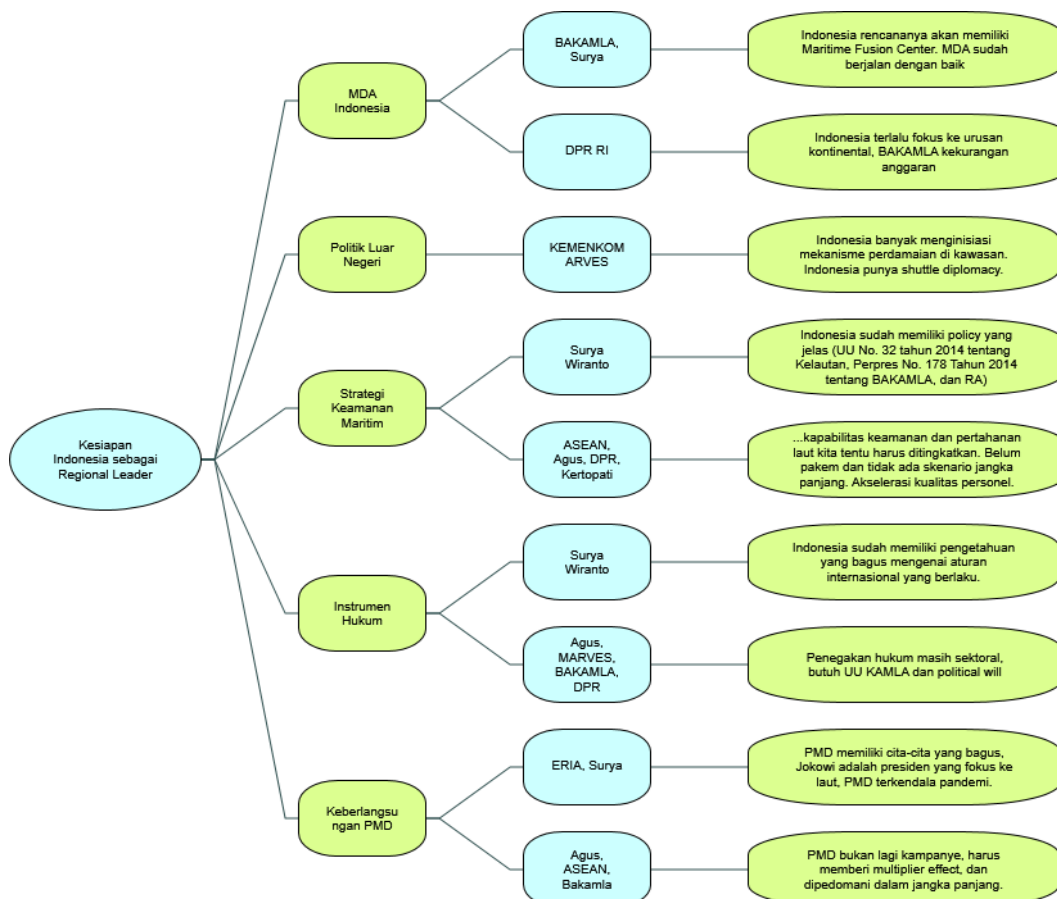


Gambar 4.24 Aspek Respons Indonesia terhadap LCS

Berdasarkan gambar di atas, Indonesia cenderung untuk aktif melibatkan dirinya dalam dialog politik dan mekanisme ASEAN lainnya. Kita rajin melakukan komunikasi melalui berbagai forum, dan bahkan selalu berusaha untuk turut menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan. Indonesia juga terlibat aktif dalam penyusunan DOC dan COC, dan mendorong berbagai platform yang bisa membantu ASEAN untuk berkembang di Indo-Pasifik secara umum. Indonesia juga berusaha untuk senantiasa menjaga netralitasnya selama menangani isu ini.

Galby Samhudi, Tenaga Ahli Fraksi di Komisi I DPR RI mengatakan jika Indonesia sampai saat ini belum memiliki rencana terburuk, skenario

terbaik, dan *mapping* yang jelas mengenai isu LCS. Kebanyakan instansi hanya bergerak *based on daily crisis*. Untuk melihat kesiapan Indonesia sebagai *regional leader* di LCS, perhatikan skema coding berikut ini.



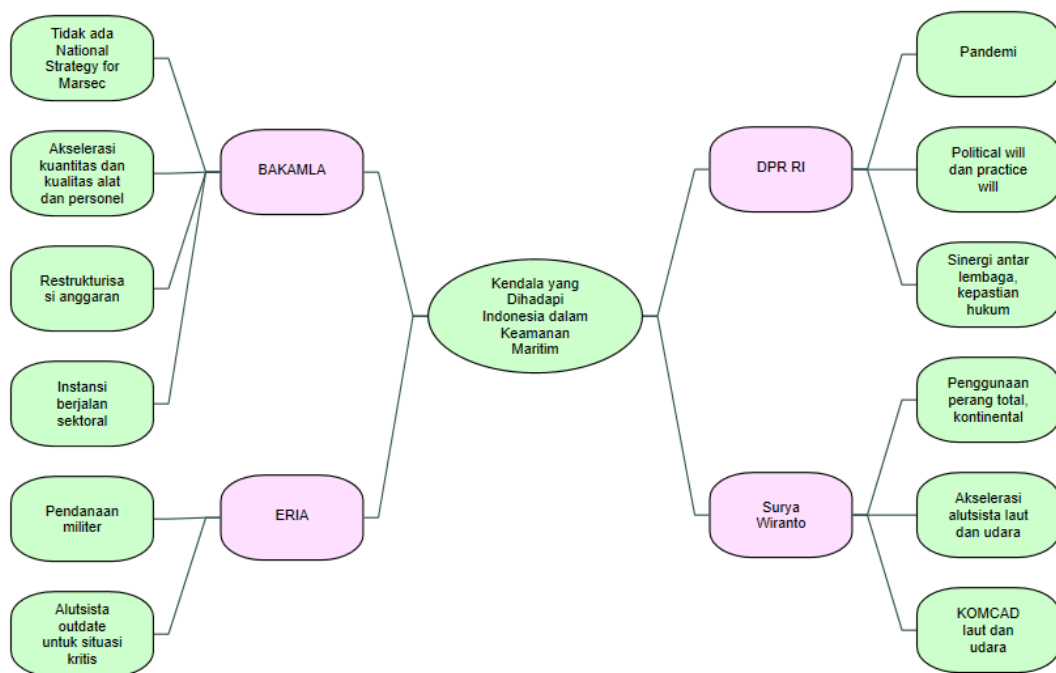
Gambar 4.25 Aspek Kesiapan Indonesia menjadi *Regional Leader*

Pada pembahasan ini, peneliti membagi sub bab ke dalam beberapa komponen, seperti MDA, politik internasional, strategi keamanan maritim, instrumen hukum, dan keberlangsungan PMD sebagai poros maritim. Setiap objek bisa dipandang dalam dua perspektif yang berbeda. *Pertama*, tidak semua informan setuju jika MDA Indonesia sudah berjalan dengan baik. Beberapa dari mereka mengkritisi anggaran BAKAMLA yang terlalu kecil untuk membentuk pusat maritim yang bagus dan Indonesia masih dianggap terlalu sibuk mengurus persoalan kontinental.

Kedua, politik luar negeri Indonesia sudah berjalan dengan optimal karena Indonesia selalu berusaha untuk menjadi anggota yang vocal

untuk menyuarkan keamanan dan perdamaian. *Ketiga*, strategi KAMLA. Bagi sebagian besar informan, Indonesia masih belum memiliki strategi keamanan maritim yang pakem, tidak ada scenario jangka panjang, dan diperlukannya akselerasi kualitas dari para personel maritim kita.

Keempat, instrumen hukum. Secara umum, Indonesia masih belum memiliki UU Keamanan Laut yang bisa mengakomodasi pergerakan BAKAMLA dan perampingan instansi. Kita juga masih harus meningkatkan *political will* kita jika ingin menjadi negara maritim yang besar. Di sisi lain, keberlangsungan PMD masih dipertanyakan banyak orang karena dirasa mati suri meskipun Jokowi juga mendapat apresiasi terhadap visi tersebut. Untuk melihat kendala apa yang sama yang sedang dihadapi oleh Indonesia, silahkan perhatikan skema berikut.



Gambar 4.26 Kendala Indonesia untuk Menjadi Regional Leader

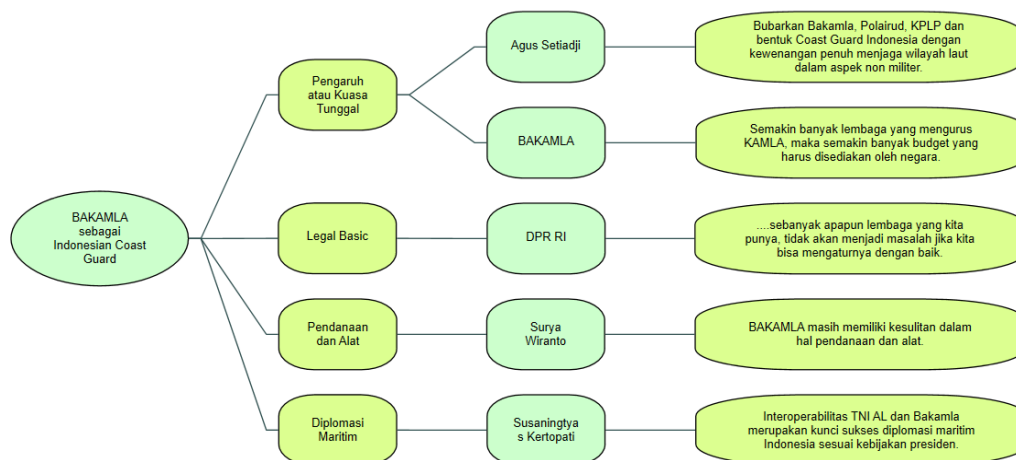
Berdasarkan hasil analisis terhadap proses pengkodean transkrip, maka peneliti mendapat berbagai informasi mengenai kendala yang dihadapi Indonesia dalam mengurus keamanan maritim di wilayahnya. Menurut BAKAMLA, Indonesia tidak memiliki *national strategy for maritime security*, masih membutuhkan akselerasi kuantitas dan kualitas alat dan

personel, memerlukan kebijakan restrukturisasi anggaran, dan BAKAMLA juga menyayangkan pergerakan instansi yang masih sektoral dalam proses penegakan hukum di laut.

Galby Samhudi selaku tim ahli fraksi dari Komisi I DPR RI menyatakan bahwa pandemic menjadi salah satu alasan yang membuat BAKAMLA tidak dapat bekerja secara maksimal untuk menjaga perairan laut Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, pandemic membuat negara harus memotong anggaran di beberapa pos pemerintahan. Indonesia juga dianggap tidak memiliki *political will and practice will* yang kuat untuk membentuk tata Kelola maritim yang baik. Dalam kesempatan itu, Galby mengatakan bahwa sinergi antar lembaga bisa ditingkatkan dengan proses perapian instrument hukum. Tidak ada yang tumpang tindih, BAKAMLA sudah seharusnya dikelola dengan perhatian penuh.

Menurut ERIA, pendanaan militer dan pembaruan alutsista adalah dua hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sedangkan Surya Wiranto menganggap bahwa Indonesia masih terkungkung dalam *mindset* continental berupa perang total dan sejenisnya. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan KOMCAD angkatan pertama yang malah difokuskan ke matra darat, padahal di sisi lain Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang seharusnya juga memiliki kekuatan angkatan laut dan udara yang kuat. Surya Wiranto juga mendorong proses pembaruan dna penambahan alutsista untuk matra laut dan udara.

Pada sub bab ini, permasalahan BAKAMLA akan dikoding secara terpisah karena kuantitas kode yang ditautkan oleh informan terlalu banyak untuk disatukan dalam pembahasan sebelumnya. Perhatikan gambar berikut ini.



Gambar 4.27 Aspek Bakamla sebagai Indonesian Coast Guard

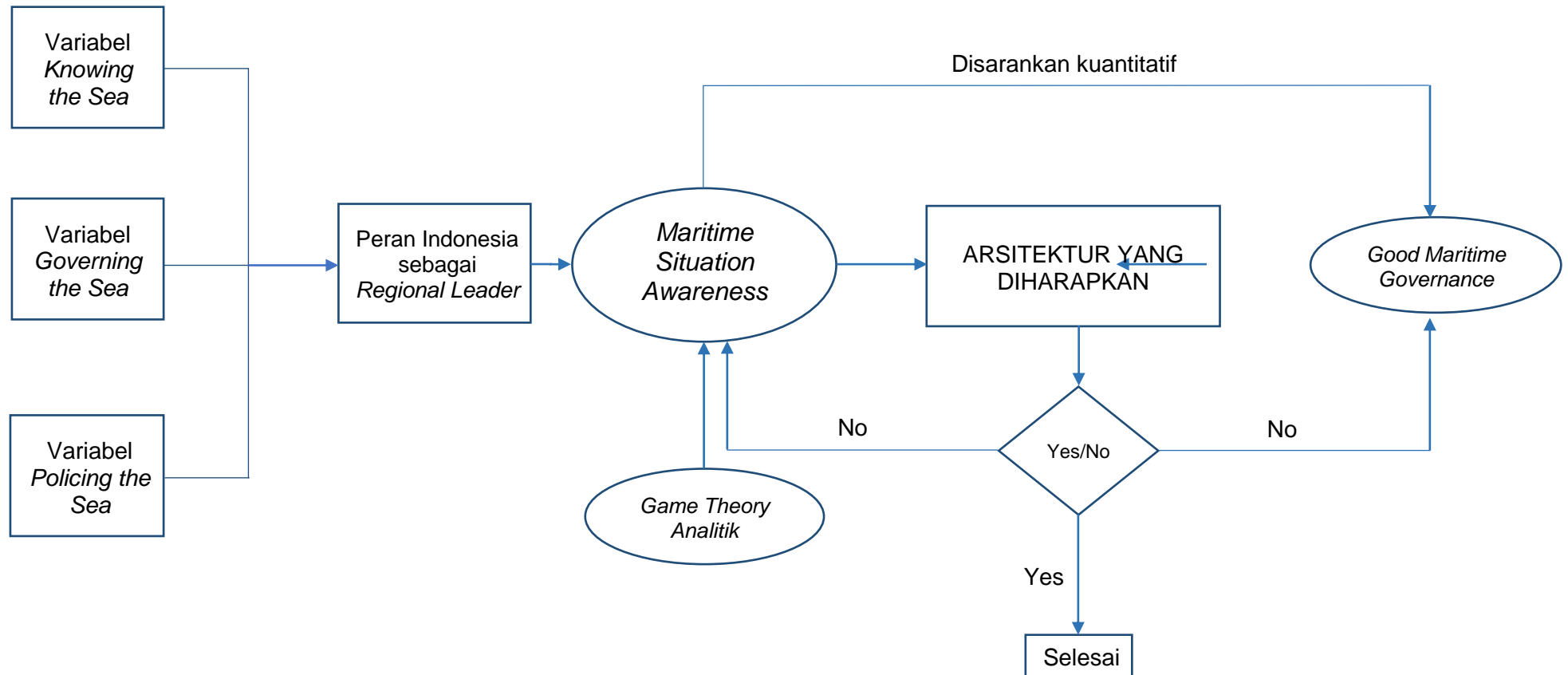
Berdasarkan gambar di atas, dapat dianalisis bahwa pembahasan BAKAMLA secara garis besar lebih menitikberatkan pada fungsi BAKAMLA sebagai aktor utama dalam keamanan maritim di Indonesia. Mayoritas informan menaruh rasa khawatir terhadap banyaknya instansi penegak hukum yang ada di laut. Walau sebenarnya, menurut Galby (DPR), banyak instansi sudah seharusnya tidak mengganggu sistem jika semuanya dikelola secara baik dan tidak memiliki ego sektoral.

DPR menyoroti pengaturan instrumen hukum dan *legal basic* yang tegas untuk BAKAMLA dan instansi lain yang memiliki kewenangan di laut. Di sisi lain, Surya Wiranto menyoroti tentang pendanaan dan akselerasi alat di tubuh BAKAMLA. Senada dengan itu, Susaningtyas menambahkan jika BAKAMLA bisa menjadi salah satu tokoh kunci dalam diplomasi maritim kita dengan negara lain yang bersinggungan di laut.

4.6 Pembahasan

Pembahasan dilakukan terhadap data/informasi hasil penelitian yang telah disajikan. Pembahasan merupakan analisis peneliti terhadap data/informasi hasil penelitian dengan menghubungkan berbagai teori/konsep yang digunakan dalam penelitian. Secara umum, hasil penelitian yang sudah didapat oleh penulis bisa ditunjukkan oleh skema berikut ini. Gambar akan ditunjukkan pada halaman selanjutnya.

**“ARSITEKTUR KEAMANAN MARITIM DI WILAYAH LAUT CINA SELATAN
GUNA MENGURANGI POTENSI KONFLIK”**



Bagan 3.2 Gambaran Hasil Penelitian

4.6.1 Arsitektur Keamanan Maritim untuk Mengurangi Potensi Konflik di Laut Cina Selatan

Menurut Bueger (2019), dalam penelitiannya mengenai “What is the right security architecture for the Western Indian Ocean?”, sebuah arsitektur pertama-tama perlu dibangun di atas pengakuan akan potensi dari wilayah yang disengketakan dan manfaat yang bisa diharapkan dari kerjasama multilateral di wilayah itu. Arsitektur keamanan maritim harus didasarkan pada tiga variabel kunci, yakni *knowing the sea* (mengetahui laut), *governing the sea* (mengatur laut), dan *policing the sea* (mengawasi laut) (Bueger, 2019: 3). Arsitektur keamanan adalah struktur keamanan yang menyeluruh, koheren, dan komprehensif.

a. *Knowing the Sea*

Secara umum, variabel *knowing the sea* akan didukung dengan pengetahuan para aktor mengenai potensi wilayah Laut Cina Selatan, pengetahuan mengenai ancaman, isu dan tren konflik, arsitektur ideal, dan pengembangan MDA di tingkat regional. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai ancaman, peneliti menyelipkan analisis *game theory* sebagai salah satu *tools* untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang efektif.

Pemahaman negara mengenai wilayah yang disengketakan merupakan salah satu prasyarat bagi organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang tepat. Kita akan menyadari situasi lingkungan dengan mengumpulkan, menggabungkan, dan menafsirkan semua informasi yang ada (Van De Laar et al., 2012: 3).

1) Potensi Wilayah

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dari semua informan, dapat ditarik kesimpulan bahwa LCS memiliki berbagai macam potensi yang bisa dikembangkan oleh negara manapun yang memilikinya. Pengakuan atas potensi wilayah yang besar

memberikan kesadaran kepada para aktor bahwa konflik LCS mungkin akan berjalan dengan sangat alot karena semua pihak menginginkan sisi terbaik yang masih bisa mereka usahakan.

Dalam hal ini, RRC adalah salah satunya. Negara yang sedang merangkak menjadi *super power state* kelas kakap itu tentu tidak akan melewatkan 'kubangan emas' seperti perairan LCS. Potensi yang sudah disebutkan oleh informan dalam kegiatan wawancara diantaranya adalah sebagai berikut.

a) SLOC dan SLOT global

Lautan menutupi sekitar 70% permukaan bumi, dan Samudra Pasifik menempati 50% permukaan laut dunia (Guoxing, 2021). Jalur komunikasi laut menghubungkan semua negara di dunia. Di masa damai, jalur ini berfungsi sebagai jalur perdagangan komersial; di masa perang, mereka akan berubah menjadi jalur komunikasi strategis. Kawasan Indo-Pasifik secara umum memiliki dua jalur komunikasi laut yang signifikan. Pertama, melewati Laut Cina Selatan ke Samudra Hindia dan Timur Tengah. Kedua, melewati Laut Cina Timur dan Laut Jepang ke Samudra Pasifik dan wilayah pantai Pasifik.

Laut Cina Selatan merupakan salah satu objek alam yang memiliki peran strategis dalam SLOC (Sea Lane of Communication) dan SLOT (Sea Lane of Oil Trade) dunia, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Laut Cina Selatan menyediakan rute pelayaran yang menghubungkan Asia Timur Laut dengan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Jumlah kapal tanker pengangkut minyak yang melalui LCS bahkan digadagadangi tiga kali lebih banyak dari jumlah kapal yang melintas di Terusan Suez dan lebih dari lima kali lebih banyak dari jumlah kapal yang melintas di Terusan Panama.

Laut Cina Selatan adalah salah satu rute tersibuk di dunia pelayaran karena >30% minyak mentah dunia (EIA, 2018) dan $\pm 40\%$ perdagangan LNG melewati perairannya (EIA, 2017). Dari jumlah itu, hampir 90% barang melakukan transit di Selat Malaka, sehingga pengelolaan di kawasan ini juga melibatkan tiga pemain utama yakni Amerika Serikat, RRC dan India (Suharna, 2012).

Dalam wawancaranya, Ade Padmo Sarwono dari selaku Duta Besar Luar Biasa ASEAN mengamini dengan beranggapan bahwa:

“LCS sangat berperan penting dalam SLOC dan SLOT, serta menjadi salah satu penyokong perdagangan global. Ketidakstabilan di wilayah ini hanya akan mendorong ketidakstabilan perekonomian dunia.”

Pada tahun 2016, sekitar 15 juta barel per hari melewati Laut Cina Selatan. Hal ini tentu juga dipengaruhi oleh pola ekonomi di kawasan yang berorientasi pada kegiatan ekspor-impor, sehingga aliran pelayaran yang tidak terputus sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kemakmuran negara-negara kawasan. Maka dari itu, menjaga stabilitas keamanan SLOC dan SLOT seharusnya lebih penting dan diperhatikan oleh semua.

Di perairan Indonesia, SLOC dan SLOT ini akan berkaitan dengan keberadaan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), terutama ALKI I (Selat Malaka dan Sunda). Seperti kebanyakan negara lain di Asia Pasifik, RRC sangat bergantung kepada proses impor hidrokarbon di kawasan. Pemasok utama RRC berasal dari Rusia dan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, lebih dari 70% ekspor minyak bumi dan LNG dari RRC dikapalkan melalui Selat Malaka. Menurut perhitungan CSIS, sekitar 20% perdagangan maritim global dan

60% arus perdagangan China bergerak melalui Selat Malaka dan Laut China Selatan, menjadikannya jalur komunikasi laut terpenting bagi ekonomi RRC (Paszak, 2021).

Pada kondisi ini, RRC telah mengalami Malacca Dilemma. Industri China yang bergantung pada rute pelayaran di Selat Malaka telah menjadikannya terjebak di choke point yang sempurna. Secara global, proses blokade Selat Malaka akan mempengaruhi sektor transportasi dan perdagangan internasional (Shibasaki, 2018). Selain karena faktor politis, ancaman lain yang membayang-bayangi kegiatan blokade di Selat Malaka adalah karena posisinya yang rawan terhadap ancaman tsunami, perompakan/pembajakan, terorisme, dll.

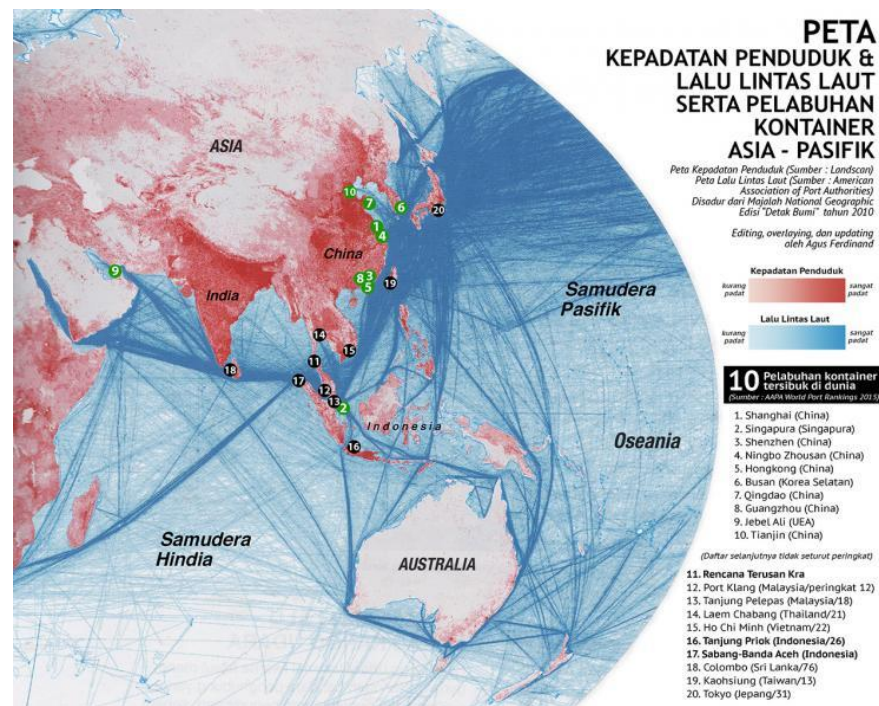
Tsunami tahun 2004 kemarin telah menunjukkan satu dampak destruktif alam terhadap fasilitas dan sumber daya manusia di pelabuhan. Ribuan orang meninggal dan beberapa infrastruktur maritim harus diperbaiki dalam jangka waktu yang lama. Padahal jika rute terblokir satu jam saja, kerusakan yang akan ditimbulkan bisa mencapai ratusan juta dollar. Kita bisa berkaca kepada kasus pemblokiran Terusan Suez beberapa waktu lalu, yang total kerugiannya sekitar US \$400 juta/jam (XNews, 2021).

Blokade di Selat Malaka akan menaikkan biaya distribusi barang dan jasa, membendung arus barang sehingga menaikkan kelangkaan, atau menurunkan tingkat penawaran dan menaikkan harga jual. Dalam hal ini, Indonesia sebenarnya bisa mendapat keuntungan dengan memanfaatkan Selat Sunda sebagai rute alternatif untuk menghindari Malaka yang terblokir. Selat Sunda bisa digunakan untuk mengantisipasi titik kulminasi akibat perang terbuka antara RRC dan USA, atau proses eskalasi konflik lain yang terjadi di kawasan. Jika jalur Selat Malaka “tersumbat”, maka Selat Sunda adalah rute

alternatif tersingkat jika dibandingkan dengan jalur-jalur lainnya. Potensi ini adalah keuntungan geopolitik yang bisa dinikmati oleh Indonesia jika negara-negara di wilayah ini terlibat konflik maritim atau sejenisnya.

b) Peran vital perekonomian dan jalur perdagangan dunia

Dalam hal pergerakan kapal, lautan yang berada di kawasan Asia Pasifik termasuk yang tersibuk di dunia. Berdasarkan data AAPA World Port Rankings, sebagian besar pelabuhan kargo tersibuk di dunia berada di kawasan LCS. Beberapa selat utama yang mendukung kegiatan perekonomian di wilayah ini diantaranya adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar di Asia Tenggara, serta Selat Tsushima, Selat Tsugaru, Selat Osumi, dan Selat Kedelai (La Perouse) di kawasan Asia Timur Laut. Selat tersebut biasanya dinamakan sebagai *chokepoints*, karena berpotensi untuk mengalami penutupan atau blokade. Perdagangan yang berlangsung adalah transaksi intra-regional dan antar-regional. Perhatikan peta berikut ini.



Gambar 4.28 Peta Kepadatan penduduk dan Lalu Lintas Laut dan Pelabuhan di Asia Pasifik

Selain minyak mentah, komoditas utama yang didistribusikan di wilayah ini diantaranya adalah cadangan pangan, batu bara, produk manufaktur, dan bijih besi. Dari 20 jalur pelayaran peti kemas terbesar di dunia, setengahnya dimiliki dan berbasis di Asia, dan di antara 20 pelabuhan peti kemas teratas dunia, 18 diantaranya berada di Asia Pasifik.

c) Wilayah yang strategis bagi *super power states*

Dalam kasus LCS, klaim maritim yang disengketakan oleh RRC jelas akan mengganggu atau mengubah arus barang dan geopolitik perdagangan dunia. Selain itu, Wildan Faisol menambahkan bahwa kasus ini juga akan berimbas pada hal lain. Seperti keterlibatan USA sebagai salah satu super power state dunia dan kebebasan navigasi yang mereka miliki. Perhatikan pernyataan berikut ini.

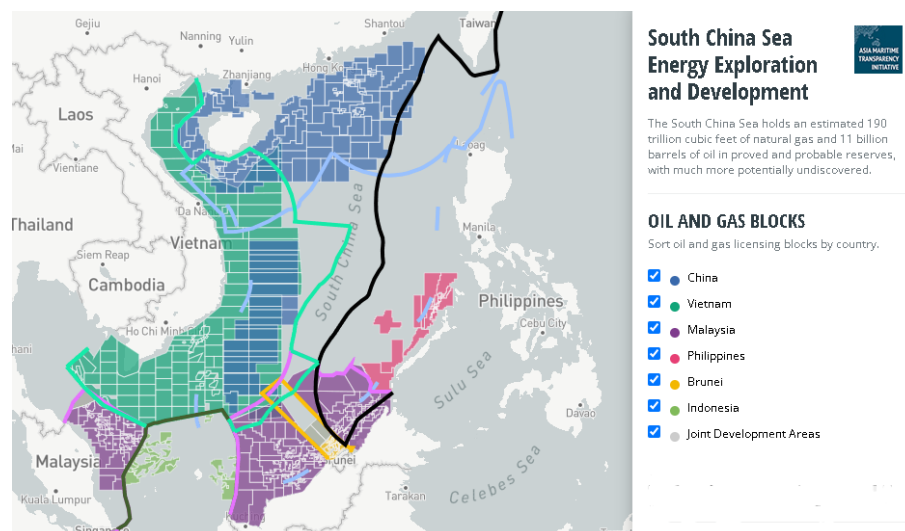
“LCS merupakan salah satu jalur perdagangan utama dunia. Amerika tidak akan tinggal diam jika RRC memiliki pengaruh yang lebih kuat daripada mereka.”

Kebangkitan RRC untuk menjadi salah satu negara yang kuat di tingkat regional ternyata menarik perhatian dari beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan para sekutunya. Hegemoni di kawasan ini telah dianggap sebagai salah satu langkah asertif RRC untuk merebut kembali posisinya dalam hegemoni di tingkat regional.

d) Potensi sumber daya alam di LCS

LCS menyediakan jumlah konsumsi hidrokarbon tertinggi di dunia dengan tingkat konsumsi mencapai 30% pada tahun 2035 (EIA, 2018), dan menjadi jalur lintas batu bara dari Australia dan Indonesia. FAO (2011) mengungkapkan besarnya potensi perikanan di LCS telah membuat ekspansi besar-besaran industri perikanan RRC, menyebabkan kemajuan yang pesat selama 20 tahun terakhir.

Jumlah potensi blok minyak di LCS diperkirakan mencapai sekitar 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam dan 11 miliar barel minyak, sesuatu yang menarik untuk diperebutkan. Meskipun dalam praktiknya, Metelitsa & Kupfer (2014) percaya jika nilai perdagangan global di wilayah itu lebih menjanjikan dari potensi pertambangan yang ada. Nilai-nilai berharga inilah yang mendorong para claimant states untuk tetap mempertahankan klaim kedaulatannya atas LCS (Putri, 2019: 31). Peta berikut akan memberikan gambaran mengenai distribusi blok minyak dan gas di wilayah Laut Cina Selatan.



Gambar 4.29 Pengembangan dan Eksplorasi Energi di LCS
Sumber: Asia Maritime Transparency Initiative, CSIS (2021)

2) Pengetahuan Mengenai Ancaman

Jenis ancaman yang mengintai di wilayah LCS diantaranya adalah ancaman militer, IUU fishing, perang terbuka, konflik transnasional. Beberapa negara di ASEAN bahkan telah menyatakan sikapnya mengenai aksi meresahkan yang dilakukan RRC di sekitar perairan LCS, beberapa kasus yang muncul ke permukaan diantaranya menyeret banyak aktor dari luar. Kasus tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) Surat protes RRC mengenai pengeboran migas yang dilakukan oleh Indonesia di Blok Natuna pada Bulan Agustus dan September 2021, dan nota keberatan mereka karena TNI mengadakan latihan militer dengan USA (BBC, 2021). Hal ini jelas menimbulkan beragam pertanyaan dan kemarahan dari berbagai pihak di tanah air. RRC menganggap Indonesia telah melanggar klaim *nine dash line* mereka, padahal di sisi lain kita sudah mematuhi semua peraturan berdasarkan UNCLOS
- b) Pembelian rudal BrahMos yang dilakukan oleh Filipina untuk menjaga kedaulatannya di perairan barat Filipina (Januari

- 2022). Filipina dan RRC sering terlibat dalam pertikaian di Laut Cina Selatan.
- c) Tiongkok mengumumkan rencana Marine Security Belt 2022 bersama Iran dan Rusia dan membuat beberapa pihak *showing the flags* di LCS (2022). Kegiatan unjuk kekuatan ini juga sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.
 - d) Nota protes Malaysia atas aktivitas ilegal dari kapal-kapal RRC yang memasuki wilayah perairan mereka (Oktober 2021).
 - e) Bersitegangnya Malaysia dengan RRC terkait jet tempur, batas maritim, dan sejenisnya.
 - f) Gesekan antara RRC dan Vietnam, hingga perang *statement* terkait aktivitas RRC di LCS.

Dinamika konflik dan ancaman berjalan sangat dinamis, masing-masing aktor harus menyiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk. Meskipun begitu dalam suatu kesempatan, dikutip oleh CNBC Internasional (Sorongan, 2021), Xi Jinping memberi pesan kepada ASEAN bahwa:

“RRC dengan tegas menentang hegemonisme dan politik kekuasaan, dan ingin menjaga hubungan persahabatan dengan tetangganya. RRC ingin bersama-sama memelihara perdamaian di kawasan dan sama sekali tidak berniat untuk mencari hegemoni atau menggertak yang kecil”

Di sisi lain, Indonesia saat ini menyadari bahwa kawasan LCS bisa menjadi bom waktu yang setiap saat akan meledak. Namun secara praktis, kita selalu berusaha mendorong perdamaian dan stabilitas. Direktorat Strategi dan Kebijakan BAKAMLA RI mengatakan bahwa:

“Laut Natuna Utara saat ini secara umum dalam kondisi yang kondusif, aman, dan terkendali. Meskipun masih ada sengketa

batas maritim antara Indonesia dan Vietnam, pelanggaran batas sudah bisa ditangani secara diplomatis.”

Secara umum, beberapa ancaman di Laut Natuna Utara muncul ketika: (1) Ada entitas kapal penegak hukum asing yang berlayar di perairan itu, contohnya adalah kapal-kapal RRC. Hal ini sebenarnya masih bisa kita kaji dari sudut pandang hukum hak lintas kapal. (2) Penangkapan ikan illegal oleh nelayan-nelayan Vietnam. Tidak terlalu salah, karena dua negara ini memang masih memiliki tumpang tindih klaim. (3) Ada kapal penelitian yang melintas secara anomali di wilayah tersebut.

Dalam ranah global, kehadiran QUAD dan AUKUS bisa meningkatkan eskalasi dan efek destruktif lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ade Padmo Sarwono, yakni:

“Keberadaan QUAD dan AUKUS akan berpotensi untuk meningkatkan eskalasi. Dalam hal ini, ASEAN selalu berusaha untuk mengingatkan negara-negara yang terkait seperti Australia dan Amerika untuk lebih bersabar terhadap pergerakan RRC.”

Di tingkat global, Amerika tidak segan-segan untuk membawa sekutunya di NATO. Kedatangan kapal induk Inggris HMS Queen Elizabeth yang melewati LCS (pada Juli 2021) dan kapal fregat Jerman Bayern yang berlayar bebas di LCS (pada Agustus 2021) menandakan keseriusan Amerika untuk memberi pelajaran kepada RRC. Padahal kita semua tahu bahwa konflik tidak akan pernah selesai jika masing-masing pihak tidak memiliki keinginan yang kuat untuk mengendalikan diri.

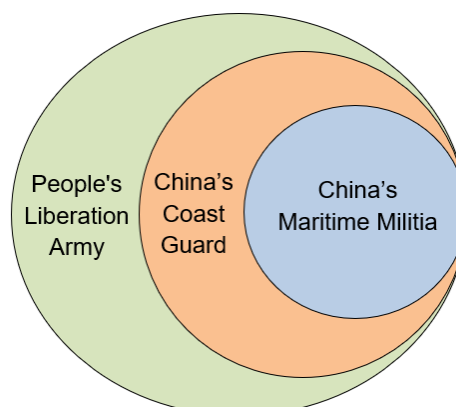
3) Isu dan Tren Konflik

Menurut Staf Ahli Bidang Hukum Laut KEMENKOMARVES, 3 aktor utama dalam konflik ini, yaitu: (1) Negara yang memiliki teritorial di wilayah LCS. (2) Negara yang hanya memperjuangkan wilayah ZEE (seperti Indonesia, kita hanya bersinggungan di ZEEI.

(3) Negara yang tidak memiliki klaim namun terlibat aktif dalam konflik, mereka biasanya adalah para pengguna laut untuk bernavigasi di wilayah ini. RRC berusaha untuk mengklaim wilayah ZEE dari pulau-pulau kecil yang ada di LCS, secara hukum mereka tidak boleh menarik garis seluas itu.

Untuk menganalisis kondisi faktual di lapangan, kita bisa mengamati perilaku beberapa aktor yang berpotensi untuk meningkatkan eskalasi di LCS. Pertama, Republik Rakyat Cina. Kebangkitan kekuatan maritim RRC dianggap telah memantik dan turut serta meningkatkan eskalasi konflik di wilayah ini. Pergeseran geostrategi RRC dari kontinental ke maritime power telah mencuri perhatian dunia sejak beberapa dekade terakhir. Sea power telah ditetapkan sebagai identitas dan budaya strategis RRC (Nohara, 2017: 202).

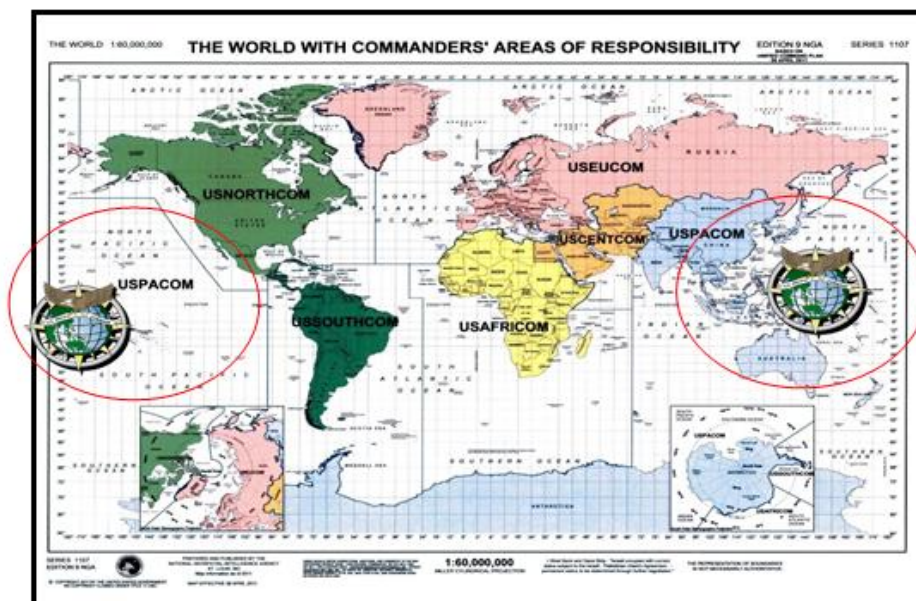
Holmes & Yoshihara (2005: 24) menyebut RRC sebagai Mahanian dan perebutan sea power dilakukan seperti memainkan wei-chi (Capen, 1999: 60). Sengketa diselesaikan dengan mempertimbangkan keuntungan strategis yang akan didapat. Instrumen kekuatan maritim yang diakselerasi adalah People's Liberation Army (PLA), RRC Coast Guard (CCG), RRC's Maritime Militia (CMM, sebagai kekuatan maritim ke-3 milik RRC), pelaut sipil, dll. Perhatikan skema berikut.



Gambar 4.30 Tiga Komponen Penting Armada Maritim RRC

Ambisi maritim RRC meliputi sektor ekonomi, sosial budaya, politik, dan militer. RRC berusaha untuk mengambil alih dukungan di Asia Timur dengan mendistraksi momen unipolar yang dikuasai Amerika (Krauthammer, 2014), sehingga dalam perencanaannya BRI akan mencakup 2/3 populasi dan 3/4 sumber energi global (Rahman, 2019). Fakta ini memberi alasan lain terhadap proses kebangkitan kekuatan laut RRC di masa kontemporer. Beberapa ilmuwan percaya, jika RRC sedang berusaha untuk mengembalikan kejayaan maritim dalam bentuk proyeksi sea power mereka di masa lalu (Sun, 2010).

Kedua, Amerika Serikat. Amerika berupaya hadir sebagai balance of power di LCS, dan containment strategy berpusat pada isu hegemoni. Pentagon telah merespons tindakan ofensif Beijing dengan memposisikan kembali pasukannya di Indo-Pasifik dan memperkuat hubungan keamanan dengan ASEAN. Amerika melakukan perubahan nama dan perluasan AOR dari USINDOPACOM (Sumakul, 2020), memberi akses untuk lebih leluasa mengawasi area ini. Pentagon menetapkan standing point-nya terhadap sengketa di LCS dengan menggalakkan FONOPs (Freedom of Navigation Operations). Untuk melihat persebaran kombatan Amerika Serikat di seluruh dunia, perhatikan peta berikut.



Gambar 4.31 Kombatannya Amerika di Seluruh Dunia

FONPS merupakan national interest yang terdokumentasi dan disetujui oleh United States House of Representatives (DPR-nya Amerika Serikat). Meski tidak meratifikasi UNCLOS, Amerika telah menganggap LCS sebagai laut lepas yang tidak berhak dimiliki oleh RRC. Klaim Beijing dinilai telah mengganggu freedom of navigation dan kepentingan Amerika. Untuk menurunkan langkah ofensif RRC, Amerika menggolongkan kekuatan NATO untuk sesekali memberi efek deterrence dan menunjukkan solidaritas mereka atas campur tangan Pentagon. Sebagai 'mandala', efek deterrence dimunculkan untuk 'mengingat' RRC tentang pengaruh NATO terhadap kestabilan geopolitik secara global.

Amerika juga aktif menggolongkan kekuatan di kawasan dengan mendirikan aliansi Quad yang dipeloporinya bersama India, Jepang, dan Australia. Mereka bahkan membentuk aliansi keamanan trilateral baru Bersama Inggris dan Australia pada tahun 2021 lalu.

Ketiga, QUAD. Quad dianggap sebagai representasi dari mini NATO di kawasan Indo-Pasifik (Zhen, 2021). Pentagon mengelak

jika Quad diartikan sebagai sebuah aliansi militer atau pakta pertahanan untuk menggantikan SEATO, namun mereka juga tidak menampik jika masing-masing anggota Quad memiliki alasan personal untuk melawan Beijing secara agresif di masa depan. Setelah 10 tahun absen, Quad kembali melanjutkan dialog mereka pada akhir tahun 2017 (J. Smith, 2020). Ketika membahas pandemi tahun 2020 lalu, secara mengejutkan Quad mengajak Korsel, Vietnam dan New Zealand untuk bergabung di Quad+.

Setelah pandemi, Quad 2.0 atau NATO Asia (Rai, 2018) diprediksi akan melanjutkan kerja sama mereka di tatanan sektoral lainnya seperti perlawanan politik internal, Respons krisis, bantuan kemanusiaan dan bencana, bahkan untuk memperluas jangkauan soft power mereka di kawasan Indo-Pasifik. Jika belajar dari sejarah, pergerakan 'kecil' seperti ini bisa saja membawa dampak yang lebih besar pada keamanan dan stabilitas regional di masa yang akan datang. Quad bisa saja menggantikan peran SEATO untuk mewakili NATO di belahan bumi selatan, mengurus permasalahan di area Semenanjung Korea, dan LCS sebagai mandala perang NATO selain Eropa dan wilayah Arktik.

Keempat, AUKUS. AUKUS adalah sebuah pakta atau kerjasama militer yang dilakukan oleh USA, Inggris, dan Australia untuk meredam kekuatan RRC di LCS. Fefen Zamzari mengatakan:

“QUAD hanya berguna sebagai ranah diplomasi (keamanan), sedangkan AUKUS memang militer (pertahanan). Secara geopolitik, keberadaan keduanya akan mendorong proses perlombaan senjata. Justru RRC yang akan diuntungkan karena mereka selalu bermain peran sebagai korban (playing victim). Hal ini juga lah yang mendorong RRC untuk melakukan pembangunan instalasi militer pada fitur-fitur lain di LCS.”

Dalam hal ini, ASEAN dianggap tidak memiliki pernyataan kolektif yang harus dikeluarkan. Masing-masing negara anggota

ASEAN berhak untuk mengeluarkan pernyataan berdasarkan kepentingan politik dan keyakinan dirinya. Duta Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk ASEAN, mengatakan:

“ASEAN tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan pernyataan kolektif, namun ASEAN senantiasa mengingatkan para anggota bahwa netralitas itu penting. Semua dikembalikan lagi kepada mereka, sesuai dengan kepentingan nasionalnya masing-masing. Keberadaan QUAD dan AUKUS tentu meningkatkan eskalasi, dan ASEAN juga berusaha untuk mengingatkan negara-negara yang terkait seperti Australia, US, dan lain sebagainya.”

Dampak negatif lainnya dari keberadaan QUAD atau AUKUS adalah menurunnya tingkat kepercayaan dari pihak-pihak yang bersengketa, sehingga proses kerjasama akan berjalan lebih alot dan sulit. Jika tidak ada rasa saling percaya, maka penyelesaian isu-isu strategis seperti COC dan DOC akan terhambat. ASEAN tidak membuat pernyataan apapun, namun setiap negara melalui menteri atau dirjennya langsung mengadakan presscon untuk mengutarakan pernyataan sikap mereka mengenai hal ini, terutama isu AUKUS.

Kelima, NATO. Ketika para pemimpin NATO berkumpul di London pada Desember 2019, Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg berulang kali menyerukan perlunya aliansi untuk beradaptasi dengan tantangan baru bagi NATO: RRC. Dalam kesempatan lain, sekutu membahas RRC dalam deklarasi NATO dengan narasi:

“Pengaruh RRC yang tumbuh menghadirkan peluang dan tantangan yang perlu kita tangani bersama sebagai Aliansi.”

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran yang meningkat di antara sekutu tentang implikasi kegiatan RRC terhadap keamanan transatlantik. Baru-baru ini, NATO secara aktif

'turun gunung' dan melakukan ajang pameran kekuatan di perairan Laut Cina Selatan.

4) Game Theory dalam Isu LCS

Sengketa tidak hanya menggiring potensi konflik bersenjata antara RRC dan salah satu negara tetangganya di Asia, tetapi juga mendekatkan risiko konfrontasi militer antara RRC dan Amerika. Hubungan keduanya di LCS berjalan seperti pola dalam game theory, di mana kedua pemain saling memprovokasi sampai batas mereka, dan konflik dianggap sebagai hasil terburuk yang mungkin terjadi (Hafeez, 2015; Lai, 2014; Jash, 2017).

Zagare (2011: 31) berpendapat bahwa ada banyak keuntungan menggunakan model teori permainan untuk mengembangkan narasi analitik. Game theory berfungsi sebagai mekanisme kausal yang menyediakan elemen kebutuhan yang hilang dalam sebagian besar narasi sejarah. Model teori permainan juga menawarkan lingkungan yang kaya untuk menilai secara baik konsistensi logis dari asumsi eksplisit dan kemungkinan ketergantungan asumsi ini pada proposisi tersembunyi atau sekunder. Oleh sebab itu, permainan akan mendorong penalaran kontrafaktual yang "keluar dari jalur ekuilibrium".

Dalam tesis ini, penggunaan teori permainan dimaksudkan untuk mengidentifikasi strategi maritim yang digunakan oleh Amerika dan RRC berdasarkan gambaran kejadian selama sepuluh tahun terakhir. Pada praktiknya, sengketa ini bisa dianalisis melalui permainan campuran dengan preferensi ayam dan *deadlock*.

a) Eskalasi Hubungan RRC dan Amerika

Dalam sepuluh tahun terakhir, RRC dan Amerika telah mengalami berbagai proses naik-turun hubungan diplomatik.

Menurut data The Council on Foreign Relation (2022), hubungan itu bisa dirangkum dalam *timeline* sebagai berikut.

- **Tahun 2012:** ASEAN gagal mengeluarkan komunike, Kamboja menolak pembahasan mengenai LCS. RRC meluncurkan kapal induk pertama, Liaoning, dan menarik perhatian dari Amerika.
- **Tahun 2013:** RRC mendeklarasikan Air Defense Identification Zone (ADIZ). Menteri Luar Negeri AS John Kerry segera mengeluarkan pernyataan mendesak RRC untuk “berhati-hati dan menahan diri,”
- **Tahun 2014:** Amerika melonggarkan embargo senjata di Vietnam untuk menghadapi kemampuan militer RRC yang berkembang.
- **Tahun 2015:** Angkatan Laut Amerika memulai operasi FONOPS. Duta Besar RRC untuk Amerika Serikat menyebut patroli itu sebagai “provokasi serius, secara politik dan militer.”
- **Tahun 2016:** perang RRC merebut drone bawah laut Angkatan Laut AS yang sedang mengumpulkan data ilmiah di Laut Cina Selatan. RRC sempat menolak untuk mengembalikan drone tersebut.
- **Tahun 2018:** kapal perusak AS (USS Decatur) nyaris bertabrakan dengan kapal perusak RRC (Lanzhou) di dekat Kepulauan Spratly. RRC mengutuk patroli AS sebagai ancaman terhadap kedaulatannya. Beberapa hari kemudian, Menteri Pertahanan AS Jim Mattis membatalkan perjalanannya ke Beijing.
- **Tahun 2020:** RRC lebih agresif menegaskan klaimnya di Laut Cina Selatan ketika negara-negara di kawasan itu memerangi pandemi virus corona. Menteri Luar Negeri AS

Mike Pompeo mengeluarkan pernyataan bahwa sebagian besar klaim RRC di Laut Cina Selatan melanggar hukum.

- **Tahun 2022:** Amerika dan sekutunya berlayar di LCS. Amerika membawa serta armada kapal induknya, seperti kapal perusak berpeluru kendali USS Benfold atau kapal selam pembawa rudal balistik dan hulu ledak nuklir, USS Nevada. Amerika juga aktif melempar dukungan untuk Filipina, Indonesia, dll.

b) Strategi Sub-Treshold

Strategi *sub-threshold* atau strategi zona abu-abu digambarkan sebagai strategi untuk menantang status quo tanpa memprovokasi meletusnya perang; dan digunakan untuk menggambarkan tindakan dan sarana non-perang namun bersifat konfliktual (Jackson, 2017:39; Wirtz, 2017:107). Konflik atau perang tidak pernah menjadi tujuan dari strategi sub-ambang, namun, selama agresor dan inisiator adalah negara lawan, itu tidak dianggap sebagai hasil terburuk (Eline & Eliassen, 2020: 5).

Strategi tersebut memungkinkan Cina untuk menggunakan instrumen kekuatan maritim dari militer (PLAN) dan sipil (CCG, China's Militia dan para pedagang) untuk memaksa pihak lain melakukan kehendaknya di domain maritime (Holmes & Yoshihara, 2017). Dua dari strategi sub-ambang batas yang paling umum adalah (1) taktik salami, di mana agresor secara perlahan memaksakan komitmen lawan pada "garis merah" (Wirtz, 2017:108), dan (2) penggunaan perantara, yang melibatkan mempekerjakan agen pihak ketiga, secara efektif menghindari melewati ambang konflik militer (Jackson, 2017:43).

Dalam taktik salami, RRC berusaha untuk memaksakan lawfare mereka di berbagai bidang yang berkaitan dengan isu LCS. Dibandingkan dengan pendahulunya, gagasan hukum Xi dianggap lebih menipu (Thayer & Han, 2021), mereka selalu menggunakan istilah-istilah yang sudah dikenal seperti “aturan hukum”, “berbasis hukum” atau “keadilan”. Kontrol mutlak partai atas sistem peradilan RRC adalah komponen utama dari strategi lawfare yang dilakukan oleh Xi Jinping.

Pada sengketa di perairan LCS, RRC secara jelas menggunakan lawfare untuk membela Tindakan unlawful acts yang sudah mereka lakukan di wilayah ini. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Xi Jinping bahkan selalu meneriakkan retorika mengenai “aturan hukum” tapi di sisi lain berusaha untuk menyembunyikan tuntutan hukumnya.

c) Strategi Go/Weiqi

Perubahan geostrategi Republik Rakyat Cina dari negara kontinental ke sea power state telah mencuri perhatian dunia sejak beberapa dekade terakhir. Sea power telah ditetapkan sebagai identitas dan budaya strategis Cina (Nohara, 2017: 202), sehingga strategi maritim mereka diorientasikan sebagai kebijakan negara yang mengatur pengembangan dan penggunaan sea power untuk mencapai tujuan nasional di masa damai (Martinson, 2016: 2). Menurut Holmes & Yoshihara (2005: 24), RRC adalah pengikut Mahanian. Meskipun begitu, perkembangan strategi Cina diupayakan dengan menjembatani sea power untuk melindungi hak dan kedaulatan maritim mereka di laut (Huang, 2009: 27).

Perebutan sea power akan dilakukan seperti memainkan wei-chi (Capen, 1999: 60), dan sengketa wilayah akan diselesaikan dengan mempertimbangkan keuntungan strategis

mereka terhadap national interest China. Instrumen kelautan yang diakselerasi diantaranya adalah PLA, CCG, Chinese militia, pelaut sipil, dan beberapa lembaga lainnya. Ambisi maritim mereka meliputi sektor ekonomi, sosial budaya, politik, dan militer. Strategi kemudian dimuat dalam buku putih pertahanan nasional, five-years plans, laporan kerja partai dan pemerintah, buku tahunan pemerintah, serta berbagai hukum dan peraturan tertulis lainnya.

Permainan ini merupakan representasi yang tepat dari cara RRC bertindak dalam urusan dan konflik internasional, dan memisahkan cara perang RRC dari budaya lain (Eline & Eliassen, 2020). Berbeda dengan permainan catur (dimana kekuatan tidak terdistribusi secara seimbang), weiqi memanfaatkan strategi pengepungan (ketika semua aktor memiliki kekuatan yang sama). Weiqi menitikberatkan pada proses perebutan dan manuver dalam posisi strategis.

Dalam tesis ini, jenis analisis game theory yang akan digunakan adalah tipe static prisoners' dilemma, dynamic bluff game, dan dynamic easy win game. Analisis ini memiliki kemiripan dengan penelitian terdahulu dari Andrea Eline Ringstad Eliassen (2020) yang melakukan penelitian terhadap "Maritime Strategy in Disputed Waters: A game-theoretic analysis of Chinese maritime strategy in the Senkaku/Diaoyu Islands dispute in the period 2010 to 2013". Para pemain memiliki sikap dan strategi yang mirip, terutama dalam penggunaan preferensinya dalam isu sengketa di wilayah perairan.

Static prisoners' dilemma akan digunakan untuk menganalisis pertemuan beberapa kapal perang RRC dan Amerika di perairan LCS. Dynamic bluff game akan menganalisis peran dari QUAD, NATO, dan AUKUS dalam konflik ini. Sedangkan dynamic easy win game merupakan permainan cadangan ketika Amerika tidak

memiliki dukungan dari para sekutunya (meskipun mereka ada dan melihat dari kejauhan). Dalam kasus ini, dinamika yang terjadi akan menjadi salah satu komponen penting untuk proses pengambilan keputusan bagi negara-negara yang ada di kawasan. Keamanan regional adalah tujuan semua negara, namun proses pemahaman mengenai isu konflik harus dicapai melalui metode analisis yang dilakukan secara berulang.

a) *Static Prisoners' Dilemma*

Dalam permainan dilemma tahanan, apapun yang dilakukan oleh pihak lawan, masing-masing tokoh akan memilih untuk bergerak daripada diam. Bagi Amerika Serikat, dengan dampak yang begitu besar terhadap perekonomian global, Laut Cina Selatan dianggap sebagai kepentingan nasional mereka (Kim, 2012: 26). Amerika memiliki mitra ekonomi dan keamanan yang penting di kawasan itu termasuk Jepang, Korea Selatan, Filipina, Thailand, dan Taiwan. Dalam kasus ini, mereka tidak akan menyerah begitu saja dengan aktivitas unlawful yang dilakukan RRC di perairan LCS.

Bagi RRC, Laut Cina Selatan adalah 'zona perang' yang akan dibela habis-habisan. Oleh karena itu, wilayah ini telah dijaga dengan asertif oleh pasukan militernya (Klare, 2017). Secara historis, mereka juga telah melakukan berbagai manuver terhadap beberapa fitur yang ada di perairan yang kaya ini. Sebagai gambaran, perhatikan Tabel berikut ini.

Tabel 4.10 Jumlah Klaim di LCS

Negara	Kepulauan Paracel (diklaim)	Kepulauan Paracel (dikontrol)	Kepulauan Spartly (diklaim)	Kepulauan Spartly (diokupasi)
Vietnam	Semua	Tidak ada	Semua	29
RRC	Semua	Semua	Semua	7

Negara	Kepulauan Paracel (diklaim)	Kepulauan Paracel (dikontrol)	Kepulauan Spartly (diklaim)	Kepulauan Spartly (diokupasi)
Taiwan	Semua	Semua	Semua	2
Filipina	Tidak ada	Tidak ada	60	8
Malaysia	Tidak ada	Tidak ada	12	4
Brunei	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Kim (2012: 26)

Berdasarkan Tabel tersebut, ada banyak fitur yang berusaha 'diselamatkan' oleh Pemerintah RRC. Dalam permainan dilemma tahanan, kedua pemain akan lebih memilih hasil dengan gerakan altruistik (mengorbankan diri sendiri) dan maju menghadapi semua tantangan. Mereka akan cenderung menghindari pergerakan egois (zona aman).

Tabel 4.11 Analisis Dilema Tahanan

RRC	Amerika Serikat	
	Maju	Mundur
	Maju	2,2*
Mundur	1,4	3,3

Berdasarkan Tabel di atas, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah sebagai berikut.

RRC:

- 4 – RRC maju, Amerika mundur
- 3 – RRC mundur, Amerika mundur
- 2 – RRC maju, Amerika maju
- 1 – RRC mundur, Amerika mundur

Amerika:

- 4 – Amerika maju, RRC mundur
- 3 – Amerika mundur, RRC mundur
- 2 – Amerika maju, RRC maju
- 1 – Amerika mundur, RRC mundur

Dalam permainan ini, permainan dirancang sebagai gim dua pemain statis di mana para pemain memiliki opsi yang sama dan membuat keputusan secara bersamaan (Eline & Eliassen, 2020). Hasil terbaik untuk RRC dan Amerika adalah kondisi ketika mereka maju sementara yang lain mundur. Hasil ini menunjukkan jika salah satu dari mereka meninggalkan perairan LCS secara permanen, maka pihak yang tertinggal akan diberi kebebasan untuk melakukan apapun yang sudah menjadi tuntutannya. Ini adalah hasil yang paling menguntungkan untuk para pemenang.

Dalam hal ini, RRC menginginkan pengukuhan atas klaim maritimnya di LCS, sedangkan Amerika menginginkan LCS untuk terbebas dari cengkeraman RRC dan menjadi perairan yang bebas untuk dilewati FONOP (disisi lain juga mengharapkan pengaruh RRC yang melemah di kawasan).

Poin mundur-mundur (3,3) akan diberi penilaian yang tinggi karena secara alamiah tidak ada negara yang ingin hancur dalam pertempuran manapun. Tindakan mereka akan dianggap sebagai perilaku yang rasional, keduanya membelot atau mundur dan mendapat hadiah yang lebih baik melalui status quo. Proses ini akan dimulai dengan mengurangi konfrontasi dan tindakan provokatif lainnya. Perjanjian damai seperti ini biasanya hanya terjadi secara temporer, kita bisa lihat kasus yang pernah terjadi kepada RRC dan Vietnam sebelas tahun lalu (VOA Indonesia, 2011), yang menandatangani perjanjian damai namun tetap bersengketa sampai saat ini. Hal ini menunjukkan jika dinamika geopolitik global akan bergerak dengan sangat dinamis, tidak ada lawan dan kawan yang pasti.

Hasil terburuk akan didapat ketika pemain memutuskan untuk mundur dan menarik diri dari setiap urusan di LCS. Hal ini

memiliki peluang yang lebih kecil untuk dilakukan karena baik RRC atau USA, akan berusaha untuk menyelamatkan reputasinya dengan merespons sampai akhir. Keseimbangan Nash akan terjadi di posisi (2,2) ketika semua pihak tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Mereka akan mengerahkan semua kemampuannya untuk memenangkan kepentingan nasionalnya di wilayah ini. Keputusan ini akan dianggap sebagai solusi permainan.

Pada praktinya, (3,3) bukan pareto optimal karena ketika salah satu pemain mengetahui rencana lawan untuk mundur, maka dia akan berusaha untuk melakukan hal yang sebaliknya. Dalam hal ini, pareto optimal didefinisikan sebagai situasi ketika negara sudah tidak mungkin lagi mengubah alokasi sumber daya untuk mencapai kemenangan (*better off*) tanpa mengorbankan komponen lain (*worse off*).

b) *Dynamic Bluff Game*

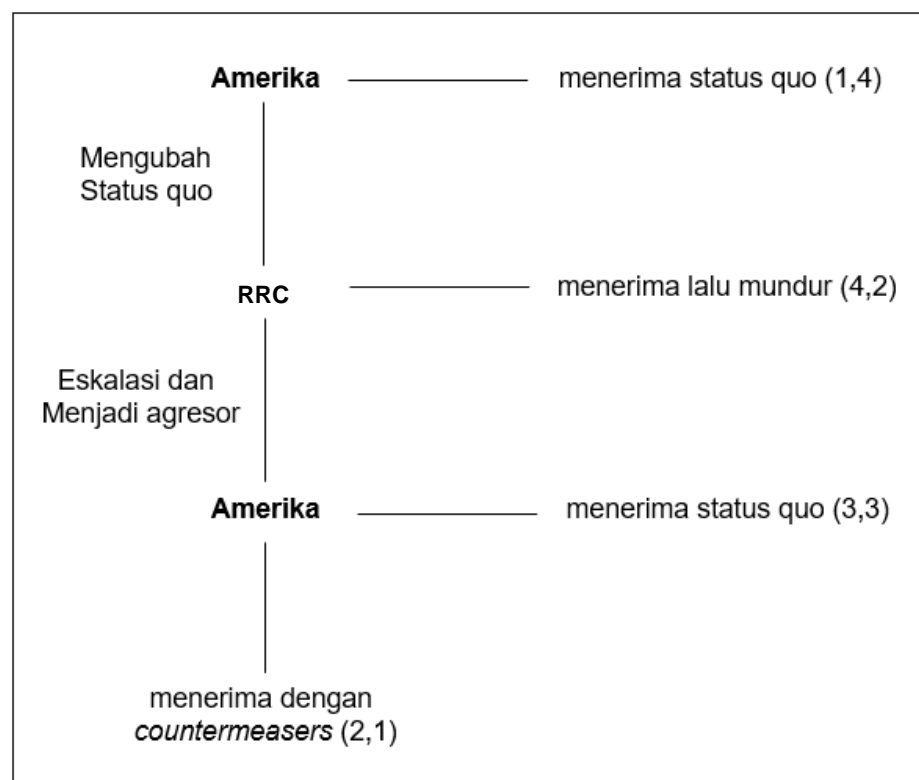
Pada game ini kedua pemain memiliki strategi dan preferensi permainan yang asimetris (Eline & Eliassen, 2020). Dalam hal ini, RRC dianggap sebagai pemain minor karena jika dibandingkan dengan Amerika, mereka tidak memiliki kawan yang cukup untuk menghancurkan Amerika sampai benar-benar kalah. Bagi Amerika, mundur dari LCS hanya akan menghilangkan wibawa sebagai salah satu super power state terkuat di dunia. Mereka bahkan aktif menyuarakan dukungan untuk negara-negara yang ada di kawasan tersebut (Smith, 2021).

RRC akan bermain seperti tokoh dalam permainan ayam, dia tidak akan rela untuk melepaskan berbagai potensi menggiurkan di perairan LCS. Mereka bahkan telah membangun banyak fitur yang berharga. Dalam sebuah

kesempatan, Wu Sichun dari Institut Nasional untuk Studi Laut Cina Selatan mengatakan bahwa:

“RRC tidak akan mundur. Jika diprovokasi, Cina tidak akan diam saja. RRC memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan balasan.”

Bagi Presiden Xi Jinping, mundur bukanlah pilihan. Para ahli di RRC mengatakan sentimen nasionalistik di antara 1,4 miliar warga RRC terhadap kawasan itu lebih besar daripada klaim teritorial lainnya di kawasan Hong Kong dan Taiwan. Sikap dua pemain yang berlawanan membuat permainan menjadi semakin dinamis. Eskalasi akan naik dan turun tergantung kepada strategi dan pergerakan dari setiap aktor yang ada di kawasan. Perhatikan gambar di bawah ini.



Gambar 4.32 Dynamic Bluff Game RRC VS Amerika

Berdasarkan gambar di atas, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah sebagai berikut.

Amerika:

- 4 – Amerika mengubah Status Quo, RRC menerima dan mundur
- 3 – Amerika mengubah Status Quo, RRC meningkatkan eskalasi lalu Amerika memilih untuk countermeasure dibantu NATO dan AUKUS (jika diperlukan)
- 2 – Amerika berusaha untuk mengubah Status Quo, RRC eskalasi dan berusaha untuk menanggulangi Amerika
- 1 – Amerika menerima Status Quo dan tidak bereaksi

RRC:

- 4 – Amerika menerima Status Quo dan tidak bereaksi
- 3 – Amerika mencoba untuk mengubah Status Quo, RRC meningkatkan eskalasi lalu Amerika mundur
- 2 – Amerika mencoba mengubah Status Quo, RRC menerima lalu memilih untuk mundur
- 1 – Amerika mencoba mengubah Status Quo, RRC meningkatkan eskalasi dan Amerika menyiapkan tindakan balasan dengan memanggil QUAD, NATO, India, dan AUKUS

Dalam permainan ini, Amerika bertindak pertama sebagai reaksi atas Tindakan agresif RRC di LCS selama pandemi. Amerika memiliki dua pilihan, untuk (1) tidak terpengaruh dan menerima status quo, atau (2) mencoba mengubah status quo dengan mengaplikasikan fait accompli. Dalam permainan ini, QUAD, NATO, dan AUKUS akan dipandang sebagai pemain yang stabil. Mereka akan stand by dan menunggu aba-aba dari Amerika untuk membantu Pentagon di situasi mendesak.

Untuk menurunkan langkah ofensif Cina di wilayah LCS, Amerika memang menggalang kekuatan NATO untuk sesekali

memberi efek deterrence dan menunjukkan solidaritas mereka atas campur tangan Pentagon. LCS digadang-gadang memiliki potensi untuk menjadi mandala perang selanjutnya, sehingga efek deterrence dimunculkan untuk 'mengingat' China tentang pengaruh NATO terhadap kestabilan geopolitik di dunia. Selain itu, Amerika juga bisa mendorong India untuk turut serta sebagai elemen dinamis dalam konflik ini.

Dalam perspektif ini, setelah Amerika membuat pilihan, RRC akan disodorkan kepada dua pilihan, yakni (1) menerima tindakan Amerika, mengubah status quo, lalu mundur, atau (2) meningkatkan eskalasi, menghadapi Amerika, dan berubah menjadi seorang agresor. Amerika memiliki pilihan terakhir untuk (1) menerima status quo dan mundur, atau (2) mengatasi eskalasi yang sudah diciptakan oleh RRC. Ini adalah hasil konflik, dimana perang atau konflik terbuka adalah satu-satunya solusi yang tersisa. Solusi yang sangat tidak diharapkan oleh semua pihak, namun kadangkali tidak bisa dihindari. Memecah perang sama saja dengan mengantarkan dunia ke dalam perang nuklir (Jakobsen, 2002), kejahatan yang akan tercatat abadi dalam lembar sejarah umat manusia.

Permainan bluff mendorong hasil terbaik dimana salah satu pemain memilih untuk menerima lalu mundur. Pilihan kedua yang bisa diambil adalah kondisi yang dipengaruhi oleh kehadiran QUAD, NATO dan AUKUS sebagai sekutu Amerika yang setia. Kedua instansi ini dianggap sebagai elemen yang stabil. Hasil yang diciptakan dari mundurnya Amerika di LCS setelah RRC berubah menjadi aggressor adalah hasil terbaik kedua bagi para pemain. Sebagai catatan, RRC memiliki preferensi ayam sehingga tidak memiliki niat untuk mundur, tapi menganggap bahwa 'konflik terbuka' adalah hasil yang terburuk. Sedangkan Amerika menganggap bahwa 'kehilangan

muka' dalam persaingan geopolitik di kawasan ini adalah situasi yang terburuk.

Tabel 4.12 Dynamic Bluff Game dalam Keadaan Normal

	RRC	
	Menerima status quo	Eskalasi jika Amerika mengubah
Amerika	Menerima status quo	1,4
	Mengubah status quo, lalu menerima	4,2*
	Mengubah status quo lalu meneruskan	4,2*

Dalam permainan ini, keseimbangan sempurna ditandai dengan simbol (*) dan menjelaskan hasil ketika Amerika mencoba untuk mengubah Status Quo, di sisi lain RRC menerimanya lalu mundur. Dalam permainan ini, Amerika memiliki dua opsi jika RRC meningkatkan eskalasi di LCS, maka opsi terbaik yang bisa diambil adalah mundur. Namun karena Amerika memiliki strategi pembelotan dan mereka memiliki pilihan antara hasil mundur (3.3), di mana kedua pemain mendapatkan hasil terbaik kedua, atau hasil konflik (2,1) di mana RRC kalah lebih banyak dari Amerika, mereka kemungkinan besar akan memilih yang terakhir.

Dengan mengingat hal itu, akan lebih baik jika RRC memilih untuk mundur daripada meningkatkan eskalasinya di perairan LCS, karena mereka tahu strategi Amerika salah satunya adalah dengan meminta bantuan dari QUAD, NATO dan AUKUS. Dalam keadaan yang demikian, RRC akan mengambil risiko dan mendapatkan hasil terburuk mereka. Secara factual, ketiga lembaga tersebut dan para anggotanya akan berusaha

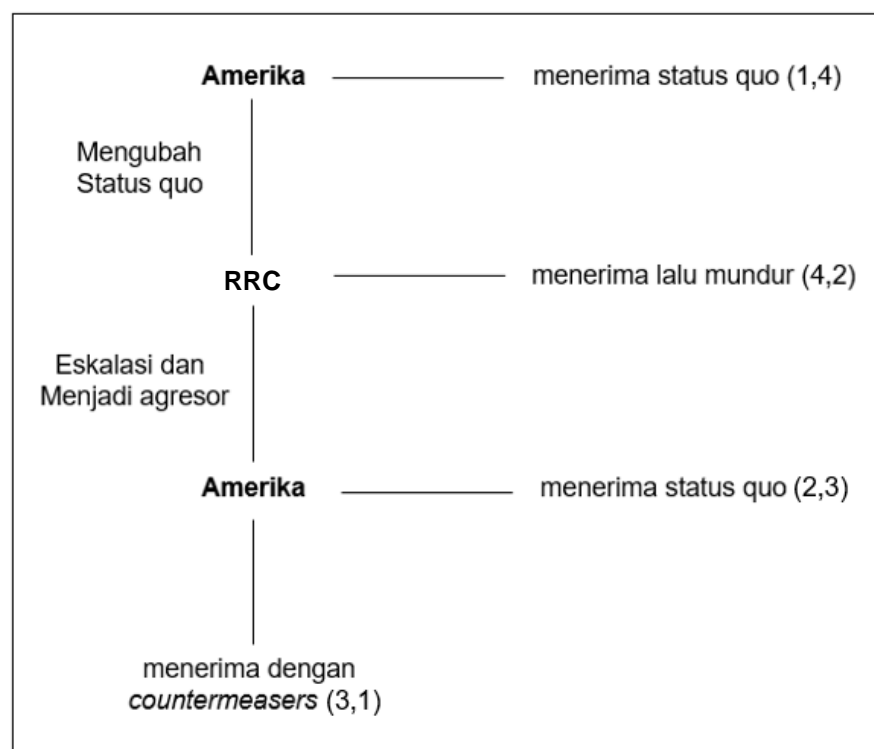
untuk menyokong Amerika karena terikat oleh ikatan pakta atau hubungan persekutuan lainnya. Oleh karena itu solusi permainan yang paling tepat adalah Amerika mengambil Tindakan untuk mengubah Status Quo, lalu RRC harus menerimanya dengan tenang berdasarkan pertimbangan bahwa Amerika kemungkinan besar akan melakukan tindakan balasan dan RRC kalah.

c) *Dynamic Easy Win Game*

Dalam permainan ini, preferensi akan dipandang secara asimetris. Dalam hal ini, QUAD, NATO dan AUKUS akan dianggap sebagai elemen yang tidak stabil dalam pencaturan politik di LCS. Mereka bisa saja meninggalkan Amerika dan angkat tangan terhadap pergerakan Amerika di perairan LCS. Pada kenyataannya, situasi ini adalah kondisi yang (hampir) tidak mungkin terjadi, mengingat kerjasama pertahanan ini sudah terjadi selama 73 tahun. Namun tidak pernah ada komitmen politik yang bisa dipegang 100%, setiap negara sudah dalam kondisi rasional akan lebih mengutamakan kepentingan nasional mereka dibandingkan hubungan luar negeri lainnya.

RRC bisa memainkan strateginya, dia masih memiliki potensi untuk mendekati dan mengubah keputusan dari negara-negara QUAD, NATO, AUKUS, atau para sekutu Amerika di kawasan. RRC juga bisa menggalang kekuatan tambahan dari negara-negara kecil dan berkembang, atau menggandeng lawan-lawan politik Amerika di kancah global. Dalam hal ini, Amerika memiliki preferensi game Deadlock, sedangkan RRC menyimpan preferensi game Chicken mereka dari permainan sebelumnya.

Preferensi permainan deadlock memiliki strategi pembelotan yang dominan, seperti preferensi Dilema Tahanan. Namun dalam permainan Deadlock yang khas, hasil 'konflik' adalah keseimbangan Nash yang optimal dan berperingkat lebih tinggi untuk muncul dibandingkan pada permainan Dilema Tahanan (Eline & Eliassen, 2020: 16). Dalam skema yang demikian, potensi kedua pemain untuk memenangkan permainan menjadi lebih tinggi sehingga dinamakan sebagai permainan Easy Win. Perhatikan gambar berikut.



Gambar 4.33 Easy Win Game RRC VS Amerika

Permainan ini memiliki preferensi yang sama dengan permainan kedua, hanya bagi Amerika hasil 'konflik' adalah keputusan terbaik kedua karena NATO dan AUKUS dianggap sebagai elemen yang tidak stabil. Jika keduanya berkonflik secara bilateral, maka RRC memiliki potensi yang lebih besar (rasional) untuk menang jika mereka mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk berkonflik.

Amerika:

- 4 – Amerika mengubah Status Quo, RRC menerima dan mundur
- 3 – Amerika mencoba mengubah Status Quo, RRC meningkatkan eskalasi, dan Amerika menyiapkan tindakan balasan tanpa bantuan NATO dan AUKUS
- 2 – Amerika mencoba mengubah Status Quo, RRC meningkatkan eskalasi dan Amerika mundur
- 1 – Amerika menerima Status Quo dan tidak bereaksi

RRC:

- 4 – Amerika menerima Status Quo dan tidak bereaksi
- 3 – Amerika mencoba mengubah Status Quo, RRC meningkatkan eskalasi, Amerika memilih mundur
- 2 – Amerika mengubah Status Quo, RRC menerima dan mundur
- 1 – Amerika mencoba mengubah Status Quo, RRC meningkatkan eskalasi, Amerika menyiapkan tindakan balasan tanpa bantuan dari QUAD, NATO, India, dan AUKUS.

Dalam bentuk normal, permainan easy win game akan digambarkan dalam sebuah Tabel sederhana. Perhatikan skema atau gambar berikut berikut.

Tabel 4.13 Easy Win Game dalam Keadaan Normal

	RRC		
		Menerima jika Amerika mengubah	Eskalasi jika Amerika mengubah
Amerika	Menerima status quo	1,4	1,4
	Mengubah status quo, lalu menerima	4,2*	2,3
	Mengubah status quo lalu meneruskan	4,2*	3,1

Dalam permainan ini, keseimbangan sempurna subgame akan menjadi hasil di mana Amerika mencoba untuk mengubah Status Quo dan RRC menerima lalu mundur (4,2). Alasannya karena pilihan terbaik bagi Amerika jika RRC melakukan eskalasi adalah melakukan countermeasure (meskipun tanpa bantuan QUAD, NATO atau AUKUS), yang merupakan hasil terburuk bagi RRC. Jadi masuk akal bagi RRC untuk tidak meningkatkan hotspot di kawasan ini, dengan asumsi Amerika akan mengatasi dan mencapai preferensi terbaik berikutnya.

Solusi terbaik yang ditawarkan oleh permainan ini adalah sebagai berikut. Bagi Amerika, mengubah Status Quo. Sedangkan bagi RRC, menerima status quo lalu mundur. Keseimbangan sempurna dari permainan ini juga dianggap sebagai kondisi pareto optimal karena tidak ada pilihan lain yang lebih baik untuk satu pemain tanpa menjadi lebih buruk bagi pemain lain.

Bagi ASEAN, status quo bisa menjadi solusi terbaik ketika ASEAN tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi Amerika dan Cina secara fisik. Amerika secara jelas tidak

terlibat dalam sengketa, namun menganggap tindakan RRC di Laut Cina Selatan telah dilakukan untuk mengubah status quo dan meningkatkan ketegangan regional. Keadaan ini menciptakan instabilitas dan memberi efek domino pada dinamika perekonomian global. Memang terbilang wajar jika mengingat kondisi geostrategi kawasan LCS sebagai salah satu jalur terpadat di dunia.

Untuk menanggapi, Amerika melakukan pendekatan perimbangan (rebalancing). Sesuai dengan teori deterrence, perimbangan kekuatan dan distribusi kekuatan yang merata di antara aktor di kawasan merupakan kondisi yang ideal untuk menjaga strategi keseimbangan dan status quo (Sridharan, 2007). Status quo akan terpelihara karena tidak ada negara yang memiliki kapabilitas untuk mengubah situasi secara drastis karena kekuatan aktor yang merata. Begitu juga sebaliknya, jika sistem deterrence tidak stabil, krisis atau perang sangat mungkin terjadi.

Keterlibatan Amerika sebagai penyeimbang kekuatan di kawasan sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi mata uang. Pertama, Amerika akan membuat kemungkinan perang atau konflik terbuka di LCS menjadi berkurang. Hal ini didasarkan pendapat bahwa perimbangan kekuatan AS terhadap RRC tidak berujung pada krisis atau konflik terbuka di lapangan karena AS memiliki relasi perdagangan yang saling menguntungkan dengan Cina. AS juga melihat kawasan LCS yang damai dan stabil merupakan prioritas penting untuk keamanan nasional AS. Strategi tersebut menghasilkan situasi deterrence di kawasan yang memelihara status quo dalam sengketa LCS.

Kedua, keberadaan Amerika bisa dianggap sebagai ancaman dan mendorong RRC untuk menaikkan bendera

perang. Dengan mengubah USPACOM menjadi USINDOPACOM, Amerika berusaha untuk meletakkan Indo-Pasifik di atas kepentingan status quo, serta memberikan praktik kekeluasaan bagi hegemoni mereka disana. Turunnya NATO dan sekutu mereka di LCS bahkan menjadi salah satu alasan baru untuk peningkatan agresivitas Cina di kawasan ini. Baik AS maupun China saling menyatakan tindakan rivalnya tersebut sebagai tindakan provokasi yang justru akan memicu konflik yang lebih besar.

Menurut Moeldoko (2021) dalam sebuah webinar geopolitik yang diselenggarakan oleh LIPI, konstruksi sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan memiliki kemiripan dengan konstruksi para perang dunia kedua. Secara historical, perang dunia ke-II dimulai dengan kegaduhan yang terjadi di Jerman. Penduduk Jerman yang merasa terhina dan menderita dengan isi perjanjian Versailles ketika itu, dimanfaatkan oleh Hittler untuk upaya rekonstruksi militer dan pembalasan dendam sebagai 'kaum arya' di tanah Eropa. Perang kemudian pecah karena didukung juga oleh proses invasi Jepang ke Cina, invasi Italia ke Ethiopia, invasi Jerman ke Polandia, dan serangan di Pearl Harbour.

Sedangkan dalam konflik Laut Cina Selatan, Thrump yang sebelumnya menjabat telah berupaya untuk memanfaatkan sentimen negatif penduduk Amerika mengenai covid, perlombaan teknologi, dan defisit perdagangan dengan RRC. Kemarahan mereka juga didukung oleh krisis ekonomi dan pengangguran, pengelolaan sospol yang kurang baik, dan intrik dalam negeri lainnya. Thrump dianggap memanfaatkan kondisi psikologi rakyat untuk membangun kebencian ke negara lain, membuat tuntutan tidak masuk akal, dan mengancam untuk memantik perang. Namun Moeldoko memprediksi jika di akhir

konflik, LCS hanya akan menjadi kampanye militer Amerika dan teater China untuk menunjukkan postur pertahanan dan memberi efek deterrence kepada dunia.

Terlepas dari spekulasi tersebut, keamanan maritim di Laut Cina Selatan merupakan kewajiban yang dipenuhi oleh setiap negara. Negara-negara di ASEAN harus pandai membaca situasi dan mengambil tindakan preventif yang agresif untuk menegaskan posisi dan otoritasnya terhadap sistem keamanan di kawasan. Sebagai jalur laut penting transportasi laut di kawasan Asia Timur, LCS seharusnya terhindar dari masalah keselamatan navigasi, kejahatan transnasional seperti pembajakan laut dan terorisme maritim, serta konflik atau sengketa apapun (Wu & Zou, 2010).

5) Arsitektur Keamanan Ideal

Pada praktiknya, upaya penyelesaian sengketa di LCS sudah seyogyanya digunakan untuk mencapai arsitektur ideal yang ditandai ciri-ciri sebagai berikut.

- a) Berangkat dari pemahaman yang baik mengenai wilayah yang disengketakan (Bueger, 2019: 3).
- b) Menyusun keamanan kooperatif dan hanya bisa tercapai ketika semua aktor berupaya untuk meredakan konflik dan ketegangan regional (Tapia, 2021).
- c) Terfokus pada upaya-upaya untuk menekan persaingan intra-regional dan intervensi asing (Khatibzadeh, 2020),
- d) Memungkinkan dialog yang tulus antar aktor regional, serta mengatasi sentimen negatif dan kecurigaan (Tapia, 2021).
- e) Mempromosikan perdamaian di kawasan, menurunkan perang dingin, dan mengembalikan status quo (Mearsheimer, 2016).

Hal ini sesuai dengan pernyataan Surya Wiranto bahwa arsitektur harus berawal dari pengetahuan negara mengenai isu yang sedang disengketakan. Dosen sekaligus peneliti di IKAL Strategic Center itu menjelaskan bahwa:

“Pengetahuan suatu negara mengenai isu ini akan tergantung kepada pemahaman mereka mengenai: (1) Instrumen hukum internasional. (2) Kepatuhan negara itu terhadap hukum tersebut. Semua negara claimant state sebenarnya sudah meratifikasi UNCLOS, hanya RRC tidak patuh dan membiarkan konflik berkembang menjadi seperti sekarang. Nine dash line bukan klaim territorial (kedaulatan) atau yuridiksi (hak berdaulat), sehingga tidak bisa dibenarkan. Masalahnya, ketika RRC memiliki knowing the sea yang bagus namun tidak menerapkannya di dalam kasus ini. Dalam situasi ideal, knowing the sea sudah seharusnya disokong dengan kegiatan implementasi yang bagus.”

Pernyataan tersebut menyadarkan kita, bahwa pengetahuan tanpa implementasi hanya omong kosong. Hal ini juga berlaku pada proses pengembangan MDA. Semua pengetahuan yang sudah dimiliki oleh negara mengenai potensi wilayah, potensi ancaman, isu dan tren konflik, serta arsitektur yang ideal harus digunakan sepenuhnya untuk mendongkrak Kerjasama MDA di tingkat regional. Senada dengan hal ini, Agus Setiadi menjelaskan jika ASEAN harus memegang kendali. Ia berpendapat:

“Arsitektur keamanan maritim di Laut Cina Selatan harus menempatkan ASEAN sebagai leading sector.”

Senada dengan hal itu, Putti Ananda Haswi, Researcher and Coordinating Officer ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia) mengatakan:

“Dalam kondisi yang ideal, seluruh negara anggota ASEAN sudah seharusnya kooperatif dalam isu maritim, saling bahu-membahu untuk menjaga perdamaian di kawasan, dan secara bersama-sama berusaha untuk menyamakan persepsi ketika menghadapi suatu isu.”

Dalam hal ini, arsitektur keamanan maritim yang ideal tidak akan mungkin tercapai jika masing-masing pihak tidak memiliki keinginan untuk bekerjasama dan menyelesaikan sengketa secara damai.

6) Pengembangan MDA Regional

Ketika merancang arsitektur keamanan di sekitar LCS, proses berbagi informasi menjadi sangat penting (Bueger, 2019: 3) karena konteks wilayah yang dijaga lebih luas dan melibatkan peran aktif dari berbagai negara. Dalam penelitiannya mengenai “Paving the Way for Regional Maritime Domain Awareness”, Antoine Jeulain (2019) mengatakan bahwa:

“To govern the sea effectively and to enforce the law requires informed knowledge of what happens at sea.”

Pada praktiknya, pengetahuan itu akan ditelurkan dalam bentuk Maritime Domain Awareness. Dalam kasus Laut Cina Selatan, MDA yang dimaksud adalah MDA di tingkat regional. MDA adalah sarana untuk mengumpulkan informasi tentang pergerakan di laut dan insiden maritim, mengumpulkan dan menggabungkan informasi dari berbagai sumber untuk mengembangkan gambaran yang dapat dibagikan dengan semua lembaga yang berhubungan dengan laut, dan juga untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat ditindaklanjuti untuk penegakan hukum.

Di tingkat regional, MDA memungkinkan negara-negara untuk berkolaborasi secara erat dan mengembangkan pemahaman bersama tentang masalah keamanan maritim regional yang

memerlukan tanggapan dan bagaimana memprioritaskannya. MDA adalah key enable, dan merupakan tantangan teknis utama dalam hal pengumpulan, penggabungan data, dan pengembangan sistem pakar untuk mendeteksi anomaly yang terjadi di laut.

Untuk mendukung MDA regional, masing-masing anggota ASEAN sudah sepatutnya memiliki pusat informasi yang bisa diintegrasikan dengan berbagai pusat informasi maritim lain yang ada di negara-negara tetangganya. Pada tahun 2009, pemerintah Singapura meluncurkan inisiatif yang signifikan untuk mewujudkan MDA regional dan global. Mereka meresmikan Pusat Penggabungan Informasi, yang dikenal sebagai IFC atau Information Fusion Center.

Pada penelitian terdahulu, pembahasan Bueger (2015) mengenai "From Dusk to Dawn? Maritime Domain Awareness in Southeast Asia" mengatakan bahwa:

"Organisasi MDA di Asia Tenggara secara umum terdiri dari tiga pusat utama yang menjadi tulang punggung struktur MDA regional. Meski jauh dari sempurna, sistem regional ini telah menjadi role model penyelenggaraan MDA di belahan dunia lain. Ketiga pusat yang sedang dibahas adalah IMB PRC, ReCAAP ISC, dan IFC"

Lebih lanjut, secara umum IMB PRC (International Maritime Bureau Piracy Reporting Centre) bertugas untuk "melaporkan", ReCAAP ISC (The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia) untuk "berbagi", sedangkan IFC (Information Fusion Center) bermaksud untuk "menyatukan" informasi mengikuti ide-ide MDA kontemporer. RRC dan ISC berfokus pada data insiden pembajakan, sementara IFC mengambil pendekatan keamanan maritim yang lebih luas.

Dalam hal ini, pusat maritim yang tepat untuk mendukung proses pembangunan MDA di kawasan adalah IFC. Secara kepemilikan, IMB adalah organisasi nirlaba dan non-governmental organization. Lembaga ini merupakan divisi khusus dari Kamar Dagang Internasional (Chamber of Commerce) yang sudah dibentuk dari tahun 1992, jadi kegiatan operasionalnya tidak dikontrol langsung oleh pemerintah. Sedangkan ReCAAP memang dibentuk untuk regional government-to-government agreement, namun instansi ini memiliki misi yang terlalu khusus sehingga tidak bisa digunakan sebagai induk atau pusat informasi yang multisektor. Untuk melihat perbedaan ketiganya, perhatikan Tabel berikut ini.

Tabel 4.14 Perbandingan IMB, ReCAAP, dan IFC

	<i>IMB PRC</i>	<i>ReCAAP ISC</i>	<i>IFC</i>
Location	Kuala Lumpur	Singapore	Singapore
Legal Status	Non-governmental organization with observer status at IMO	Multilateral agreement and MoUs	Multi-bilateral agreements and MoUs
Funding	Voluntary contributions by insurance and shipping industry	Governments (core funding by Singapore)	Singapore Government (and other participating governments)
Coverage	Global piracy	Piracy in Southeast Asia	Maritime security incidents in Southeast Asia
Main Objective	Rapid operational response	Political consent	Operational coordination
Main Network	Shipping Industry & Law Enforcement Agencies	Nominated governmental focal points (civil focus)	Cooperating national maritime security agencies (military focus)

Dalam konteks LCS, pusat maritim yang lebih cocok untuk dijadikan sebagai referensi adalah Information Fusion Centre (IFC). Dalam proses wawancara, peran fungsional dari pusat maritim itu kemudian diamini oleh Surya Wiranto, ia mengatakan bahwa:

“Upaya information sharing sudah dilakukan oleh beberapa negara ASEAN dalam berbagai isu, namun tidak semuanya. Pusat informasi milik Malaysia dan Singapura menjadi salah satu contoh referensi yang baik. Hasil data akan didistribusikan untuk kegiatan multilateralisme yang lainnya.”

Pada praktiknya, proses berbagi informasi memang sudah seharusnya dijadikan sebagai barang publik untuk mencapai sea control yang dikendalikan langsung oleh negara-negara maritim secara kooperatif (I. F. J. Lim, 2007). Selain itu MDA tidak hanya sekedar data, namun harus diimplementasikan berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh pusat informasi tersebut.

Negara ASEAN memiliki pemahaman yang sama mengenai dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh konflik LCS ini. Berdasarkan data dan kejadian yang sudah mereka rasakan di perairan yang disengketakan, negara ASEAN rajin mengadakan pertemuan dan latihan gabungan. Di tingkat bilateral, negara ASEAN melakukan patroli terkoordinasi secara rutin. Contohnya adalah kerjasama antara coast guard Indonesia-Vietnam yang dilakukan untuk mengawasi Tindakan IUU Fishing di wilayah Laut Natuna Utara. Dalam hal ini, integrated patrol tidak bisa dilaksanakan karena ASEAN bukan sebuah pakta pertahanan.

b. *Governing the Sea*

Variabel kedua dari arsitektur keamanan maritim di LCS adalah *governing the sea*. Untuk menghindari efek buruk yang ditimbulkan, pemahaman tentang proses dan fenomena keamanan yang terjadi di kawasan harus dimiliki oleh setiap negara (Security and Intelligence Agency, 2018). Proses penelaahan anatomi konflik dilakukan untuk mencapai konsensus mengenai stabilitas keamanan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, lembaga-lembaga pembangunan dan bantuan multilateral

memiliki peran yang vital untuk proses pencegahan krisis dan menciptakan stabilitas di kawasan (Andersen, 2000: 442).

Dalam tesis ini, upaya *governing the sea* akan difokuskan pada kepemimpinan ASEAN untuk mendukung upaya pembentukan arsitektur keamanan maritim di LCS. Senada dengan pernyataan Bueger (2019), dalam penelitiannya mengenai “What is the right security architecture for the Western Indian Ocean?”,

“*Governing the sea* menyiratkan dialog politik yang bertujuan untuk menemukan konsensus di antara perbedaan, memastikan komitmen politik untuk menangani keamanan maritim di kawasan, dan menjaga kekuatan besar agar tetap terkendali.”

Dalam konteks LCS, negara-negara ASEAN harus bersatu untuk menghadapi RRC sebagai *super power state* dunia. Jika anggota ASEAN berjalan secara parsial, maka ketidakseimbangan di kawasan mungkin akan lebih dinamis dari saat ini. Secara teoritis, hal ini sesuai dengan pernyataan Noguee & Spanier (1977) yang menyatakan bahwa:

“Jika semua negara yang tergabung dalam institusi regional pasti akan memperhatikan kekuatan mereka untuk bertahan hidup. Untuk mencegah serangan, mereka harus sekuat aggresor potensial. Dengan demikian, keseimbangan kekuatan adalah prasyarat untuk menjamin keamanan maritim di kawasan.”

Pada pembahasan ini, peneliti akan fokus pada pengakuan akan multilateralisme, kepentingan dialog politik di ASEAN, penggambaran mengenai komitmen politik para anggota, macam-macam forum keamanan maritim yang dikembangkan oleh ASEAN, dan pengusungan kandidat *regional leader* yang layak mengatur komando pergerakan ASEAN dalam isu LCS.

1) Pengakuan akan Multilateralisme

Noguee & Spanier (1977) melalui bukunya “Politics of Tripolarity” menjelaskan jika semua negara yang tergabung dalam institusi

regional pasti akan memperhatikan kekuatan mereka untuk bertahan hidup. Untuk mencegah serangan, mereka harus sekuat aggresor potensial¹. Dengan demikian, keseimbangan kekuatan adalah prasyarat untuk menjamin keamanan maritim di kawasan. Researcher and Coordinating Officer Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) berpendapat bahwa:

“Negara-negara ASEAN sudah sejak lama mengakui bahwa untuk menyelesaikan isu lintas negara, kerjasama juga harus dilakukan secara multilateral.”

Hal ini senada dengan pendapat Snyder (2017), pengembangan pendekatan keamanan kooperatif regional multilateral terhadap sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dapat membantu pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Pendapat ini juga didukung oleh Leonard & Ramsay (2013) bahwa menjelaskan, untuk menyelesaikan konsekuensi transnasional dari konflik seperti ini, diperlukan upaya multilateral dari negara-negara yang ada di kawasan itu. Jadi meskipun RRC lebih senang berhubungan secara bilateral, namun proses transnasionalisasi terhadap isu ini sudah tidak bisa dibendung. Lembaga multilateral akan membantu proses pencegahan krisis dan menciptakan stabilitas di kawasan (Andersen, 2000: 442), apalagi jika melihat posisi LCS yang menyeret keterlibatan berbagai pihak hingga ke Amerika dan para aliansinya di NATO. Tanpa multilateralisme, negara-negara yang lebih kecil akan berada pada kerugian yang besar jika melawan kekuatan regional seperti RRC.

Berbeda dengan Khatibzadeh (2020) yang menyarankan penyelesaian konflik tanpa campur tangan dan intervensi asing, Niklas Swanström (2004) dalam bukunya mengenai “The prospects for multilateral conflict prevention and regional cooperation in Central Asia” malah mengusulkan jika di beberapa belahan dunia

¹ Dalam kasus ini, RRC.

(seperti Asia Tengah), proses pencegahan konflik multilateral akan memberikan sedikit prospek jika tidak melibatkan aktor eksternal (seperti Rusia dan RRC). Dalam kasus LCS, jika tidak ingin menyeret negara-negara besar yang lain, ASEAN harus melakukan refleksi dan akselerasi untuk menjadi lembaga multilateral yang kokoh dan solutif.

Dzung (2000) dalam penelitiannya mengenai "Balance of Power in Asia Pasific", menjelaskan jika keseimbangan regional terganggu, negara cenderung mengambil tindakan responsif untuk kembali ke posisi equilibrium. Jika negara mengabaikan aturan operasional bahwa kekuasaan harus diimbangi, mereka menempatkan keamanan mereka dalam situasi bahaya. Konflik multilateral juga erat kaitannya dengan konsep stabilitas kawasan yang dikemukakan oleh Jhon Spanier (Nogee & Spanier, 1977), ia menjelaskan jika semua negara yang tergabung dalam institusi regional harus memperhatikan kekuatan mereka untuk bertahan hidup. Untuk mencegah serangan, mereka harus sekuat aggresor potensial. Dengan demikian, keseimbangan kekuatan adalah prasyarat untuk menjamin keamanan maritim di kawasan.

Dalam konteks LCS, agresor terkuat bisa berasal dari RRC dan Amerika, dua kekuatan besar yang saling merebut dan mempertahankan hegemoni mereka di LCS. Amerika pada dasarnya mengaku jika keberadaan mereka di perairan ini hanya berfungsi sebagai balance of power atau rebalancing, menurut mereka 'polisi dunia' tentu harus turun untuk mendamaikan situasi. Jika dilihat dengan seksama, intervensi Amerika juga sebenarnya bisa dilandasi oleh 'kecemburuan' mereka terhadap peningkatan kekuatan RRC dalam kegiatan perekonomian, keamanan dan perpolitikan global.

Sebagai kekuatan penyeimbang, Amerika Serikat menerapkan pendekatan baru, yaitu melakukan kerjasama militer dengan

beberapa negara di Asia, memberikan bantuan asistensi keamanan (meskipun anggaran cenderung menurun), serta melanjutkan penjualan senjata ke negara-negara dagang utama di Asia Tenggara. Keseriusan itu dibuktikan dengan pernyataan langsung presiden Barack Obama yang akan mengeluarkan dana sebesar US \$119 Juta (anggaran tahun 2015) untuk membantu meningkatkan pertahanan keamanan negara-negara yang bersengketa di Asia Tenggara bahkan berjanji akan menambahkan US \$140 juta di tahun berikutnya (Hennessey & Loderman, 2015).

Selain untuk mengimbangi kekuatan RRC, Amerika Serikat juga ingin mempertegas standing point-nya terhadap wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Bagaimana pun Amerika akan tetap menganggap bahwa wilayah Laut Cina Selatan merupakan wilayah laut lepas. Sekalipun RRC akan menjadi pengawas di wilayah tersebut dengan kemajuan teknologi yang patut diperhitungkan, namun dalam hukum internasional wilayah tersebut masih dalam status sengketa. Hal ini juga untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Laut Cina Selatan bukan merupakan wilayah teritori Cina sekalipun telah terjadi berbagai pembangunan infrastruktur oleh Cina di kawasan tersebut.

Dalam sebuah wawancara, Jonathan Odom (legal commander di Pentagon) menyatakan bahwa sejak tahun 1960-an berkas tentang sengketa LCS sudah masuk ke meja pentagon. Ia merangkum empat kepentingan AS dalam sengketa Laut Cina Selatan. Pertama adalah menghormati hukum internasional. Kedua adalah soal kebebasan berlayar di kawasan (freedom of navigation). Ketiga adalah perkembangan perdagangan dan pembangunan ekonomi yang leluasa. Serta terakhir menyangkut keamanan dan stabilitas regional.

Dalam sengketa ini, negara-negara besar (USA dan RRC) memiliki power yang lebih besar sehingga ada ketidakseimbangan

yang mencolok diantara para aktor. Konflik akan berjalan secara asimetris dan dampak destruktif yang lebih parah hanya akan dialami oleh negara-negara kecil dan menengah. Secara umum, kita harus memahami bahwa multilateralisme tidak bisa disamakan dengan regionalisme, sehingga pada praktiknya kegiatan ini tentu bisa melibatkan pihak-pihak di luar ASEAN yang dirasa memiliki kepentingan yang sama untuk menyelesaikan sengketa di LCS.

Untuk meredakan konflik, multilateral cooperative harus ditegakkan. Kerja sama ini bisa dicapai melalui bidang ekonomi, politik, dan militer. Selama ini multilateralisme yang dilakukan oleh ASEAN masih terbatas pada upaya untuk menekan eskalasi melalui dialog politik dan hubungan bilateral antar negara. ASEAN tidak memiliki power sebesar itu untuk mengatur para anggotanya agar bersikap tenang, mengambil sikap mundur atau maju. Para praktiknya, ASEAN bukan sebuah pakta dan hanya berfungsi sebagai 'tempat nongkrong' untuk membahas isu-isu strategis yang ada di kawasan. Dalam implementasinya, setiap keputusan tetap akan dikembalikan kepada kebijakan masing-masing dari para anggota ASEAN.

Pada skema ini, dibandingkan leading sector ASEAN sebenarnya lebih cocok untuk menjadi controller, menjaga stabilitas keamanan dan menurunkan ketegangan. Pergerakannya belum pada tahap proses penyelesaian konflik secara utuh. Hubungan bilateral tetap menjadi aspek yang paling berpengaruh. Sedangkan di sisi lain, setiap hubungan politik pasti akan dipengaruhi oleh national interest para anggota.

2) Dialog Politik

Sebagai organisasi multilateral di kawasan, ASEAN merupakan titik fokus diplomasi RRC dengan Asia Tenggara karena perkembangan dan potensi RRC untuk menjadi negara adidaya

sangat bergantung pada Asia Tenggara yang stabil dan dinamis secara ekonomi (Chinvanno, 2015). ASEAN selama ini selalu mengupayakan dialog politik sebagai salah satu jalan damai untuk menyelesaikan sengketa. Fefen Zamzari selaku perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI dalam wawancaranya mengatakan:

“ASEAN bertugas untuk menciptakan wadah dan rajin mengadakan dialog dengan negara-negara di luar ASEAN untuk meyakinkan mereka bahwa ASEAN akan mengelola konflik dengan damai dan kondusif.”

Secara tidak langsung, arsitektur keamanan diperlukan untuk memungkinkan dialog yang tulus antar aktor regional, mengatasi sentimen negatif dan kecurigaan (Tapia, 2021: 2). Di sisi lain, berbagai dialog politik yang sudah dilakukan akan membantu proses pembentukan arsitektur keamanan maritim yang ideal di kawasan. Kedua hal ini memiliki hubungan saling terkait.

Dalam prosesnya, dialog politik tidak selalu berjalan dengan lancar. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan perspektif dari para anggota ASEAN mengenai ancaman dan tingkat kepentingan dari pembahasan suatu isu. Biasanya ketika suatu isu gagal untuk diselesaikan di meja dialog, para pemimpin ASEAN akan memainkan promosi ASEAN Way dan diplomasi ulang-alang untuk menggalang dukungan dan mencapai consensus melalui pendekatan bilateral yang lebih intensif.

Dialog politik memang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari kepentingan nasional masing-masing negara. Secara historis, Kamboja pernah menolak pembahasan LCS pada sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) tahun 2012, lalu kejadian yang sama terulang pada tahun 2016 dimana ASEAN tidak bisa mengeluarkan sikap kolektifnya atas sengketa di wilayah tersebut. Ketika itu, banyak pihak yang sepakat jika sikap Kamboja dipengaruhi oleh kedekatan mereka dengan Beijing. Jadi meskipun

bersengketa dengan beberapa negara di LCS, kita tidak bisa menampik jika RRC memiliki kepentingan yang strategis bagi beberapa negara di ASEAN. Terlihat jelas dari pengaruh ekonomi, kemampuan militer, dan kedekatannya dalam sektor lain.

Baru-baru ini, Myanmar bahkan tidak diundang untuk menghadiri dialog politik dalam KTT ASEAN ke-38 dan 39 yang digelar di Brunei Darussalam pada 26-28 Oktober tahun 2021 lalu. Myanmar tidak berhak memberikan pernyataan politiknya di forum karena tidak mematuhi arahan ASEAN untuk menyelesaikan konflik domestik dalam waktu satu tahun setelah kudeta. Junta militer Myanmar pada nyatanya masih menggencarkan sikap buruknya dalam isu penangkapan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan warga sipil yang dilakukan mereka di luar pengadilan.

Kekecewaan ASEAN terhadap komitmen perdamaian yang seharusnya dilakukan oleh Myanmar dan isolasi politik yang dilakukan kepada Myanmar secara tidak langsung membuat kita 'terbelah'. Junta militer yang berkuasa di Myanmar malah sempat mendapat dukungan dari Xi Jinping (Arbar, 2021), meskipun dukungan itu kembali ditampik dalam sidang PBB beberapa bulan setelahnya. Situasi terbelahnya ASEAN akan menjadi isu baru di kawasan. Arsitek keamanan tidak mungkin bertahan tanpa dialog politik yang lancar.

Untuk mencegah hal itu, *shuttle diplomacy* bisa menjadi salah satu solusi yang efektif. Hal ini didasarkan oleh fakta bahwa komunikasi langsung kadang kala tidak bisa mengurangi ketegangan (Brahm & Burgess, 2003), tapi justru memperburuk situasi. Negara-negara di ASEAN bisa melancarkan pendekatan politik mereka untuk melakukan dialogi secara bilateral.

Inti dari *shuttle diplomacy* adalah penggunaan pihak ketiga untuk menyampaikan informasi secara bolak-balik di antara para pihak, yang berfungsi sebagai sarana komunikasi yang andal dan

tidak rentan. Perantara tidak hanya berfungsi sebagai estafet untuk tanya jawab, tetapi juga dapat memberikan saran untuk memindahkan konflik ke arah penyelesaian dan melakukannya secara pribadi. Hal ini bisa dilakukan oleh siapapun, dan Indonesia adalah salah satunya.

3) Komitmen Politik

Dalam proses governing the sea, kegiatan multilateralisme harus dibangun berdasarkan kesepakatan dan kesamaan persepsi dari semua pihak. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah intervensi asing yang akan mempengaruhi komitmen dan keputusan bersama. Misalnya ketika RRC menawarkan bantuan dan mendapat dukungan dari salah satu negara ASEAN atas Tindakan unlawfull-nya di LCS, maka di saat yang sama suara kolektif ASEAN juga ikut menurun. Di sisi lain, ASEAN juga akan merasakan kesulitan untuk menghadapi RRC seorang diri jika para anggotanya tidak memberi dukungan penuh kepada ASEAN untuk mendeklarasikan sikap kolektif.

Isu overlapping claimt memang seharusnya dilaksanakan secara bilateral. ASEAN hanya berperan sebagai jembatan untuk mengontrol agar super power state tetap terkendali dan semua pihak mau menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan provokatif di kawasan ini. Negara-negara di ASEAN pada dasarnya solid, namun pendekatannya sedikit berbeda. Tidak ada yang secara resmi menyatakan keberpihakannya kepada Amerika atau RRC, dua negara adikuasa yang sedang berebut pengaruh. Namun negara yang memiliki perbatasan dengan RRC cukup vocal untuk membahas isu ini, dan negara lain tetap mengikuti keputusan ASEAN secara umum.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada praktiknya setiap negara akan menjalankan politik luar negeri sesuai dengan

kepentingan nasional negaranya masing-masing. Kita tidak bisa memastikan bahwa seluruh anggota ASEAN akan 'selalu' setuju untuk memerangi tindakan ilegal RRC di LCS. Tidak ada kawan dan lawan dalam kancah geopolitik global. Abdul Rivai Ras, dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia mengatakan bahwa:

“Meskipun ASEAN sangat berperan untuk menjembatani penyelesaian konflik ini, namun negara-negara anggotanya tentu akan sulit untuk bersikap netral. Mereka akan terikat dengan kepentingan nasional masing-masing. Namun dalam kerangka ASEAN, mereka masih berkomitmen dan akan berusaha untuk mereduksi konflik dan ketegangan regional.”

Putti Ananda Hiswi dari ERIA bahkan mengatakan jika hubungan RRC dengan beberapa negara di ASEAN sudah seperti hate-love relationship.

Baru-baru ini perubahan yang signifikan terlihat pada sikap Filipina yang melunak kepada RRC setelah presiden Rodrigo Duterte menjabat. Meskipun begitu, sikap Duterte untuk menjaga hubungan yang seimbang dengan RRC tetap tidak bisa menyelesaikan konflik yang sebenarnya. 16 November 2021, dua kapal Filipina diblokir dan disemprot dengan meriam air oleh dua kapal penjaga pantai China (Girard, 2021). Filipina meradang, lalu melayangkan nota protesnya dua hari kemudian.

Dalam wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, dibandingkan RRC, Filipina memang lebih condong untuk melakukan hubungan yang harmonis dengan Amerika. Wildan Faisol, dosen Universitas Al-Azhar Indonesia menjelaskan jika:

“Kita tidak bisa menutup mata pada fakta bahwa semua negara di kawasan akan memiliki kecondongan mereka masing-masing. Filipina memiliki kedekatan dengan US, sedangkan Kamboja memiliki hubungan yang erat dengan RRC. Komitmen politik masih

berpegang teguh pada kesamaan persepsi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional.”

Sebagai tambahan, Agus Setiadji dalam hal ini menganggap bahwa dari 10 negara yang ada di ASEAN, yang cenderung berpihak kepada USA adalah Singapura dan Filipina, sedangkan yang memiliki tendensi positif terhadap China antara lain Laos, Kamboja, dan Myanmar. Diantara mereka yang netral diantaranya adalah Vietnam, Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Dalam kesempatan lain, Surya Wiranto selaku dosen prodi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan RI mengatakan bahwa:

“Thailand memiliki kepentingan dengan RRC, sehingga dia lebih mendukung dan condong ke RRC. Kepemimpinan ASEAN selama ini sudah terjaga dengan baik. Komitmen politik akan disesuaikan dengan posisi mereka sebagai ASEAN atau sebagai negara anggota ASEAN secara terpisah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional mereka. Jadi collective security-nya based on national interest. Sedangkan Indonesia memiliki sikap yang stabil sejak awal, kita adalah negara yang paling netral, Indonesia bahkan menggagas AOIP.”

Kita memang tidak akan pernah tahu siapa saja yang memiliki komitmen politik yang teguh sampai isu ini benar-benar selesai dengan baik. Seperti yang sudah kita tahu, secara eksternal ketidakhadiran Myanmar dalam di KTT ASEAN memberikan dampak negatif terhadap citra ASEAN di kancah global. Secara praktis, ASEAN sebenarnya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mencampuri urusan nasional Myanmar. Pada 24 April 2021, ASEAN telah memberikan waktu setahun agar junta militer bisa memenuhi 5 poin konsensus dan menyelesaikan masalah mereka pasca kudeta.

Myanmar berkilah, setelah setahun kondisi mereka masih stagnan. Jika Myanmar tidak memiliki komitmen yang baik terhadap perdamaian domestik di negerinya, maka sudah dipastikan jika mereka juga tidak menaruh perhatian yang banyak terhadap urusan perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan. Jika secara kolektif ASEAN tidak memiliki suara yang bulat terhadap isu LCS, maka eksistensinya sebagai arsitektur keamanan di kawasan ini juga akan dipertanyakan. Meskipun begitu, secara historis netralitas dan komitmen ASEAN sebenarnya sudah tercermin dalam berbagai platform seperti pembentukan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC) dan Zona Perdamaian, Kebebasan dan Netralitas (ZOPFAN).

Prinsip yang dipegang sejak perang dingin ini menegaskan bahwa ASEAN berkomitmen terhadap 'prinsip-prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial semua negara' dan 'hak setiap negara, besar atau kecil, untuk memimpin eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan luar dalam urusan internalnya.

4) Forum Keamanan Maritim

ASEAN selalu membuka ruang untuk berdiskusi dengan siapapun di forum manapun. Menurut Wiranto (2016), konflik di Laut Cina Selatan memang diperkeruh dengan cara penetapan batas maritim yang berbeda, sehingga sengketa tidak dapat ditangani dengan segera dan memerlukan rangkaian dialog, forum, dan platform yang banyak. ASEAN membuka forum untuk membuka pembahasan mengenai resolusi konflik dan cooperative security partnership di Laut Cina Selatan.

Forum berfungsi untuk menggalang kekuatan dari seluruh anggota ASEAN, karena pada praktiknya mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk berkonflik secara bilateral (apalagi

secara terbuka). Dalam penelitian “Balance of Power in Asia Pasific”, Dzung (2000) menjelaskan ketika keseimbangan terganggu, negara cenderung mengambil tindakan responsif untuk kembali ke posisi equilibrium. Dalam hal ini, negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara berusaha untuk menunggangi ASEAN sebagai media untuk kembali ke posisi itu.

Jika negara mengabaikan aturan operasional bahwa kekuasaan harus diimbangi, mereka menempatkan keamanan mereka dalam situasi bahaya. Dalam kasus LCS, untuk mengimbangi kekuatan RRC atau Amerika, negara-negara di ASEAN tentu harus bergabung dan saling bergandengan tangan untuk mencegah efek destruktif dari konflik. Secara praktis, setidaknya ASEAN bisa membantu mereka untuk mempertahankan status quo, membendung eskalasi konflik yang intens, dan mencegah potensi perang terbuka.

Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti, informan mengusulkan beberapa platform atau forum yang biasa digunakan oleh ASEAN untuk membahas isu-isu strategis mengenai keamanan maritim. Beberapa forum yang digunakan ASEAN diantaranya adalah ASEAN Declaration on Transorganized Crime, ASEAN Outlook on Indo-Pasific, ASEAN Regional Forum, ASEAN Maritime Forum, AMF+, ASEAN Summit, ASEAN Ministerial Meeting (AMM), Senior Officials Meeting (som), ASEAN Defense Ministers’ Meeting (ADMM), ASEAN Declarations on the South China Sea, dan ASEAN-China Dialogue. Sebenarnya masih banyak forum yang bisa dimanfaatkan oleh ASEAN untuk menyokong proses penyelesaian konflik di LCS.

Forum keamanan maritim akan membantu negara untuk menyampaikan keinginan dan keperluannya mengenai struktur keamanan di kawasan. Forum ini juga mengakar pada hubungan multilateral di sektor lain, mendorong peningkatan keamanan dan

kemajuan dari negara-negara yang ada di kawasan Indo-Pasifik (ASEAN pada khususnya).

5) Kandidat Regional Leader

Dinamika di LCS memang semakin ambigu ketika aktivitas militer Amerika dan RRC sudah berada di tahap yang tidak biasa (Hadi, 2020). Pengerahan milisia dilakukan oleh RRC, Vietnam dan Filipina (CNBC Indonesia, 2021), Amerika merapatkan USCG ke barisan kapal perang dan membangun Proyek Darwin, sedangkan negara-negara di kawasan pasti sudah merancang strategi dan kebijakan mereka sendiri untuk menghindari efek domino konflik.

Secara formal, ASEAN bukan organisasi yang mengusung regional leader dan menganggap salah satu dari mereka adalah negara yang paling kuat dan paling berpengaruh di kawasan. Dalam hal ini, duta LBBP RI untuk ASEAN, Ade Padmo yang menguatkan dengan pernyataan:

“Tidak ada mekanisme regional leader di ASEAN, ... ASEAN memiliki country coordinator masing-masing. Siapapun yang menjadi country coordinator, dia akan mendapat dukungan sepenuhnya dari ASEAN.”

Ia juga menambahkan jika dalam suatu organisasi, ketika ada salah satu anggota yang terlalu mendominasi sementara kekuatannya belum terdistribusi secara seimbang, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan efektif.

Isu ini menjadi menarik ketika kita membaca pendapat Fleme et.al, (2010: 44) dalam bukunya “Regional Leadership in the Global System Ideas, Interests and Strategies of Regional Powers”. Fleme mengatakan jika kekuatan regional terdistribusi secara seimbang, maka potensi konflik dan ketegangan akan semakin besar karena semua pihak merasa bahwa mereka memiliki potensi yang sama untuk memenangkan pertikaian. Maka dari itu, keberadaan leader

masih dibutuhkan untuk mendukung upaya pembentukan arsitektur keamanan yang lebih efisien.

Di sisi lain, kelahiran para pemimpin alami di kawasan ini secara historis juga memiliki memiliki pengaruh yang besar terhadap pergerakan organisasi dan arah organisasi ASEAN. Di sisi lain, Fefen Zamzari mengamini dengan menyatakan bahwa:

“ASEAN leadership memang selalu berganti secara periodik, jadi tidak ada masalah dalam hal itu. Namun yang sulit adalah menjaga sentralitas dan kesamaan pandangan di ASEAN. ASEAN leader yang akan diusung bisa membantu ASEAN untuk menyelaraskan keinginan dari semua pihak.”

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti, secara umum informan menyebut jika Indonesia bisa menjadi salah satu regional leader yang cocok untuk ASEAN.

Indonesia telah diakui sebagai pemimpin de facto ASEAN yang tidak pernah memaksakan kehendaknya terhadap anggota blok lainnya. Sementara itu, Galby Samhudi memiliki pandangan yang berbeda. Menurut tenaga ahli di Komisi I DPR RI itu,

“RRC sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk menjadi regional leader di kawasan, apalagi jika didukung dengan kemauan yang tinggi untuk menyelesaikan sengketa.”

Senada dengan pendapat Galby, Pretat (2020) dalam analisisnya mengatakan jika RRC ingin membalik situasi, dia seharusnya bisa menjadi salah satu kandidat untuk memimpin proses ini, namun secara faktual tidak begitu. Pernyataan ini mungkin akan sulit dicapai jika melihat kondisi factual dari pergerakan RRC di LCS.

RRC masih berusaha untuk mengukuhkan klaimnya disana, kadang-kadang bahkan dengan berbagai cara yang agresif. Peneliti lebih mengamini jika negara ASEAN lah yang maju untuk menjadi regional leader di kawasan ini. Seperti yang sudah dikatakan oleh

Hao & Qinghong dalam “Maritime Security Cooperation in the South RRC Sea”, RRC memang lebih baik mendukung sentralitas ASEAN dalam arsitektur regional yang akan dikembangkan.

RRC sebenarnya belum memiliki keinginan untuk menjadi arsitek utama dari keamanan maritim di kawasan. Mereka justru sedang menata diri untuk meraih hegemoni dan kekuatan yang lebih besar dari klaim sengketa dan aktivitas mereka di LCS. Cina dengan sikapnya yang tidak patuh terhadap UNCLOS, hendak memutar balikan keadaan dengan sesekali nampak bermain-main dengan hukum sambil mengontrol keadaan di sekitarnya.

c. *Policing the Sea*

Dalam pembahasan mengenai variabel *policing the sea*, peneliti akan menjelaskan tentang perilaku RRC yang tidak taat hukum dan lebih mengedepankan *China’s Lawfare*-nya, proses penegakan hukum, serta upaya resolusi konflik lainnya yang dilakukan oleh ASEAN untuk mendukung proses pembentukan arsitektur keamanan maritim di wilayah perairan LCS.

1) *China’s Lawfare*

Secara historis, kekuatan angkatan laut RRC sudah dikonstruksikan sejak masa Kaisar Wu di Dinasti Han. Fakta ini memberi alasan lain terhadap proses kebangkitan *sea power* Cina di masa kontemporer. Beberapa sarjana percaya jika China hanya sedang berusaha untuk mengembalikan kejayaan maritim mereka di masa lalu. Menurut (Sun, 2010), perkembangan *sea power* Cina bisa dijelaskan melalui paparan berikut.

Tabel 4.19Perkembangan *Sea Power* RRC

Masa	Keterangan
Dinasti Qin	RRC membuat kemajuan besar dalam konstruksi kapal, penangkapan ikan lepas pantai, dan navigasi laut
Dinasti Han	

Masa	Keterangan
	<p>Wu membangun armada maritim untuk melakukan operasi militer di laut.</p> <p>Armada RRC dapat berangkat dari Xuwen di Guangdong atau Hepu di Guangxi, melalui Asia Tenggara dan Selat Malaka, dan akhirnya tiba di negara bagian Huangzhi (situs Kanchi di pantai timur India saat ini) dan Sri Lanka.</p>
Dinasti Tang	"Jalur Sutra Maritim" yang makmur dan perdagangan luar negeri swasta menjangkau Jepang, Korea, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, dan wilayah Arab di Afrika Timur.
Dinasti Song	Perdagangan luar negeri swasta dikembangkan lebih lanjut dan dibawa ke dalam sistem manajemen pemerintahan nasional.
Dinasti Yuan	Citong (Quanzhou) di pantai tenggara Cina menjadi pelabuhan terbesar di Timur, yang bahkan bisa dibandingkan dengan Alexandria di Mesir. Beberapa dari mereka melakukan ekspedisi laut skala besar.
Dinasti Ming	RRC mencapai posisi terdepan di dunia dalam teknologi pembuatan kapal dan teknik navigasi. Tujuh pelayaran Cheng Ho, yang mengunjungi lebih dari 30 negara dan wilayah dan berlayar sekitar 160.000 mil laut, bahkan menciptakan keajaiban dalam sejarah navigasi dunia (1405-1433).

Sumber: diolah peneliti

Selama beberapa tahun mereka terlalu fokus mengurus permasalahan di kontinen, sehingga aktivitas maritim tersendat dan baru diperhatikan setelah PD II berakhir. Dalam perjalanannya, di era kontemporer kekuatan maritim RRC juga disokong dengan China's lawfare.

Jika dilihat dengan seksama, pola lawfare yang ditunjukkan oleh Cina dalam konflik maritim di LCS menunjukkan pola yang sama dengan yang mereka salin dari Uni Soviet. Seperti Soviet, diktator PKC tidak pernah malu mengatakan bahwa hukum adalah

instrumen partai untuk menghancurkan musuh. Kontrol mutlak partai atas sistem peradilan China adalah komponen utama dari strategi lawfare Xi. Dia mengulangi bahwa

“jika partai berada di atas hukum, atau hukum di atas partai, itu adalah jebakan politik dan proposisi yang salah.”

Kepemimpinan partai adalah jiwa dari aturan hukum China dan hanya partai yang dapat memajukannya secara efektif. Singkatnya, Partai Komunis selalu berada di atas hukum (Thayer & Han, 2021).

Cina jelas telah belajar bagaimana mempersenjatai hukum untuk memainkan permainannya melawan Barat. Mereka kemudian secara agresif menggunakan senjata hukum untuk mengejar perbedaan pendapat di luar negeri. Jika China's Lawfare digabungkan dengan taktik salami, maka Cina hanya akan bermain 'aman', tapi tentu dengan pergerakan yang agresif dan tidak tahu malu. Hal ini juga lah yang menjadi alasan kenapa Cina selalu playing victim ketika eskalasi konflik mulai memanas di LCS.

Jika ada negara kecil di kawasan ini yang mendekati ke Amerika atau salah satu 'musuh'nya, Cina akan menganggap hal itu sebagai tindakan provokasi dan intervensi yang menghalalkan mereka untuk melindungi diri dengan permainan senjata dan bentuk pertahanan lainnya. Dalam kasus eksplorasi minyak dan gas di Natuna, Cina dengan percaya diri telah menuduh Indonesia melakukan tindakan illegal di wilayah yang sudah mereka klaim. Padahal jika melihat aturan yang tertera di UNCLOS, di dalam ZEEI Indonesia berhak untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam, termasuk ikan.

Perilaku Cina lainnya yang menuai kontroversi adalah mengenai tindakan mereka untuk mengesahkan undang-undang penjaga pantai (China's Coast Guard) yang mengizinkan CMM untuk menembaki kapal asing yang dianggap melanggar kedaulatan Cina di LCS. Undang-undnag itu disahkan pada bulan

Januari tahun 2021 lalu. Menurut peneliti, aturan ini cukup pemberani, Cina seakan-akan mengibarkan bendera permusuhan kepada negara-negara yang bersengketa dengannya di perairan laut. Tidak hanya negara ASEAN, tapi juga dengan Jepang, Taiwan, Korsel, dan sebagainya.

Ancaman di LCS memang tidak pada tahap militer dan non-militer, tapi campuran keduanya yang menghasilkan zona abu-abu dan berpotensi menimbulkan perang asimetris dan hibrida. Chellaney (2021) mengatakan bahwa:

“Kaburnya garis antara perang dan perdamaian diabadikan dalam strategi resmi dari rezim PLA yang mengeluarkan doktrin Tiga Perang (san zhong zhanfa). Sama seperti pena bisa lebihkuat dari pedang, demikian juga hukum, perang psikologis, dan perang opini publik.”

Pengetahuan yang sudah didapat dari analisis mengenai China's Lawfare ini diharapkan bisa memberi gambaran kepada pembaca mengenai alasan kenapa proses penegakan hukum di LCS selalu tersendat dan (seakan-akan) tidak pernah selesai atau memiliki titik terang.

2) Proses Penegakan Hukum

Keliat (2009) pernah mengatakan jika isu keamanan maritim bersifat transnasional, sehingga perlu kerjasama dari negara-negara pantai dalam penangannya. Hal ini didukung oleh Klein (2011) dan Feldt et al. (2013), yang mengatakan bahwa keamanan maritim juga akan tercapai ketika laut bebas dari tindak kejahatan, konflik antar legal framework, dan ancaman unlawful acts di seluruh domain maritimnya.

RRC dalam hal ini selalu berusaha untuk menekan lawfare-nya kepada para claimant states di kawasan, dan ASEAN hadir sebagai jembatan atas persoalan ini. Seperti yang sudah dikatakan oleh

dosen Sekolah Kajian Strategik Global (SKSG UI), Abdul Rivai Ras, bahwa:

“Dalam upaya penegakan hukum, ASEAN telah menawarkan diri sebagai peace fasilitator yang berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep kerjasama, baik yang bersifat militer maupun yang bersifat non-militer”

ASEAN menawarkan DOC dan COC sebagai instrumen hukum yang bisa ditaati dengan baik oleh negara-negara yang ada di kawasan. Menurut Ade Padmo Sarwono, ASEAN sudah berusaha untuk mengajak RRC untuk duduk bersama dengan menyusun DOC di daerah konflik. Perlu waktu 10 tahun untuk RRC menyetujui gagasan tersebut, hingga tahun 2002 DOC terbentuk. Salah satu hal penting yang terkandung dalam DOC adalah COC.

ASEAN dan China sebelumnya telah membuat banyak pernyataan bersama yang mengklaim atau menjanjikan kemajuan dalam negosiasi COC. Pada 2017, kedua belah pihak mengumumkan draft Framework COC, dan pada 2018, Single Draft Negotiating Text (SDNT). Tahun setelah itu membawa Draft Pertama 20 halaman dari COC yang direncanakan. Namun semua pencapaian tersebut belum cukup untuk menyelesaikan sengketa bilateral. Menurut beberapa pejabat yang terlibat dalam proses negosiasi, Draft Pertama secara khusus memuat sejumlah ketidaksepakatan serius tentang posisi China dan negara pengklaim ASEAN (Hoang, 2020).

Pada Agustus 2018, ketika konten SDNT diumumkan, Menteri Luar Negeri China Wang Yi secara sepihak mengumumkan bahwa COC ini akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Hal ini kemudian diklarifikasi oleh DLBB NKRI untuk ASEAN bahwa:

“Untuk membuat COC yang efektif tentu tidak gampang, jadi butuh proses perundingan yang jadinya ‘terkesan’ berlarut-larut. ASEAN tidak mematok kapan COC harus selesai, target di tahun

2021 adalah sebuah pernyataan sepihak. Semua proses sudah berjalan sesuai prosedur dan situasi saat ini. COC adalah isu yang sangat sensitif, sehingga proses negosiasi tidak bisa dilaksanakan secara online. Juni 2020, COC bisa dibahas secara online namun terbatas pada negosiasi mengenai pasal-pasal yang ringan. Bukankah kita semua menginginkan COC yang substantif dan aplikatif?”

ASEAN sudah melakukan first and second reading pada tahun 2020, dan melakukan actual negotiation pada pertengahan tahun 2021 lalu. COC adalah isu yang sangat sensitif, sehingga proses negosiasi tidak bisa dilaksanakan secara online. Juni 2020, COC bisa dibahas secara online namun terbatas pada negosiasi mengenai pasal-pasal yang ringan. Di tahun yang sama, negosiasi akhirnya dilakukan secara fisik. Juni 2021 ada negosiasi pertama, bulan Agustus preamble COC sudah diselesaikan sebanyak 6 pasal. Masih banyak yang harus dibahas dalam COC, dan tidak ada jaminan jika instrumen ini akan selesai dengan cepat.

COC mengatur kewajiban untuk bekerjasama, confidence building, serta upaya-upaya untuk mencegah dan memitigasi konflik agar tidak bereskalasi. COC akan konsisten dengan UNCLOS, sehingga tidak akan melewati wewenang dari UNCLOS atau menentukan peraturan yang bertentangan dengan UNCLOS. Semua legal framework sebenarnya sudah ada di UNCLOS, namun COC akan lebih memperhatikan aspek dari LCS secara khusus. Setelah negosiasi di tingkat expert level, negosiasi tekstual dilakukan.

Beberapa hal yang bisa kita highlight mengenai COC diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, jika COC berubah menjadi regional instrument, tentu komitmen politiknya akan lebih kuat, meskipun tetap memperhatikan keunikan wilayah LCS. COC berupaya untuk menghindari konflik terbuka di LCS, konflik yang

berusaha untuk dihindari oleh semua orang. COC bukan resolusi final, dia hanya salah satu upaya untuk mencegah efek destruktif lainnya. COC harus aplikatif dan substantif, jadi pembahasannya sudah seharusnya dibuat secara maksimal.

Kedua, hal menarik lainnya yang menjadi perhatian anggota ASEAN adalah mengenai daya ikat COC. COC akan diupayakan untuk memiliki daya ikat yang lebih baik, namun tidak semua negara akan senang untuk diikat. Proses pembentukannya terbilang lama karena ASEAN dan RRC harus menyamakan persepsi di banyak sektor. Ketiga, inisiatif ini menyebabkan beberapa international community (seperti US, Prancis, Austria) menaruh perhatian lebih karena ketentuan COC secara tidak langsung juga akan mempengaruhi mereka.

Dalam segi ikatan hukum, berdasarkan hasil wawancara Agus Setiadji dan KEMLU mendukung proses penyelesaian dan implementasi COC yang memiliki daya ikat hukum. Sebaliknya, ERIA, KEMENKOMARVES, Surya Wiranto, dan Wildan Faisal menganggap jika tidak semua negara ASEAN menginginkan COC yang memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Permasalahan utama LCS sebenarnya bukan terletak di UNCLOS-nya, namun pada interpretasi. Jadi ketika ada konflik, yang harus diatasi adalah kesalahpahaman terhadap butir-butir UNCLOS. Permasalahan tidak hanya harus diselesaikan melalui jalur hukum, tapi harus disokong juga oleh diplomasi, jalur militer, dll.

3) Resolusi Konflik

Resolusi konflik dapat didefinisikan sebagai proses informal atau formal yang digunakan dua pihak atau lebih untuk menemukan solusi damai atas perselisihan mereka (Shonk, 2021). Beberapa resolusi konflik lain yang sudah dibahas oleh narasumber diantaranya adalah sebagai berikut. Dalam penelitian ini, Agus

Setiadji menyarankan agak RRC tidak selalu menggunakan bilateral meeting untuk menyelesaikan setiap eskalasi konflik di LCS. Multilateralisme seharusnya bisa dibangun, dan BAKAMLA mengusulkan confidence dan trust building diantara para aktor. Pernyataan ini didukung oleh (Jeulain, 2019) bahwa sesuatu semacam ini bisa mengeluarkan ASEAN dari situasi dilema.

Peningkatan "transparansi" kekuatan militer dan langkah-langkah pembangunan kepercayaan dan keamanan sangat penting karena dapat membantu mengurangi ketidakpercayaan antar negara dengan memfasilitasi penilaian ancaman yang efektif oleh negara peserta. Transparansi yang lebih besar dicapai melalui berbagi laporan intelijen, pertukaran pengamat di latihan militer, dan inspeksi bersama pangkalan militer. Confidence And Security-Building Measures (CSBMs) juga bisa dijalankan melalui kegiatan latihan gabungan bersama.

Di sisi lain, Galby dari DPR dan Surya Wiranto menyebutkan jika proses resolusi konflik melalui skema hukum akan sangat sulit dicapai. Maka dari itu, negara yang terlibat harus mengakselerasi kemampuan conflict management mereka untuk membantu perdamaian dan stabilitas di kawasan. Pada praktiknya, ASEAN menggunakan DOC sebagai traktat yang menformalisasi proses negosiasi multilateral, sesuatu yang selalu ingin dihindari oleh RRC (Majumdar, 2015: 116). Namun bahkan jika Traktat hanya menjadi dasar untuk negosiasi lebih lanjut, ini merupakan jeda penting dari negosiasi bilateral dan informal.

Di sisi lain, ERIA, KEMLU, dan Wildan Faisol menyarankan agar resolusi konflik harus tetap diupayakan melalui proses penegakan hukum internasional. Meski dalam praktiknya, KEMENKOMARVES juga menambahkan diplomasi dan jalur maritim sebagai upaya resolusi tambahan. Kita tentu berharap, bahwa setiap aktor memiliki keinginan untuk menyelesaikan konflik

secepatnya, dengan atau melalui media apapun. Alternatif terbaik tentu misi untuk mencapai perdamaian tanpa perang dan kekerasan. Seperti yang sudah dikatakan oleh Albert Einstein, “Peace can’t be kept by force; it can only be achieved by understanding.” Dalam konteks LCS, melalui dialog politik dan diplomasi maritim.

Penyelesaian sengketa sesuai dengan hukum internasional melalui mekanisme UNCLOS sebenarnya adalah pilihan yang paling ideal. Namun sengketa batas maritim biasanya cukup sulit untuk dilakukan. Dari awal China menyatakan tidak akan patuh terhadap UNCLOS berkaitan dengan LCS, termasuk hasil keputusan arbitrase Internasional yang dilayangkan Filipina tentang sengketa LCS. ASEAN memiliki mekanisme penyelesaian sengketa bernama High Council. Mekanisme ini tercantum dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC). Meskipun sudah dirilis sejak lama (1976), mekanisme ini masih jarang digunakan oleh ASEAN untuk menyelesaikan konflik di kawasan.

High Council akan menghadirkan negara perwakilan sebagai mediator dan negara-negara yang bersengketa untuk melakukan mediasi. Namun jika kesepakatan tidak tercapai, ASEAN tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan putusan. ASEAN secara institusi sudah memiliki MDA regional dan menaruh perhatian besar mengenai isu ini. Namun dalam praktiknya, tidak semua negara fokus ke dalam konflik ini karena masing-masing negara memiliki fokusnya masing-masing.

4.6.2. Peran Indonesia sebagai *Regional Leader* untuk Mendukung Pembentukan Arsitektur Keamanan Maritim di LCS

Meskipun tidak termasuk ke dalam *claimant state*, Indonesia ikut terseret dalam kasus LCS ketika Cina memasukan sebagian wilayah ZEEI di perairan Natuna sebagai *nine dash line* atau zona *tradisional fishing*

ground mereka. RRC sudah melayangkan klaim tersebut sejak tahun 1993, namun Indonesia belum merespon dengan tantangan yang tegas. Protes biasanya hanya disampaikan melalui jalur diplomasi yang halus. Keengganan tersebut kemudian mendorong lemahnya upaya internasional yang kita lakukan untuk menekan ekspansi Cina di perairan Natuna (Connelly, 2016).

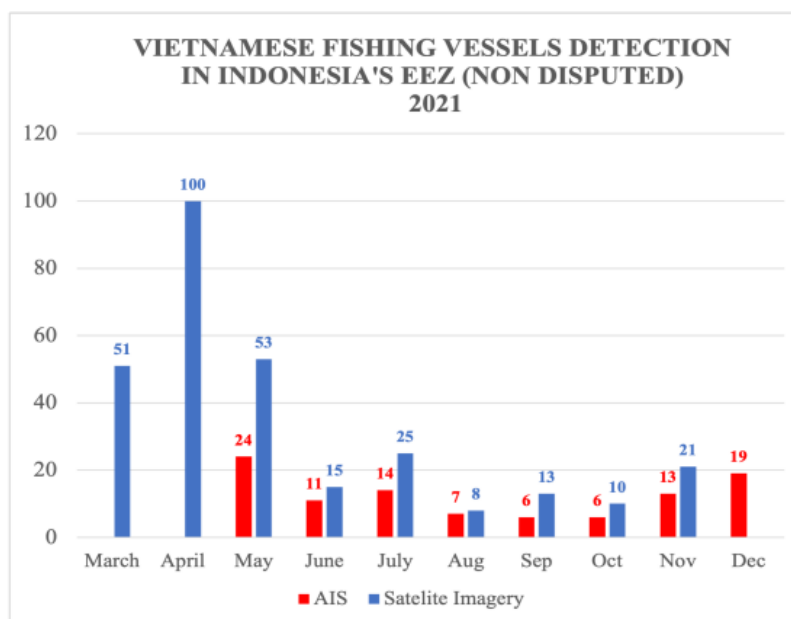
Perubahan yang signifikan terjadi di pemerintahan Jokowi, kegiatan ofensif RRC di Natuna lebih terekspos media dan mendapat perhatian yang luas dari masyarakat. Tahun 2020, Jokowi secara terbuka menyatakan pidato tegas tentang tidak ada upaya tawar-menawar untuk kasus LCS di Natuna. Sebagai negara kepulauan terbesar dunia, posisi Indonesia sangat strategis karena berada di jantung kawasan Asia Pasifik dan Indo Pasifik karena menghubungkan dua samudra dan dua benua (Marsetio et al., 2017).

Indonesia yang menganut prinsip luar negeri Bebas Aktif selama ini tetap konsisten untuk menjaga netralitasnya dalam konflik di LCS. Indonesia pada prinsipnya selalu ingin mendorong Zona Perdamaian, Kebebasan dan Netralitas (ZOPFAN) yang ada di ASEAN. Atas dasar itu, narasi yang dikeluarkan Indonesia selalu terus mengajak seluruh pihak untuk berdialog dan berdamai dan mencegah politik aliansi antara USA dan RRC, padahal sebenarnya Indonesia memiliki potensi politik dan kelautan yang potensial untuk turut serta dalam sengketa.

Posisi strategis Indonesia dan perannya di ASEAN telah mendorong negara ini untuk menjadi salah satu aktor kunci dalam menentukan dan menjaga keamanan maritim di kawasan. Baru-baru ini, Indonesia bahkan menggagas adanya dokumen ASEAN Outlook on Indo-Pasifik yang memberi celah kepada masyarakat Asia Tenggara untuk menyelesaikan konflik LCS melalui *soft diplomacy* yang damai dan akomodatif. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Indonesia tentu didasari oleh kesepakatan-kesepakatan yang sudah dilahirkan PBB melalui IMO dan dokumen UNCLOS.

a. Respons Indonesia terhadap Konflik LCS

Berkaitan dengan batas maritim, kapal-kapal RRC juga sempat melanggar wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Pelanggaran ini termasuk kegiatan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang sering dilakukan oleh kapal penjaga pantai RRC. Meskipun secara statistik, per tahun 2021 saja kapal ikan Vietnam jauh lebih aktif untuk mencuri ikan di kawasan ini. Perhatikan data berikut.

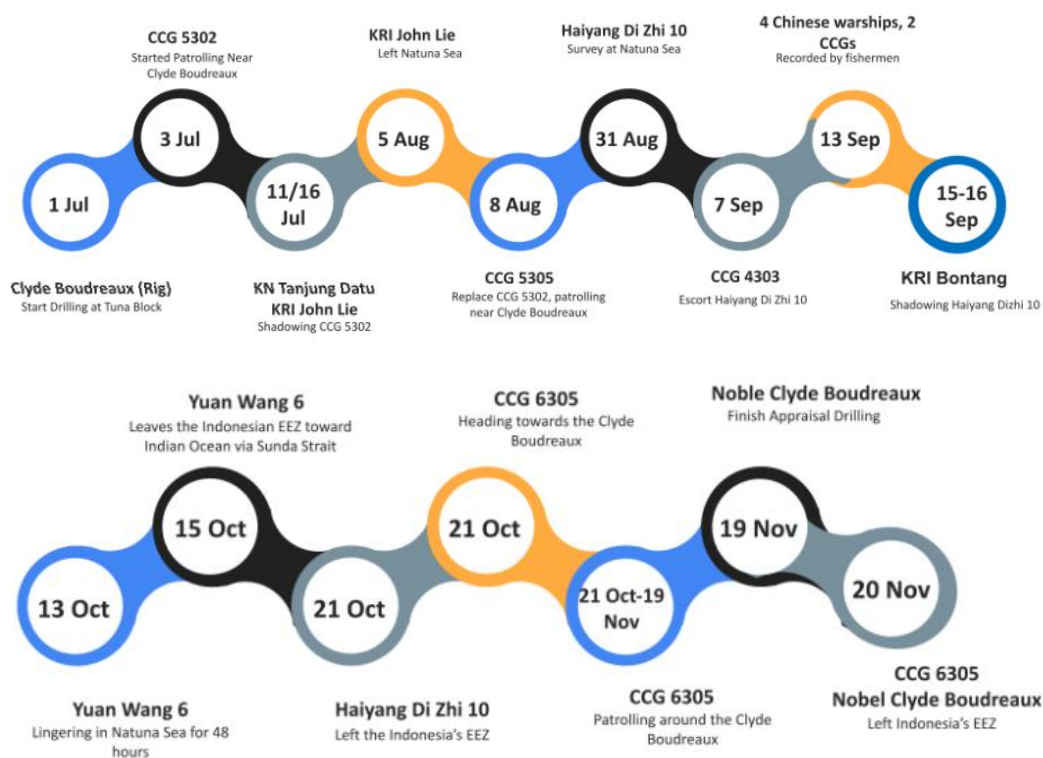


Gambar 4.34 Tren Penyerbuan Kapal Penangkap Ikan Vietnam ke ZEE Indonesia Sepanjang 2021. Sumber: IOJI (2021).

Indonesia dan Vietnam memang masih memiliki sengketa maritim di wilayah ini. Berdasarkan analisa dari Ocean Justice Initiative (2021), intensitas kapal patroli Indonesia di Laut Natuna tidak sebanding dengan jumlah kapal penangkap ikan Vietnam. Dari seluruh kapal penangkap ikan Vietnam di ZEE, Pemerintah Indonesia berhasil menyita 38 kapal pada tahun 2021. Di tahun tersebut, IOJI bahkan mengklasifikasikan tindakan IUU Fishing Vietnam sudah berada di 'level kritis'.

Pergerakan agresif juga dilakukan oleh RRC di wilayah perairan Natuna. Berdasarkan jenisnya, kapal yang sering tertangkap basah merupakan bagian dari kapal penangkap ikan, kapal China Coast Guard,

kapal penelitian/survei geologi, bahkan kapal militer (PLA). Ancaman ini tidak pernah terjadi sebelumnya, kapal *China Coast Guard* terdeteksi di sekitar proyek eksplorasi di Blok Tuna dan beroperasi dengan cara yang mengganggu proyek. Selain itu, kapal survei/penelitian geologi (Haiyang Dizhi 10) tertangkap basah sedang melakukan survei geologi blok gas D-Alpha yang mengandung sejumlah besar cadangan hidrokarbon. Perhatikan *timeline* berikut ini.



Gambar 4.35 *Timeline* Serbuan Kapal China di Laut Natuna Utara Selama Tahun 2021. Sumber: IOJI (2021)

Secara diplomatis, pemerintahan Xi Jinping telah melayangkan beberapa protes atas kegiatan eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh Indonesia di perairan Natuna. Untuk merespon seluruh rangkaian eskalasi konflik di LCS, beberapa sikap yang telah diambil oleh Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan arahan Presiden, pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna.
- 2) Indonesia tetap berpegang teguh pada UNCLOS 1982 dan tidak pernah mengakui klaim China atas wilayah historis *nine dash line*. Awal Februari tahun 2022, Kepala SKK Migas dengan tegas menyatakan jika wilayah Natuna akan dieksplorasi dan dieksploitasi oleh Indonesia sebagai wujud eksistensi kepemilikan Indonesia atas perairan Natuna.
- 3) TNI siap melaksanakan operasi siaga tempur setelah China mengklaim Laut Natuna sebagai wilayah teritorial mereka. Kapal-kapal militer RI dikerahkan. Bahkan KSAL sudah menetapkan Mako Guspurla Koarmada I di Natuna.
- 4) Indonesia telah melayangkan nota protesnya kepada China melalui Kementerian Luar Negeri.
- 5) BAKAMLA sebagai *Indonesia Coast Guard*, telah menambah personilnya untuk mengamankan Laut Natuna. Mereka juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti TNI, polairud, nelayan dan pemerintah setempat, dll.
- 6) Pemerintah melalui Kemenko Maritim telah menambah kapal besar dengan jenis *ocean going* (lintas samudera) untuk menjaga Natuna.
- 7) Indonesia menggagas ASEAN Outlook on Indo-Pasifik dan mengajak negara-negara di Asia Tenggara untuk bekerja sama menjaga perdamaian dunia, kestabilan geopolitik, dan keamanan maritim di kawasan.

Untuk isu milisia, BAKAMLA memberikan pandangannya melalui pernyataan berikut.

“Milisia adalah isu yang abu-abu, kita tidak bisa menebak-nebak bahwa nelayan tersebut milisia atau bukan. Kehadiran milisia tidak bisa dibuktikan secara empiris. Mereka biasanya tidak berbendera, kita juga harus melakukan kroscek tentang

alasan-alasan mereka berlayar di perairan Indonesia. Indonesia tidak memiliki permasalahan laut dengan RRC, yang dikhawatirkan seharusnya adalah keberadaan nelayan-nelayan Vietnam yang mencuri ikan di Indonesia. Jika ada pelanggaran dari RRC, kita tetap harus menindak sesuai dengan aturan internasional yang berlaku.”

LCS memang sudah menghadirkan ancaman keamanan yang abu-abu. Untuk menghadapi hal itu, peneliti berharap jika pemerintah bisa melakukan persiapan yang matang dalam kondisi apapun. Jika tidak diberi perhatian yang cukup, ancaman yang abu-abu justru bisa menimbulkan masalah di kemudian hari.

Agus Setiadji, dalam hal ini juga menambahkan pendapatnya mengenai respon yang harus dilakukan oleh Indonesia terhadap isu LCS.

“Langkah strategis yang harus dipilih oleh Indonesia adalah berprinsip bebas aktif dan netral. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kekuatan pertahanan terutama aspek maritim sebagai *balancing power*. Perlu operasi dan kerjasama bilateral dengan negara-negara sahabat. Sesuai dengan UNCLOS, Laut Natuna Utara harus dieksplorasi dan melibatkan nelayan dan perusahaan perikanan untuk mencari ikan di wilayah itu.”

Pemerintah berkewajiban untuk terus memonitor status hukum dari Laut Natuna Utara di PBB, serta menyiapkan seluruh sarana dan prasarana agar Laut Natuna Utara menjadi basis baru untuk kepentingan geostrategik, geopolitik, dan geoekonomi NKRI di masa yang akan datang. Untuk mengefisiensikan pengawasan, pemerintah sudah seyogyanya mampu mengaplikasikan alat-alat dan teknologi digital yang lebih canggih dan mumpuni.

Untuk meningkatkan *awareness* masyarakat awam terhadap ancaman, kontribusi pariwisata dan investasi maritim perlu dipantik untuk mendukung kegiatan pengoperasionalan pulau-pulau terdepan. Tidak

hanya berlaku untuk Natuna, tapi juga untuk pulau-pulau terdepan lain yang ada di Indonesia. Pada praktiknya, pengembangan wisata bahari harus diatur sesuai dengan kebutuhan dan keseimbangan lingkungan. Berbasis ekologi dan keefisiensi untuk mendukung *multiplier effect* yang lebih besar untuk masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Sebagai *archipelagic state*, hal ini tentu menjadi kewajiban dari semua pihak. Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan untuk mewujudkan situasi ideal. Usaha untuk menjaga Natuna dilakukan untuk menghindari perseteruan bilateral yang dianggap tidak perlu, permasalahan batas negara dan kepemilikan pulau tentu harus dihindari, agar tidak ada lagi pulau-pulau Indonesia yang diklaim oleh negara asing.

b. Kesiapan Indonesia sebagai *Regional Leader*

Statistik menunjukkan bahwa kawasan ASEAN telah cukup berhasil dalam mencegah konflik antar negara meningkat menjadi perang besar-besaran. Dibandingkan dengan periode pra-ASEAN, tingkat korban dari konflik bersenjata telah berkurang sebesar 93%, dan tidak ada perang antar negara yang terjadi sejak berdirinya organisasi tersebut (Heiduk, 2016). Secara historis, Indonesia selalu memainkan peran penting dalam pembentukan arsitektur keamanan regional yang dipimpin ASEAN dalam bentuk ZOPFAN dan SEANWFZ.

Konsep berulang tentang “sentralitas ASEAN” serta ASEAN sebagai “landasan” kebijakan luar negeri Indonesia telah digunakan oleh akademisi dan pembuat kebijakan Indonesia untuk membentuk pemahaman mengenai peran Indonesia di ASEAN, baik di dalam negeri atau di kancah internasional. Namun jika merujuk kepada pendapat Frazier & Stewart-Ingersoll (2010: 734) dan Fleme et.al (2010), untuk menjadi *regional leader* Indonesia harus memenuhi beberapa syarat:

- a. memiliki minat dan melibatkan diri secara luas dalam pengembangan tatanan keamanan di kawasan;
- b. memiliki kemampuan untuk menentukan *security order*;

- c. memiliki kemampuan di dalam dimensi militer, demografis, dan ekonomi; serta
- d. dibekali dengan tata kelola maritim yang baik (*good maritime governance*).

Semangat Jakarta untuk bertindak sebagai pemimpin “intelektual” untuk pengelolaan konflik regional didasarkan pada keyakinan bersama di antara para pemimpin Indonesia bahwa pemeliharaan stabilitas dan keamanan kawasan dan pengelolaan perselisihan secara damai harus menjadi pusat kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia melalui MENLU dan beberapa menteri terkait telah mencoba untuk melakukan komunikasi dan koordinasi melalui forum ARF, ADMM dll serta melakukan protes diplomasi berkaitan dengan pelanggaran di Kawasan LCS.

Dalam pandangan Jakarta, ASEAN-lah yang harus menjadi penopang arsitektur keamanan regional. Mengingat sengketa LCS yang bersifat transnasional, pemerintah Indonesia harus lebih aktif lagi untuk menunjukkan kepemimpinannya di ASEAN. Menyatakan pendapat dan komitmen mengenai LCS di dunia internasional termasuk PBB dan berbagai forum dialog lainnya. Indonesia memiliki kapabilitas yang besar untuk menjadi *regional leader* di ASEAN.

Dalam 20 tahun terakhir hingga sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Hal inilah yang membuat Indonesia masuk ke dalam kelompok G20 dan bahkan di 2022 menjadi Presidensi G20. Sebagai informasi, G20 adalah kumpulan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Saat ini posisi Indonesia berada di urutan ke-16 berdasarkan PDB. Secara stabil, China, India dan Indonesia menjadi tiga negara yang memimpin perekonomian global (Liputan 6, 2021).

Indonesia bahkan sudah empat kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, selama masa tugas periode 1974-1975, 1995-1996, 2007-2008, dan 2018-2020. Untuk melihat perbandingan dengan negara ASEAN lainnya, perhatikan tabel berikut.

Tabel 4.16 Tabel Perbandingan Masa Jabatan Negara ASEAN di Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB

No	Nama Negara	Periode
1.	Filipina	<ul style="list-style-type: none"> • 1957 • 1963 • 1980-1981
2.	Malaysia	<ul style="list-style-type: none"> • 1965 • 1989-1990 • 1999-2000 • 2015-2016
3.	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • 1973-1974 • 1995-1996 • 2007-2008 • 2019-2020
4.	Thailand	<ul style="list-style-type: none"> • 1985-1986
5.	Singapura	<ul style="list-style-type: none"> • 2001-2002

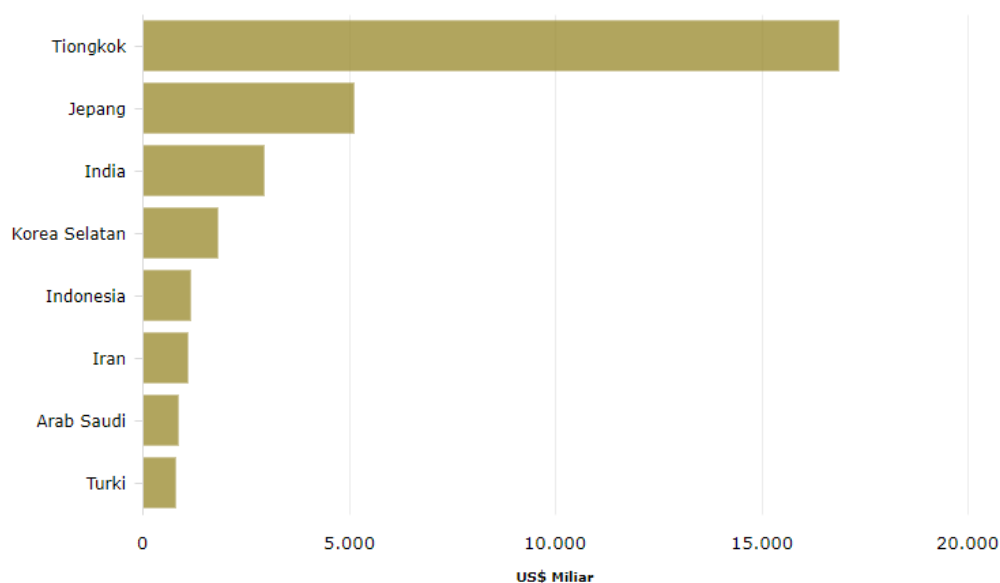
Sumber: diolah peneliti

Berdasarkan tabel tersebut, frekuensi dan durasi Indonesia untuk mnejabat sebagai dewan keamanan tidak tetap PBB lebih banyak jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Secara historis, rekam jejak Indonesia dalam kasus LCS juga bagus. Kita telah menginisiasi dan menyukseskan penyusunan DOC, COC, AOIP, dll. Indonesia juga rajin mengadakan *shuttle diplomacy* sehingga *joint statement* bisa dikeluarkan lebih cepat.

Berdasarkan hal itu, Indonesia secara alami memiliki *security order* dalam menginisiasi berbagai pergerakan dan *platform* keamanan di tingkat regional. Secara demografis, kita memiliki jumlah penduduk terbanyak di ASEAN. Ada 270,2 juta orang yang bisa menyokong pergerakan Indonesia menjadi negara yang unggul. Secara ekonomi, kita

memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Menurut Pricewaterhouse Coopers (2022), Indonesia memiliki potensi untuk memiliki ekonomi terbesar keempat di dunia dengan GDP sebesar USD7,3 triliun.

Menurut data IMF (2021), di Asia Indonesia berhasil menempati urutan kelima dengan tingkat PDB terbesar. Perhatikan Tabel berikut.



Gambar 4.36 Negara dengan PDB Terbesar di Asia

Sumber: IMF (2021)

Meski terlihat jauh tertinggal dari Tiongkok, namun geliat ekonomi di tanah air akan disokong oleh tingkat produktivitas yang tinggi, keberadaan sumber daya alam yang melimpah, dan jumlah populasi yang besar. Secara historis, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat (Novalius, 2022). Maka dari itu, kita masih memiliki kesempatan untuk menjadi negara dengan PDB terbesar di Asia, bahkan di tingkat internasional. Eksistensi demokrasi di Indonesia juga sudah diakui secara global, Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara ASEAN yang diundang oleh Amerika dalam KTT Demokrasi pada Desember 2021 silam.

c. Potensi dan Kendala yang Dihadapi Indonesia

Dalam pembahasan berikut, peneliti akan menguraikan beberapa komponen yang bisa menjadi potensi dan kendala yang dihadapi Indonesia untuk menjadi *regional leader* di kawasan. Masalah yang kami temukan selama proses pengambilan data akan menjadi pertimbangan dan referensi yang mendukung proses pembahasan penelitian.

1) Maritime Domain Awareness

MDA nasional perlu dikembangkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat (Van De Laar et al., 2012: 3). Tidak semua informan setuju jika MDA Indonesia sudah berjalan dengan baik. Beberapa dari mereka mengkritisi anggaran BAKAMLA yang terlalu kecil untuk membentuk pusat maritim yang bagus dan Indonesia masih dianggap terlalu sibuk mengurus persoalan kontinental.

Menurut Abdul Rivai Ras, dosen Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia,

“Indonesia juga selalu terdepan dalam mendorong upaya untuk menjaga stabilitas di kawasan. Namun, Indonesia belum sepenuhnya memiliki MDA yang baik. Adapun BAKAMLA yang paling tepat menjadi controller MDA. Indonesia juga belum memiliki pusat informasi mengenai keamanan maritim yang bisa diandalkan di Kawasan. Singapura dianggap lebih baik dalam hal ini.”

Keberadaan IMIC (Indonesia Maritime Information Centre) sebagai salah satu lembaga pendukung MDA, hanya salah satu langkah awal kita untuk menjadi negara kepulauan dengan tingkat keamanan maritim yang baik. Selanjutnya, Indonesia akan memiliki Maritime Fusion Center yang akan mengolah semua data secara efektif dan efisien. Setelah data terkumpul dan dianalisis, kita akan menggunakan PUSKODAL sebagai next step dari ini. IMIC seharusnya tidak sebatas pusat informasi untuk BAKAMLA saja,

namun bisa digunakan juga oleh semua kementerian dan lembaga yang membutuhkan. BAKAMLA berharap suatu hari nanti, IMIC bisa menjadi satu-satunya pusat informasi yang menyediakan data kemaritiman secara nasional.

Meskipun begitu, Direktur National Maritime Institute (NAMARIN) berpendapat, peluncuran IMIC di Indonesia masih harus diakselerasi dengan serius, karena orang-orang yang bekerja di laut lebih nyaman memberikan laporan kejadian kepada lembaga internasional seperti IFC di Singapura atau IMB di Malaysia. Menurut nelayan, respon dari Malaysia dan Singapura lebih cepat, sehingga permasalahan maritim yang mereka hadapi bisa terselesaikan dengan lebih efektif. Meskipun begitu, BAKAMLA menganggap jika informasi yang disampaikan oleh pusat informasi regional itu selalu tidak proporsional dan menyudutkan sehingga BAKAMLA harus melakukan penyeimbangan melalui data IMIC.

2) Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri Indonesia sudah berjalan dengan optimal karena Indonesia selalu berusaha untuk menjadi anggota yang vokal untuk menyuarakan keamanan dan perdamaian. Indonesia secara historis telah bermain sebagai salah satu aktor utama dalam *conflict management* di ASEAN. Indonesia kadang-kadang menawarkan dirinya untuk menjadi mediator jika ada negara yang berkonflik secara bilateral. Netralitas yang dibangun sudah seharusnya dijaga sampai kapanpun. Jika politik luar negeri kita memihak, maka proses intervensi dan potensi konflik akan menjadi lebih besar dan membahayakan.

3) Strategi Keamanan Maritim

Di sisi lain, secara internal sinergi lembaga di tanaha masih harus ditingkatkan karena banyaknya instansi yang memegang

kendali dalam proses penegakan hukum di laut. Menurut Galby, BAKAMLA sebagai lembaga yang paling berhak untuk menjaga keamanan laut di Indonesia seharusnya memiliki legal basic yang jelas. Instansi yang tidak ramping hanya akan membuat pendanaan negara menjadi membengkak.

Dalam urusan pengelolaan maritim, strategi maritim berfungsi untuk melindungi kepentingan nasional NKRI di domain maritim. Praktinya akan didasarkan pada kualitas total dari TNI AL, dan efektivitas dari suksesnya program-program utama yang diusung negara ketika konflik dan krisis menjelang perang. Sedangkan kebijakan akan diturunkan dalam bentuk Strategi Nasional untuk Keamanan Maritim (National Strategy for Maritime Security). SNKM akan digunakan untuk mengontrol keamanan maritim di masa damai. SNKM akan disusun berdasarkan ends, ways, and means.

Bagi sebagian besar informan, Indonesia masih belum memiliki strategi keamanan maritim yang pakem, tidak ada scenario jangka panjang, dan diperlukannya akselerasi kualitas dari para personel maritim kita. Agus Setiadji mengatakan jika:

“Strategi nasional Indonesia masih belum pakem dan sering berubah-ubah. Tujuannya (ends) adalah keamanan maritim diseluruh wilayah NKRI, dengan (ways) berupa langkah memperkuat TNI terutama organisasi TNI AL serta memperkuat alutsista maritim, means atau sarananya adalah dengan memperkuat PMD yang tidak hanya sebatas retorika, dukungan anggaran pertahanan dan memperbaiki doktrin militer sesuai dengan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan.”

Beberapa informan juga menyoroti tentan proses pembentukan KOMCAD pertama yang dibentuk untuk matra darat. Surya Wiranto dalam hal ini mengatakan bahwa:

“Untuk kekuatan personel, sayang disayangkan karena KOMCAD yang pertama kali dibentuk malah dialokasikan untuk matra darat padahal 2/3 wilayah kita adalah laut.”

Mengingat proses rekrutmen komponen cadangan TNI AL membutuhkan waktu yang cukup lama, maka perlu adanya upaya akselerasi dengan terbitnya Peraturan Presiden sebagai bentuk pelaksanaan UU Nomor. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Susaningtyas Kertopati mengamini hal ini dengan melayangkan pernyataan:

“Indonesia patut memperkuat BAKAMLA sebagai komponen cadangan TNI AL yang sudah siap diintegrasikan ke dalam formasi tempur kekuatan TNI AL.”

Menurut peneliti, proses perekrutan tentu membutuhkan waktu. Dalam hal ini pemerintah menjawabnya dengan rencana pembukaan rekrutmen anggota KOMCAD untuk matra darat, laut dan udara pada tahun 2022 ini (PPID KEMHAN RI, 2022). Strategi keamanan maritim harus disokong dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian yang baik, sehingga proses evaluasi bisa dilakukan secara berkala dan kegiatan akselerasi menjadi lebih cepat dan efisien.

4) Instrumen Hukum

Secara umum, Indonesia masih belum memiliki UU Keamanan Laut yang bisa mengakomodasi pergerakan BAKAMLA dan perampingan instansi. Kita juga masih harus meningkatkan political will kita jika ingin menjadi negara maritim yang besar. Di sisi lain, keberlangsungan PMD masih dipertanyakan banyak orang karena dirasa mati suri meskipun Jokowi juga mendapat apresiasi terhadap visi tersebut.

Di dalam negeri, Indonesia belum memiliki UU Keamanan Laut yang bisa menjelaskan peran dan posisi BAKAMLA secara

komprehensif. BAKAMLA kabarnya akan diakselerasi melalui omnibus law keamanan laut, namun wacananya sampai saat ini belum masuk ke PROLEGNAS, tentu akan semakin sulit untuk terwujud. Omnibus Law rencananya akan menggabungkan 24 undang-undang dan dua peraturan pemerintah. UU juga akan mengatur peran Bakamla dalam keamanan laut.

5) BAKAMLA sebagai Indonesian Coast Guard

Indonesia masih membutuhkan lebih banyak peralatan dan personel yang berkualitas untuk melindungi perairan yang luas. Kegiatan restrukturisasi anggaran harus dilakukan dalam upaya efisiensi Keberadaan coast guard hakikatnya berupaya untuk melindungi negara dari segala ancaman keamanan yang berasal dari laut. Seiring dengan berkembangnya dimensi ancaman, maka coast guard sebagai leading sector keamanan maritim harus memiliki kapabilitas yang baik untuk mengatasi setiap ancaman.

Secara umum, coast guard Malaysia mendapat keuntungan yang lebih baik karena Perdana Menteri mereka memberikan perhatian lebih terhadap urusan maritim dan anggarannya. Mereka sudah memiliki helikopter untuk melakukan patroli dengan optimal, bahkan mendirikan akademisi khusus untuk pelatihan keamanan maritim. Dari kemampuan patroli, kapal BAKAMLA masih lebih baik dari beberapa negara lain (seperti Vietnam dan Filipina). Jika ada komitmen politik, pembangunan akan lebih terlihat. Tugas yang besar sudah seharusnya dibekali dengan anggaran yang besar.

Ada beberapa hal yang peneliti catat mengenai peran BAKAMLA dalam menjalankan tugas sebagai coast guard di Indonesia. Pertama, Usia BAKAMLA. Jika didasarkan pada waktu, Indonesia tentu masih bisa melapangkan diri karena umur BAKAMLA yang bahkan belum mencapai angka satu dasawarsa, meskipun BAKORKAMLA sebagai pendahulunya telah didirikan

sejak 2005 silam (beriringan dengan pendirian Malaysian Maritime Enforcement Agency). Dengan begitu lembaga ini masih bisa dianggap berada pada tahap meraba-raba, belum sematang USCG yang bahkan sudah berumur 231 tahun. *Experience is the best teacher*, meski waktu tidak selalu diizinkan untuk dijadikan sebagai pembenaran.

Kedua, *Overlay Tugas*. Pada faktanya, beberapa sektor di Indonesia masih terjebak pada bias fungsi dan tumpang tindih tugas. Meskipun pemerintah sudah mengatur regulasi tentang pembagian tupoksi, ketika di lapangan regulasi kadang hanya sekedar regulasi. BAKAMLA memiliki peran dan fungsi yang mirip dengan KLKP yang berada di bawah yuridiksi Kementerian Perhubungan, maka diperlukan instrumen hukum yang jelas mengenai tupoksi dari keduanya (Azis et al., 2016). Secara empiris, informan dari Direktorat Strategi dan Kebijakan BAKAMLA mengatakan bahwa:

“Kebijakan mengenai SDM dan peralatan sudah cukup mumpuni, hanya saja untuk penegakan hukum di laut masih terasa sektoral. Ada belasan instansi yang memegang kendali di berbagai bidang, akan sangat disayangkan jika ada tumpang tindih tupoksi. Indonesia masih harus meningkatkan integritas lembaga, sehingga tidak ada dan peralatan yang terpecah. BAKAMLA, karena hal-hal teknis mengenai keamanan laut merupakan ranah khusus dari BAKAMLA. Keamanan laut tidak bisa dikotak-kotakan, sehingga jika dibicarakan secara sektoral, maka urusannya tidak akan selesai.”

Semakin banyak lembaga yang mengurus KAMLA, maka semakin banyak budget yang harus disediakan oleh negara untuk mengurus semua lembaga tersebut. Dengan kendali yang bagus, seharusnya semua lembaga tersebut bisa diintegrasikan untuk menghadapi kejahatan KAMLA secara efektif dan efisien. Namun

Indonesia tidak memiliki kerangka mengenai national strategy for maritime security. Instansi kelautan di Indonesia masih berjalan secara sektoral, sehingga untuk mencapai maritime security comprehensive saja usaha kita masih tertatih-tatih. Jika ada ide untuk membuat ini, prosesnya pasti akan berjalan dengan lambat.

Ketiga, Pendanaan. Indonesia memang tidak memfokuskan budgeting militer yang besar, perhatikan gambar berikut untuk melihat perbandingan anggaran Indonesia dengan negara-negara lain di ASEAN.

Tabel 4.121 Perbandingan Anggaran Pertahanan Negara ASEAN

NEGARA	APBN	PDB
Singapura	18%	3,3%
Myanmar	13%	4,3%
Brunei	9,3%	3,1%
Vietnam	8,3%	2,2%
Kamboja	8%	1,6%
Thailand	6,6%	1,5%
Filipina	6%	1,1%
Malaysia	5,4%	1,5%
Indonesia	4,1%	0,8%

Meskipun berada di luar Kementerian Pertahanan, namun BAKAMLA juga mendapat perlakuan yang sama. Budget yang disalurkan pemerintah hanya \$ 27.5 juta pada tahun 2020 lalu, sangat kontras dengan anggaran USCG yang sampai di angka milyaran dollar. Anggaran yang kecil tentu akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas sumberdaya yang dimiliki oleh BAKAMLA.

Keempat, Peralatan. Untuk melakukan patroli di seluruh perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia (yang sangat luas ini), BAKAMLA tentu harus disokong dengan keberadaan kapal dan senjata yang mumpuni (baik dari segi kualitas maupun kuantitas). Kepala BAKAMLA, dalam sebuah wawancara dengan CNN Indonesia bahkan terang-terangan mengatakan bahwa BAKAMLA kekurangan kapal. Mereka hanya dibekali 10 kapal besar dan

sekitar 20 kapal kecil (CNN Indonesia, 2020). Masih kalah jika dibandingkan dengan Malaysia, USCG, dan negara-negara yang disebutkan dalam tabel di atas.

Di Laut Natuna Utara, kehadiran fisik alutsista Indonesia yang secara permanen ada di ZEE merupakan sebuah keniscayaan. Kita bahkan bisa menggunakan kapal yang tidak baru hanya untuk melempar jangkar dan menandai wilayah. Para pelanggar bahkan biasanya memiliki kapal dan peralatan yang lebih canggih daripada para penegak hukumnya, sehingga pengawasan dan penegakan hukum juga tidak akan berjalan dengan optimal. Belum lagi jika kapal kita dihadapkan dengan kasus IUU fishing oleh para nelayan China. Para milisi yang dikawal oleh CCG (bersenjata penuh) tentu tidak akan gentar jika tertangkap basah oleh BAKAMLA. Mereka bisa saja melarikan diri dengan sangat cepat, teknologi 5G yang mereka miliki bisa digunakan untuk mendeteksi kapal patroli.

Kelima, Wewenang dan Tugas. Banyaknya perundang undangan dan institusi yang mengatur masalah di laut maka penegakan hukum di laut menjadi tidak efektif (Wasisto, 2015). Terhitung ada 13 kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum di laut dengan 17 PERPU yang berbeda, dan BAKAMLA salah satunya. Kewenangan dan tugas BAKAMLA sudah jelas tertulis dalam Perpres No. 178 Tahun 2014. Tugas BAKAMLA adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Beban yang sangat berat jika BAKAMLA tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk mengawasi laut yang sangat luas ini.

Dalam hal ini, Surya Wiranto (dosen Prodi Keamanan Maritim UNHAN RI) menegaskan bahwa:

“BAKAMLA sudah berdiri berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pembuatan UU tersebut cukup tergesa-gesa. Awalnya BAKAMLA berdiri berdasarkan UU No. 6 Tahun 1996

tentang Perairan Indonesia. Setelah UU No. 32 muncul, lalu diselipkan kesana. Hanya UU No. 32 tidak menjelaskan peran BAKAMLA sebagai penyidik (seperti memberhentikan dan memeriksa kapal). UU KAMLA yang akan dibentuk harus menyempurnakan UU 32 dan menjelaskan dengan lebih detail mengenai fungsi penyidikan di BAKAMLA.”

BAKAMLA memang bisa dibantu oleh instansi/kementerian lain, namun kekuatan pribadi BAKAMLA juga harus ditingkatkan dengan maksimal. SDM, senjata, kapal, UAV, pesawat, helicopter, dll harus dimodernisasi dan dinaikkan jumlahnya. Jika Indonesia benar-benar serius membentuk BAKAMLA menjadi coast guard tunggal yang tangguh, maka beberapa yang sudah saya sebutkan di atas seharusnya bisa diatasi secepat mungkin. Indonesia secara kontinyu harus menjalin kerjasama lintas rector dan lintas negara.

d. Penilaian *Good Maritime Governance*

Sebagai kandidat *regional leader*, Indonesia sudah seharusnya memiliki tata kelola maritim yang baik. Tata kelola maritim adalah seperangkat fungsi yang dibentuk oleh program jangka panjang dan sumber daya yang dibutuhkan untuk membiayainya (Shemella, 2016: 89). Untuk mengukur tata kelola maritim sebuah negara, Shemella dalam bukunya mengenai “*Assesing Maritime Governance*” mengatakan jika tata kelola maritim yang baik harus melalui pengujian level I dan II.

Berdasarkan data primer dan sekunder yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, maka penilaian tata kelola maritim di Indonesia bisa ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.18 Penilaian *Good Maritime Governance* Level I

Area Fokus Maritim	Skor
<i>Maritime Domain Awareness</i>	
Patroli, monitoring, pengumpulan dan fusi intelijen maritim, pembagian informasi lintas sector	<i>Modest</i>
<i>Maritime Safety</i>	
Inspeksi, hukum keselamatan maritim, peraturan keselamatan berperahu, pendidikan keselamatan maritim	<i>Moderat</i>
<i>Traditional Maritime Security</i>	
Persiapan dan pelatihan militer, nomor/tipe/kondisi asset taktis, interoperabilitas dengan lembaga mitra maritim, koordinasi dengan negara tetangga/forum maritim global.	<i>Moderat</i>
<i>Enforcement of Custom and Maritime Law</i>	
Hukum dan peraturan maritim nasional, asset dan peralatan taktis, latihan penegakan hukum, kemampuan larangan dan tingkat penyitaan.	<i>Moderat</i>
<i>Protection of Natural Resources (ZEE Enforcement)</i>	
Pelatihan terkait perikanan, penyusunan dan penegakan hukum perlindungan sumber daya, aset dan petugas penegakan hukum perikanan, perjanjian internasional, partisipasi dalam perjanjian dan forum internasional	<i>Moderat</i>
<i>Maritime Search and Rescue</i>	
Kemampuan pencarian dan penyelamatan, aset SAR, pelatihan SAR, komunikasi SAR, partisipasi dalam perjanjian dan forum internasional	<i>Moderat</i>

Area Fokus Maritim	Skor
<i>Disaster Response</i>	
Pencegahan bencana lingkungan, pelatihan dan latihan tanggap, pra-pementasan peralatan tanggap, mitigasi. koordinasi antarlembaga internasional.	<i>Moderat</i>
<i>Port Operations and Security</i>	
Efektivitas lembaga otoritas pelabuhan, pemeliharaan/kondisi fasilitas, partisipasi dalam perjanjian/perjanjian internasional dan forum	<i>Moderat</i>

Sumber: diolah Peneliti

Pertama, Maritime Domain Awareness. Ada empat indikator yang biasa digunakan dalam sub judul yang ini. Patroli diberi poin sederhana karena berdasarkan informasi dari berbagai informan, Indonesia masih harus meningkatkan kapabilitasnya untuk memantau keseluruhan domain maritim. Kita masih tertinggal di jumlah kapal, apalagi untuk menjaga negara kepulauan seluas Indonesia. Menurut data informan dan sumber data primer, jumlah kapal yang dipakai oleh BAKAMLA untuk kegiatan monitoring masih sedikit, beberapa kapal bahkan harus diganti karena sudah tua dan tidak layak pakai.

Di Natuna Utara, saat ini menurut Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (CNN, 2021), KRI yang berpatroli hanya 3 dengan 1 pesawat patroli maritim dan 1 helikopter. Poin ini diberi nilai sederhana. Pengumpulan dan fusi intelijen maritim masih terkendala dengan perkembangan pusat informasi maritim, indicator ini diberi poin moderat. Pembagian informasi lintas sector belum berjalan efektif karena kadang-kadang masih sektoral, peneliti memberi poin moderat untuk hal ini. Secara keseluruhan area MDA mendapat nilai sederhana (*modest*).

Kedua, maritime safety. Inspeksi, hukum keselamatan maritim, peraturan keselamatan berperahu, pendidikan keselamatan maritim. Hal

ini sudah tertuang dalam amanat undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam pelaksanaannya, proses akselerasi program masih harus dinaikkan oleh pemerintah selaku pengawas, masyarakat selaku pendukung kegiatan operasional, serta syahbandar yang menopang sistematika dan kedisiplinan kegiatan operasional kapal (Pramesti et al., 2021: 387). Peneliti memberikan poin moderat untuk keempat aspek tersebut.

Ketiga, *traditional maritime security*. Dipantau melalui aspek persiapan dan pelatihan militer, nomor/tipe/kondisi asset taktis, interoperabilitas dengan lembaga mitra maritim, koordinasi dengan negara tetangga/forum maritim global. Secara politik luar negeri, Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan forum-forum keamanan maritim yang ada di kawasan. Kita selalu berusaha untuk mendorong keamanan dan perdamaian, serta berperan aktif dalam berbagai upaya untuk menjaga stabilitas regional. Banyak informan yang menyetujui hal tersebut selama proses wawancara, untuk itu peneliti memberi poin signifikan.

Kekurangan Indonesia terletak pada perawatan dan efektivitas dari asset taktis. Menurut data Global Fire Power, Indonesia memiliki jumlah alutsista terbanyak di Asia Tenggara, namun masih tertinggal pada proses perawatan dan pembaruan alutsista. Jika dibandingkan dengan negara besar seperti Cina dan Amerika, maka kemampuan kita masih tertinggal. Peneliti memberi poin moderat. Situasi interoperabilitas masih berada pada poin sederhana karena proses digitalisasi masih belum maksimal dan tidak seluruhnya *paperless*. Secara umum, *tradisional maritime security* diberi poin moderat.

Keempat, *Enforcement of Custom and Maritime Law*. Ditandai dengan suksesnya program hukum dan peraturan maritim nasional, asset dan peralatan taktis, latihan penegakan hukum, kemampuan larangan dan tingkat penyitaan. Sub ini berada pada tingkat moderat, penyelenggaraan kegiatan yang mendukung kemampuan tersebut bersifat profesional, terformalisasi, dan didukung oleh tingkat anggaran yang memadai.

Kelima, Protection of Natural Resources (ZEE Enforcement).

Dipengaruhi oleh pelatihan terkait perikanan, penyusunan dan penegakan hukum perlindungan sumber daya, aset dan petugas penegakan hukum perikanan, perjanjian internasional, partisipasi dalam perjanjian dan forum internasional. Sub ini diberi poin moderat maksimal karena masih ada kapal-kapal penangkap ikan asin yang melakukan tindak pencurian ikan di beberapa perbatasan laut Indonesia. Negara ini juga harus mulai melatih dan memberi bekal kepala nelayan untuk menjadi nelayan-nelayan samudera dengan daya jangkauan yang lebih jauh dan potensi perikanan yang lebih banyak dari wilayah yang terlalu dekat dengan pantai.

Keenam, Maritime Search and Rescue. Ditandai dengan kemampuan pencarian dan penyelamatan, aset SAR, pelatihan SAR, komunikasi SAR, partisipasi dalam perjanjian dan forum internasional. Peneliti memberi poin moderat, karena dalam beberapa kasus penyelamatan kita tidak memiliki sumber daya dan peralatan yang cukup untuk melakukan kegiatan evakuasi. Contoh kasus pada tragedi tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402. Indonesia tidak memiliki kapal penyelamat kapal selam untuk mengangkut kapal yang sudah tenggelam. Proses evakuasi pesawat terbang yang terjatuh ke laut juga menjadi salah satu PR yang terus berulang (disamping karena sulitnya medan ketika kegiatan evakuasi berlangsung).

Ketujuh, Disaster Response. Dipengaruhi oleh tindakan pencegahan bencana lingkungan, pelatihan dan latihan tanggap, prapementasan peralatan tanggap, mitigasi, koordinasi antar Lembaga internasional. Peneliti memberi poin moderat. Menurut DPR RI (2018), Proses penanggulangan bencana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana masih memiliki kelemahan-kelemahan diantaranya: belum terwujudnya regulasi turunan undang-undang penanggulangan bencana, belum optimalnya dukungan anggaran bencana, lambatnya mekanisme proses dana penanggulangan

bencana, lambatnya upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana, dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait.

Kedelapan, Port Operations and Security. Ditandai dengan efektivitas lembaga otoritas pelabuhan, pemeliharaan/kondisi fasilitas, partisipasi dalam perjanjian/perjanjian internasional dan forum. Peneliti memberi poin moderat. ISPS Code harus diimplementasikan oleh petugas baik di atas kapal, perusahaan, maupun pelabuhan secara konsisten (Gita et al., 2020: 90) sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala

Tabel 4.19 Penilaian Good Maritime Governance Level II

<i>Fuctions</i>	<i>Maritime Governance</i>	<i>Maritime Civil and Criminal Authority</i>	<i>Maritime Defence</i>	<i>Maritime Safety</i>	<i>Maritime Response and Recovery</i>	<i>Maritime Economy</i>
Subfungsi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Misi maritim ○ Organisasi Badan Maritim ○ Hukum dan kebijakan maritim ○ Dukungan diplomatik dan luar negeri ○ Program maritim ○ Profesional maritim ○ Penjangkauan badan maritim dan koordinasi pemangku kepentingan ○ Akuntabilitas dan pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penegakan hukum perdata dan pidana ○ Pengelolaan perbatasan terpadu ○ Dukungan sektor peradilan ○ Keamanan pelabuhan ○ Keamanan kapal ○ Keamanan rantai pasokan ○ Penegakan lingkungan maritim 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Administrasi pertahanan laut ○ Pasukan pertahanan maritim ○ Kesadaran situasi maritim dan kesadaran dan pengawasan domain maritim 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Administrasi keselamatan laut ○ Kontrol status bendera ○ Penangkapan ikan dan keselamatan kapal kecil dan manajemen operasi ○ Manajemen keselamatan laut ○ Administrasi perizinan pelaut ○ Bantuan untuk infrastruktur navigasi, peralatan, dan pemeliharaan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Administrasi tanggap darurat ○ Manajemen insiden ○ Cari dan selamatkan ○ Api ○ Lingkungan ○ Bantuan pertahanan maritim untuk otoritas sipil ○ Investigasi dan analisis setelah tindakan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengaturan dan pengelolaan kegiatan ekonomi ○ Pelabuhan komersial ○ Transportasi ○ Kondisi pasar
Rentang	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat	Moderat	Signifikan

Pertama, maritime governance. Ada delapan indikator yang digunakan di dalam penilaian, secara keseluruhan hasilnya menunjukkan ciri-ciri moderat. Ada misi maritim yang diusung oleh pemerintah (pecahan dari visi PMD), namun tidak dilaksanakan secara kontinyu sehingga peneliti memberi poin moderat. Ada banyak organisasi badan maritim yang bertugas di Indonesia, namun organisasi ini masih harus tetap diawasi dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih tupoksi dan persaingan sektoral, peneliti memberi poin moderat. Hukum dan kebijakan maritim di Indonesia sudah memadai (Surya Wiranto, 2022), namun perlu beberapa akselerasi tambahan. Namun dalam kegiatan pengumpulan data, peneliti menemukan beberapa sentiment negatif tentang ketidakhadirannya UU KAMLA, peneliti memberi poin moderat.

Indonesia mendapat berbagai dukungan diplomatik dan luar negeri karena sifat negara yang netral dan aktif menyuarakan berbagai permasalahan di kawasan. Peneliti memberi poin signifikan. Program maritim belum terealisasi seutuhnya, hal-hal seperti konektivitas dan infrastruktur maritim, budaya maritim, dan pengelolaan sumber daya laut masih harus dimaksimalkan. Peneliti memberi poin moderat. Kegiatan profesionalisme maritim diberi poin moderat. Penjangkauan badan maritim dan koordinasi pemangku kepentingan diberi poin moderat. Dalam bidang maritim, KEMENKOMARVES memiliki skema untuk melakukan Validasi Eviden dan pemutakhiran kinerja per triwulan. Pengawasan dilakukan oleh DPR, KPK, BPK. Kementrian yang menurus maritim ini mendapat beberapa kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk kecolongan dengan tindak korupsi di beberapa sector. Peneliti memberi poin moderat.

Kedua, Maritime Civil and Criminal Authority. Secara keseluruhan, diberi poin moderat. Untuk hukum pidana, undang-undang sudah ada hanya tinggal penerapannya saja dan masih banyak instansi yang berperan. Hukum perdata bersifat privat, jadi susah terukur. Peneliti memberi poin moderat. Pengelolaan perbatas sudah dilakukan secara

terpadu, meskipun beberapa sengketa batas maritim masih belum diselesaikan, peneliti memberi poin moderat. Tidak ada lembaga peradilan maritim, peneliti memberi poin sederhana. Tahun 2019, DIRJEN HUBLA mengeluarkan surat edaran jika keamanan kapal dan Pelabuhan di Indonesia berada pada kondisi normal (level 1). Maka indikator keamanan kapal dan pelabuhan masing-masing diberi nilai signifikan. Keamanan rantai pasok diberi nilai moderat, karena Indonesia selalu berusaha untuk mengakselerasi keamanan meskipun sedang pandemi. Penegakan lingkungan maritim berada pada level moderat.

Ketiga, Maritime Defence. Secara keseluruhan diberi poin moderat. Administrasi pertahanan laut sudah berjalan dengan optimal (poin moderat). Untuk pasukan pertahanan maritim, peneliti memberi poin moderat. Menurut data Global Fire Power (2020), Indonesia menjadi negara dengan kekuatan tempur terbesar di Asia Tenggara untuk tahun 2020 dengan indeks 0.2544. Peneliti memberi poin signifikan karena masih tertinggal sedikit dari Thailand dalam kepemilikan asset (292: 282). Kesadaran situasi maritim dan kesadaran dan pengawasan domain maritim diberi poin moderat karena Indonesia masih belum memiliki pusat maritim yang mumpuni jika dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia.

Keempat, Maritime Safety. Secara keseluruhan diberi poin moderat. Dipengaruhi oleh administrasi keselamatan laut dan, kontrol status bendera, penangkapan ikan dan keselamatan kapal kecil dan manajemen operasi. Manajemen keselamatan laut. Administrasi perizinan pelaut. Bantuan untuk infrastruktur navigasi, peralatan, dan pemeliharaan. Peneliti memberikan poin moderat, salah satu indikator yang disorot adalah mengenai *flag state control*. Sampai saat ini, implementasi FSR di berbagai negara tidak memuaskan (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020). Dalam sebuah wawancara, James Kraska, Profesor Hukum Maritim Internasional di the Stockton Center for International Law at the U.S. Naval War melayangkan pernyataan bahwa:

“meminta persetujuan negara bendera (*flag state*) untuk tindakan penegakan hukum tertentu seringkali memakan waktu dan bahkan sia-sia karena otoritas pendaftaran kapal dan negara bendera seringkali bergumul dalam mengizinkan atau tidak mengizinkan aparat penegak hukum negara lain untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kapalnya; Bahkan beberapa negara menggunakan keistimewaan yang dimilikinya sebagai negara bendera (*flag state*) untuk melindungi kapalnya dari pengawasan oleh negara lain karena negara bendera enggan untuk bertindak”

Di Indonesia, menurut data dari Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut (Kementerian Perhubungan, 2018)

“...perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap kapal berbendera Indonesia yang berlayar keluar negeri untuk menurunkan dan meniadakan kapal berbendera Indonesia yang masih mendapatkan *detainable deficiency* (penahanan) oleh Port State Control (PSC) di wilayah Asia Pasifik.”

Kelima, Maritime Response and Recovery. Ditandai dengan administrasi tanggap darurat, manajemen insiden, *search and rescue*, api, lingkungan, bantuan pertahanan maritim untuk otoritas sipil, dan investigasi dan analisis setelah tindakan. Peneliti memberi poin moderat karena dalam beberapa kasus penyelamatan kita tidak memiliki sumber daya dan peralatan yang cukup untuk melakukan kegiatan evakuasi.

Keenam, Maritime Economy. Dipengaruhi oleh faktor pengaturan dan pengelolaan kegiatan ekonomi, pelabuhan komersial, transportasi dan kondisi pasar. Peneliti memberi nilai moderat untuk elemen ini. Dalam hal ini, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan bahwa:

“Tahun 2019, dengan kekuatan armada kita, kita mampu melayani seluruh kegiatan distribusi kargo melalui laut ke seluruh Indonesia. Dari 1,4 juta ton kargo, semua sudah mampu kita layani distribusinya”

Kondisi pasar di Indonesia cukup stabi didukung dengan keberadaan ALKI dan *chockepoints* lainnya. Perdagangan laut menjadi salah satu produk yang bisa diunggulkan oleh Indonesia di masa yang akan datang.